

Diana Kartika & Katubi

# Tindak Tutur dan Kesan- tunan



# **TINDAK TUTUR DAN KESANTUNAN**

# TINDAK TUTUR DAN KESANTUNAN

---

**Diana Kartika Arma  
Katubi**



# TINDAK TUTUR DAN KESANTUNAN

---

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:  
**Diana Kartika Arma  
Katubi**

Editor: Dr. Mac Aditiawarman, M.Hum.

Cetakan Pertama: Oktober 2022

Cover: Tim Kreatif PRCI

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2022, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia  
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151  
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: [www.rcipress.rcipublisher.org](http://www.rcipress.rcipublisher.org)  
E-mail: [rumahcemerlangindonesia@gmail.com](mailto:rumahcemerlangindonesia@gmail.com)

Copyright © 2022 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia  
All Right Reserved

- Cet. I –: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022  
Dimensi : 15,5 x 23 cm  
ISBN: 978-623-448-255-3

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan  
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang  
**Hak Cipta Pasal 72**

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta  
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## **KATA PENGANTAR**

Buku ini disusun berdasarkan pemikiran bahwa alangkah baiknya kita ikut meramaikan pembicaraan tindak tutur, karena antara satu teori dengan teori yang lain akan saling melengkapi satu dengan yang lain. Setiap teori mempunyai keunggulan masing-masing. Buku ini diharapkan akan dapat mengisi celah yang tersisa oleh teori yang lain.

Buku ini dapat memberikan pemikiran baru tentang tindak tutur, semakin banyak yang membicarakan semakin lengkaplah bahasan yang diharapkan. Semakin banyak dan sering dibicarakan satu masalah, maka akan semakin dekat kita ke arah satu titik menuju kesempurnaan. Meski pun tidak ada yang sempurna di dunia ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Dr. Mac Aditiawarman, M.Hum. yang telah menyempatkan dirinya untuk membaca dan mengedit buku saya ini. Semoga kebaikannya dibalas Allah Swt.

Padang, Juli 2022

Penulis,

Prof. Dr. Diana Kartika

Prof. Dr. Katubi

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB 1 TINDAK TUTUR.....	1
1.1. Sejarah Kemunculan Teori Tindak Tutur .....	1
1.2. Komposisi Tindak Tutur Menurut Austin .....	2
1.3. Komposisi Tindak Tutur menurut Searle .....	9
1.4. Klasifikasi Tindak Ilokusi .....	12
BAB 2 TINDAK TUTUR MENURUT SEARLE .....	20
2.1. Kritik Sistematis .....	20
2.2. Unsur Kebahasaan.....	22
BAB 3 TINDAK TUTUR DIREKTIF .....	28
3.1. Ragam Tindak Tutur Direktif.....	28
3.2. Tindak Tutur Memohon sebagai Bagian dari Tindak Tutur Direktif.....	31
3.3. Penentuan Tindak Tutur Memohon.....	32
3.4. Strategi Tindak Tutur Memohon.....	35
BAB 4 APA ITU KESANTUNAN? .....	43
4.1. Konsep Dasar Kesantunan .....	43
4.2. Model Pragmatik Kesantunan .....	47
4.2.1. Model Kesantunan Leech .....	48
4.2.2. Teori Kesantunan Menurut Brown dan Levinson	55
BAB 5 TINDAK TUTUR MEMOHON DAN KESANTUNAN.....	65
5.1. Tindak Tutur Memohon.....	65
5.2. Skala Pengukuran Kesantunan .....	66
BAB 6 RAGAM KAJIAN TERKAIT TINDAK TUTUR .....	70

6.1. Shosana Blum-Kulka .....	70
6.2. Shigenori Tanaka dan Kawade Saiki .....	73
6.3. Peansiri Ekniyom Vongvipanond .....	75
6.4. Shoshana Blum-Kulka dan Elite Olshtain .....	77
6.5. Asim Gunarwan .....	78
6.6. Janet Banerjee dan Patricia L. Carrell. ....	82
6.7. Tim Hassal .....	85
6.8. Ahmad Mahmoud Abdul-Hadi Atawneh .....	87
BAB 7 SINTESA DAN PERKEMBANGAN .....	89
7.1. Sintesa Kajian Terdahulu .....	89
7.2. Perkembangan Buku Pragmatik di Indonesia .....	90
BAB 8 PENUTUP .....	96
DAFTAR PUSTAKA .....	99





# BAB 1

## TINDAK TUTUR

---

### 1.1. Sejarah Kemunculan Teori Tindak Tutur

Austin dengan teorinya tentang tindak tutur adalah tokoh yang sangat berjasa dalam membangkitkan kajian pragmatik. Gagasan Austin begitu berpengaruh dibanding karya filosof lain yang juga membahas perihal bahasa seperti Moore dan Wittgensteins.

Menurut Thomas (1995), ada 4 (empat) faktor yang dapat menjelaskan kedahsyatan pengaruh karya Austin dalam dunia linguistik, terutama dalam bidang pragmatik. *Pertama*, kemunculan karya Austin (*How to Do Thing with Words*) yang terbit tahun 1962 sangat tepat momentumnya bersamaan dengan tumbuhnya rasa frustrasi dalam linguistik dengan keterbatasan semantik syarat kebenaran (*truth conditional semantics*). *Kedua*, gagasan Austin (1962) secara mengagumkan dapat masuk ke dalam kancah linguistik, tidak seperti karya filosof lain yang terbatas pada bidang filsafat meskipun sama-sama membahas bahasa. *Ketiga*, meskipun selang beberapa tahun kemudian ia memikirkan ulang dan memodifikasi gagasannya, karyanya merepresentasikan garis pikiran yang konsisten. *Keempat*, karya Austin (1962) begitu dihargai karena sangat berkaitan dengan masalah-masalah penting utama dalam bidang pragmatik saat ini. Karena itu, pantaslah ia disebut “Bapak Pragmatik” dan Mey (2001) menyebut dia sebagai “*the father of speech act theory*,”

Gagasan Austin (1962) tentang tindak tutur muncul sejak pertentangannya dengan kelompok Russel, Carnap, Davidson, dan Tarski, yang memandang bahasa sehari-hari tidak sempurna sehingga menurunkan nilai bahasa sebagai sarana komunikasi, penuh ketaksaan, ketidaktepatan, dan kontradiksi. Mereka bertujuan membersihkan bahasa (*refine language*) dari sifat-sifat tersebut, membenahi bahasa yang dirasakan tidak sempurna dan

tidak logis, serta menciptakan bahasa yang ideal. Sebaliknya, Austin (1962) dan kelompoknya berpendapat bahwa orang melakukan komunikasi sehari-hari secara efektif dan secara relatif tidak problematik dengan bahasa sehari-hari yang penuh ketaksamaan dan ketidaksempurnaan itu. Alih-alih berusaha keras “membersihkan” bahasa sehari-hari dari ketidaksempurnaannya, Austin (1962) justru menyatakan bahwa sudah seharusnya para filosof mencoba memahami terjadinya ketidak sempurnaan penggunaan bahasa dan cara orang menggunakan bahasa sehari-hari dalam ketidaksempurnaannya itu.

Berdasar hal itu, Austin (1962) tertarik pada pemakaian bahasa sehari-hari dengan 2 (dua) alasan. *Pertama*, salah satu tugas utama filsafat ialah membuat perbedaan di antara fenomena. Salah satu caranya ialah mengkaji bagaimana orang melakukan tindakan dengan bahasa sehari-hari. *Kedua*, orang tidak hanya menggunakan bahasa untuk mengatakan sesuatu (membuat pernyataan semata), tetapi juga untuk melakukan sesuatu (melakukan tindakan). Hal itu membawanya pada teori tindak ilokusi, teori yang mengkaji apa yang kita lakukan ketika kita berbicara, bagaimana kita melakukannya, dan bagaimana tindakan kita dapat berhasil atau gagal.

## **1.2. Komposisi Tindak Tutur Menurut Austin**

Teori tindak tutur yang dikemukakan Austin (1962) itu muncul sebagai reaksi atas konsep, yang disebut *descriptive fallacy*, yaitu suatu pandangan bahwa sebuah kalimat deklaratif selalu digunakan untuk memerikan perikeadaan yang harus benar atau takbenar. Menurut Austin (1962), ada banyak kalimat deklaratif yang tidak memerikan, menyampaikan, atau menyatatagaskan apa pun dan tidak masuk akal bila dipertanyakan apakah kalimat tersebut benar atau takbenar. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa tuturan sehari-hari tidak hanya mengungkapkan kalimat yang kebenaran proposisinya dapat diuji. Tuturan tidak hanya menyatategaskan perikeadaan, tetapi juga mengungkapkan maksud, sikap, serta perasaan penutur. Contohnya ialah

(1) *Sangat cantik.*

Tuturan (1) dapat mencerminkan sikap penilaian penutur kepada Lia pada konteks tertentu. Di samping itu, tuturan juga dapat mengungkapkan suatu tindak yang dimaksud oleh seorang penutur. Contohnya ialah

(2) *Saya ingin Anda mengetik surat ini.*

Berdasar contoh (2), dapat dipahami bahwa penutur tidak sekadar mengungkapkan tuturan, tetapi juga melakukan tindak meminta. Sehingga, dalam konsep tindak tutur, bahasa dapat digunakan untuk melakukan sesuatu.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Austin (1962) dalam teori tindak tutur membedakan tuturan performatif dari tuturan konstatif. *Tuturan performatif* ialah tuturan yang memerikan dan secara serentak mengungkapkan suatu tindak. Sehingga ini yang membedakan antara performatif dan imajinatif, yang juga merupakan perbedaan antara kolektif dan pribadi. Realitas tindak tutur merupakan konvensi sosial (Petrus, 2016)

Sementara itu, *tuturan konstatif* ialah tuturan yang menyatakan sesuatu yang kebenarannya dapat diuji, yaitu benar atau takbenar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pengetahuan kita tentang dunia. Sehingga, tuturan konstatif ialah tuturan yang digunakan untuk membuat penyatategasan. Contohnya ialah

(3) *Indonesia berpenduduk 220 juta orang.*

(4) *Saya bersumpah akan terus memburu para teroris sampai kapan pun.*

Tuturan (3) merupakan tuturan konstatif. Kebenaran tuturan tersebut dapat dilihat pada data kependudukan negara Indonesia. Sementara itu, tuturan (4) merupakan tuturan performatif. Tuturan tersebut tidak dapat dinilai benar atau takbenar, tetapi dapat dinilai berdasar kesahihannya. Sahih tidaknya tuturan performatif bergantung pada terpenuhinya persyaratan kesahihan.

Austin (1962) mengemukakan ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar tuturan performatif dianggap sah, yang disebutnya *felicity condition*. Keempat syarat itu ialah

1. Mesti ada prosedur konvensional yang mempunyai efek konvensional dan prosedur itu mestilah mencakup penuturan

katakata tertentu oleh orang-orang tertentu pada peristiwa tertentu;

2. Orang-orang dan peristiwa tertentu di dalam kasus tertentu mestilah yang berkelayakan atau yang patut untuk melaksanakan prosedur tertentu yang dilaksanakan;
3. Prosedur itu mestilah dilaksanakan oleh para peserta secara benar;
4. Prosedur itu harus dilaksanakan oleh para peserta secara lengkap.

Lebih lanjut, Austin (1962) membedakan tuturan performatif eksplisit dan tuturan performatif implisit (primer). Tuturan performatif eksplisit ialah tuturan yang mengungkapkan suatu tindak secara eksplisit. Contohnya ialah:

(5) *Saya meminta Anda untuk membersihkan meja ini.*

Akan tetapi, seseorang dapat saja membuat penyata tegasan tanpa harus mengungkapkan melalui tuturan yang secara eksplisit performatif dengan menempatkan verba performatif. Contohnya ialah

(6) *Bersihkan meja ini.*

Tuturan (6) merupakan tuturan performatif yang bersifat implisit karena meskipun kata meminta tidak diucapkan, penutur tetap berbuat apa yang disebut tindak meminta.

Tuturan performatif eksplisit dapat dikenali dengan jelas melalui subjek persona pertama tunggal, menggunakan kala kini dalam bahasa yang menggunakan sistem kala, serta verba performatif yang dimilikinya. Sementara itu, tuturan performatif implisit, seperti tuturan (6), tidak tertakluk pada ciri tersebut.

Berkaitan dengan hipotesis performatif, Austin (1962) menunjukkan bahwa orang tidak menggunakan bahasa hanya untuk membuat pernyataan tentang dunia. Orang menggunakan bahasa juga untuk melakukan tindakan, yang memengaruhi atau mengubah dunia. Pengaruh atas tindakan dengan menggunakan bahasa itu mungkin besar (negara A menyatakan perang kepada negara B) dan mungkin kecil (A menawarkan kopi kepada B).

Teori Austin (1962) mengubah drastis cara pandang orang terhadap bahasa dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap

perkembangan pragmatik sebagai wilayah studi linguistik. Pendapatnya tentang hipotesis performatif tetap sangat jelas sebagai contoh istimewa dari "how to do thing with words". Namun, konsep bahwa hanya verba performatif yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan tidak dapat dipertahankan. Hipotesis performatif Austin gagal dengan sejumlah alasan berikut.

- *Pertama*, tidak adanya cara formal (gramatikal) tentang perbedaan verba performatif dengan jenis verba lain.
- *Kedua*, kehadiran. verba performatif tidak menjamin bahwa tindakan yang dikemukakan melalui verba itu dilakukan seperti apa adanya, bahkan dapat melenceng dari itu jika ada konteksnya. Contohnya verba berjanji dapat digunakan untuk melakukan tindak mengancam.
- *Ketiga*, ada banyak cara "melakukan sesuatu dengan kata-kata" yang tidak melibatkan pemakaian verba performatif, bahkan jika menggunakan verba performatif justru menjadi lucu. Contohnya ialah tindak sesumbar diri.
- *Keempat*, ketidakpastian verba apa saja yang tergolong verba performatif dan verba apa saja yang berfungsi sebagai verba performatif pada tiap tindak tutur.

Tindak tutur menjadi fokus bahasan pragmatik saat ini. Menurut Searle (1969), hal itu cukup beralasan karena semua komunikasi bahasa melibatkan tindak tutur. Unit komunikasi bahasa bukan simbol, kata, atau kalimat, atau bahkan token dari simbol, kata atau kalimat, tetapi lebih pada produksi simbol atau kata atau kalimat dalam performansi tindak tutur. Produksi token kalimat dalam keadaan tertentu merupakan tindak tutur dan tindak tutur adalah unit dasar dari komunikasi bahasa.

Pada perkembangan selanjutnya, Lyons (1977) menempatkan, tindak tutur sebagai bagian dari makna tuturan yang bergantung pada konteks. Konteks dapat meliputi antara lain tempat, waktu, peristiwa, keadaan, proses, serta maksud penutur. Contohnya ialah

(7) *Ada pisau di atas meja.*

Dilihat dari strukturnya, ungkapan (7) merupakan kalimat deklaratif yang maknanya ialah penyatategasan perikeadaan. Di situ terdapat keterkaitan tindak penyatategasan dengan makna kalimat. Akan tetapi, tindak tutur tidak ditempatkan dalam paham makna kalimat yang bebas konteks. Ada berbagai tindak tutur yang dapat dimaknai dari kalimat (7) apabila kalimat tersebut diMurkan dalam berbagai konteks yang berbeda. Tuturan (7) dapat dimaknai sebagai tindak peringatan seorang istri kepada suami untuk tidak membiarkan anak lelakinya yang masih berusia tiga tahun menghampiri meja dan mengambil pisau. Pada situasi lain, tuturan tersebut menandai tindak perintah seorang kakak kepada adiknya untuk mengarnbikan pisau untuk mengiris semangka.

Tindak tutur tidak selalu dipengaruhi oleh makna kalimat yang terikat pada struktur gramatikal. Contohnya

(8) *\*Dasar banci, lu.*

Makna kalimat (8) rantak karena struktur gramatikalnya tidak apik. Akan tetapi, jika ungkapan tersebut dituturkan oleh seorang yang mungkin dekat dan sekelompok etnis, makna tuturannya berterima. Tuturan tersebut dapat mengungkapkan tindak penghinaan dari seorang penutur kepada petutur yang kehilangan nyali dalam menghadapi sesuatu. Ada juga tuturan yang tafsiran maknanya hanya bergantung pada konteks luar bahasa. Contohnya ialah

(9) *Oh.*

Tuturan (9) berbeda dari formula di atas. Tuturan itu memiliki makna yang tidak selalu terkait dengan fungsi sosial. Tuturan tersebut dapat diungkapkan oleh seseorang yang melakukan tindak kesilapan pengetikan kata.

Terdapat keterkaitan antara makna kalimat, makna tuturan, dan tindak tutur. Hal itu bermula dari gejala kalimat sebagai abstraksi gramatikal ideal yang diwujudkan secara fisik melalui tuturan. Dalam tuturan dapat terlibat suatu tindak tutur. Kalimat per definisi harus gramatikal. Oleh sebab itu, makna kalimat bergantung pada struktur gramatikal. Tuturan sebagai peristiwa fisik tidak harus gramatikal. Karena itu, makna tuturan tidak selalu bergantung pada struktur gramatikal. Makna tuturan

lebih bergantung pada konteks. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara makna tuturan dan makna kalimat.

Keterkaitan makna kalimat dan tindak tutur terletak pada kenyataan adanya penggunaan kalimat secara khas. Berdasar struktur tertentu, sebuah kalimat dapat digolongkan sebagai kalimat deklaratif yang maknanya meliputi penyatategasan. Tindak penyatategasan itu dapat dianggap sebagai tindak performatif. Akan tetapi, tindak tutur yang dapat diungkapkan oleh kalimat deklaratif bukan hanya penyatategasan melainkan juga peringatan, perintah, atau tuduhan jika kalimat deklaratif itu dituturkan dalam berbagai konteks yang berbeda. Dengan begitu, lingkup tindak tutur dapat melampaui makna kalimat, namun berada dalam makna tuturan, dan juga daya tuturan.

Dalam karyanya yang terbaru, Lyons (1995) lebih menempatkan tindak tutur sebagai konsep yang berkaitan dengan pemahamannya tentang tuturan. Menurut Lyons (1995), tindak tutur mengandung pengertian proses dan hasil. Sebagai hasil, tuturan merupakan inskripsi yang dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Tindak tutur ditempatkan dalam konsep proses yang hasilnya meliputi bentuk tuturan lisan maupun tulisan. Dengan demikian, tindak tutur melibatkan tindak dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Menurut Thomas (1995), sekarang istilah tindak tutur digunakan untuk makna yang sama dengan “tindak ilokusi”, yang dalam kenyataannya akan ditemukan juga istilah *tindak tutur*, tindak ilokusi, daya ilokusi, daya pragmatik atau hanya daya saja. Semua itu dipakai untuk makna yang sama meskipun tindak perlokusi yang menghasilkan pengaruh tertentu dengan menyatakan sesuatu.

Berdasar hal itu, dapat dinyatakan bahwa ilokusi ialah tindak tutur yang maksudnya diungkapkan oleh penutur. Perlokusi ialah tindak tutur yang menimbulkan efek terhadap, atau reaksi dari, petutur. Contohnya ialah:

(10) *Sudah waktunya aku pulang; selamat malam.*

Tuturan (10) mengungkapkan ilokusi, yakni berpisah. Tindak tersebut dapat menimbulkan reaksi yang mungkin terjadi seperti rasa jengkel yang dapat diungkapkan melalui tuturan



(11) *Terserah kamu!*

atau tuturan simpati, seperti

(12) *Terima kasih atas kunjungan Anda.*

Reaksi pada (11) atau (12) tersebut dapat dianggap sebagai tindak perlokusi.

Austin (1962) memasukkan "*happiness conditions*" (yang dapat diterjemahkan secara bebas sebagai 'syarat keberhasilan tindak ilokusi'). Tindak ilokusi dianggap berhasil jika dalam menuturkannya penutur mencapai pengaruh, yaitu petutur memahami isi proposisional tuturan dan daya tuturan yang terdapat dalam tuturan itu. Wibowo (2022) menambahkan tindak tutur dikatakan benar (dibaca: bermakna) justru jika si subjek penutur benar-benar berkelindan dengan faktanya.

Dengan begitu, ketika penutur menuturkan sesuatu ia juga menyampaikan pengaruh tertentu kepada petutur, yang diacu Austin (1962) sebagai tindak perlokusi. Sebagai contoh tindak perlokusi, dia memasukkan tidak hanya hal seperti mengkhawatirkan, membujuk, menyesatkan, tetapi juga pengaruh seperti terkejut, kaget, rasa bosan, dan sebagainya. Dalam membedakan tindak perlokusi dan ilokusi, dia menyatakan bahwa tindak ilokusi dapat dicapai semata-mata dengan cara konvensional, sedangkan tindak perlokusi dapat dicapai dengan cara tidak konvensional. Namun, dia gagal memberikan kriteria yang tak terbantahkan untuk membedakan berbagai jenis tindak. Simpulannya, dia sama saja dengan tidak lebih dari sekadar menunjukkan bahwa ciri dari perbedaan antara tindak ilokusi dan perlokusi terletak pada harapan penutur untuk mencapai berbagai jenis pengaruh yang berbeda.

Meskipun dia menyatakan bahwa tindak perlokusi dianggap "berhasil" hanya jika pengaruh yang diinginkan penutur sampai pada petutur, dia tetap tidak beranjak lebih lanjut ke hakikat tindak perlokusi. Dia tetap membalasi diri untuk menunjukkan bahwa hakikat tindak perlokusi dapat berubah-ubah atau bervariasi dari tindak perlokusi yang satu ke tindak perlokusi yang lain. Pusat perhatian utamanya tetap pada tindak ilokusi dan dia meninggalkan konsep tindak perlokusi.

### 1.3. Komposisi Tindak Tutur menurut Searle

Dengan menggunakan klasifikasi yang agak berbeda dengan yang dikemukakan Austin (1962), Searle (1969) membedakan 3 (tiga) tindak yang berbeda dalam bertindak tutur, yaitu

1. Tindak ujar (*an utterance act*): mengeluarkan bunyi tutur, kata-kata, dan kalimat tertentu). Djajasudarma (2012) mendefinisikan teori tindak ujar adalah bagian dari pragmatik. Tindak ujar adalah unsur pragmatik yang melibatkan pembicara-pendengar, penulis pembaca, serta yang dibicarakan.
2. Tindak proposisional (*a propositional act*): mengacu kepada sesuatu atau seseorang dan menyatakan ciri-ciri dari sesuatu atau orang tersebut);
3. Tindak ilokusi (*an illocutionary act*): menampilkan tuturan dengan daya komunikatif seperti berjanji, mempertanyakan fakta, dan sebagainya).

Searle (1969) menekankan bahwa ketiga tindak itu tidak terpisah secara spasiotemporal dan tidak bebas satu sama lain. Artinya, setiap sub-tindak saling bergantung satu sama lain sebagai sebuah tindak yang lengkap, yang dilakukan secara simultan. Dalam melakukan tindak ilokusi, secara khusus seseorang melakukan tindak proposisional dan tindak mengujarkan.

Pada bagian ini, Searle (1969) membedakan pesan dan tujuan yang dimaksudkan. Perbedaan itu merefleksikan perbedaan Austin (1962) antara tindak ilokusi dan pengaruh perlokusi. Tindak ilokusi ialah pesan yang dikonvensionalisasi yang dimaksudkan untuk dipahami petutur jika dia menganggap ujaran penutur sah.

Pencapaian pemahaman merupakan dasar teori Searle (1969). Menurut dia, penutur melakukan tindak ilokusi dengan mengungkapkan maksudnya untuk menjanjikan sesuatu, meminta seseorang melakukan sesuatu, menegaskan sesuatu, dan sebagainya. Dengan cara tersebut, petutur dapat mengenali maksud penutur. Pada sisi lain, tindak perlokusi merupakan tindak

yang tidak dikonvensionalisasi. Apakah penutur terhina, terbujuk, percaya, dan sebagainya tidak dapat dikenali hanya dari tindakan percaya atas pemahaman petutur. “Keberhasilan” dalam tindak perlokusi tidak dapat diprediksi dengan cara yang sama dalam tindak ilokusi.

Berbeda dengan Searle (1969), Bach dan Harnish (1979) membedakan aspek tindak tutur seperti yang dikemukakan Austin (1962). Menurut kedua pakar itu, yang dimaksud tindak tutur ialah penutur menuturkan ungkapan dalam bahasa tertentu kepada petutur dalam konteks tuturan. Mereka menyebut adanya tiga tindakan, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Seperti halnya Searle (1969), mereka merasa perlu mengingatkan bahwa keseluruhan tindak tersebut saling berkait erat. Dalam menuturkan ungkapan, penutur mengatakan sesuatu kepada patutur. Dalam mengatakan itu penutur melakukan sesuai dan dengan melakukan sesuatu penutur mempengaruhi petutur. Keberhasilan tindak perlokusi bergantung pada pengidentifikasian petutur antara satu tindak dengan tindak lain dalam proses bertindak tutur.

Daya ilokusi tuturan pada dasarnya sesuatu yang dimaksudkan untuk dipahami. Keberhasilan dalam berkomunikasi terjadi manakala petutur dapat menangkap maksud penutur tersebut. Mereka memandang komunikasi sebagai proses inferensial. Penutur dengan apa yang dikatakannya memberi dasar bagi petutur untuk menginferensi maksud penutur.

Penjelasan mengenai tindak perlokusi mendapat banyak kritik. Edmonson mempermasalahkan pemakaian istilah *perlokusi*. Menurut dia, pemikiran tentang konsep perlokusi kurang jelas karena kekaburan antara tujuan dan pengaruh. Lagi pula, dengan penggunaan konsep perlokusi dalam tindak tutur, tampak ketidakjelasan pembedaan perspektif penutur dan petutur.

Searle (1969) mengabaikan konsep tindak perlokusi. Namun, akhirakhir ini banyak pakar menaruh perhatian pada aspek itu. Eemeren & Grootendorst (dalam Trosborg, 2011) mengembangkan konsep perlokusi. Pada dasarnya, mereka setuju bahwa pemakai bahasa tidak melakukan tindak tutur dengan maksud tunggal, yaitu hanya membuat petutur memahami tindak

tutur yang dilakukannya. Di samping itu, penutur juga berusaha memperoleh respons tertentu dari petutur. Berdasar hal itu, dia menarik perbedaan penting antara aspek komunikatif dan interaksional bahasa. Ilokusi dan perlokusi dianggap sebagai 2 (dua) aspek berbeda dari tindak tutur yang lengkap.

Tindak ilokusi berkaitan dengan aspek komunikatif yang diungkapkan dalam upaya mencapai pemahaman. Sementara itu, tindak perlokusi berkaitan dengan aspek interaksional yang diungkapkan dalam upaya memperoleh sambutan. Misalnya, untuk tindak tutur memohon, tindak komunikatifnya bertujuan mencapai pemahaman pada petutur bahwa penutur memohon kepada petutur tentang sesuatu hal, sedangkan aspek interaktifnya bertujuan mempengaruhi petutur untuk melakukan tindak yang diinginkan penutur. Memohon dan membujuk memiliki "syarat keberhasilan" berbeda. Sebuah permohonan dikatakan berhasil sebagai sebuah tindak ilokusi jika petutur memahami keinginan penutur dan meyakinkannya dan dianggap berhasil sebagai tindak perlokusi jika petutur menerima permohonan yang dikemukakan penutur.

Untuk alasan itu, Eemeren-Grootendorst memperkenalkan perbedaan konseptual dan terminologi antara 1) pengaruh perlokusi inheren, yang merupakan sambutan tindak tutur oleh petutur secara eksplisit, dan 2) konsekuensi perlokusi konsekutif, yang terdiri atas semua konsekuensi lain dari tindak tutur. Pengaruh perlokusi inheren dapat diistilahkan *pengaruh minimal*, sedangkan konsekuensi perlokusi konsekutif dianggap pengaruh optimal. Sebetulnya, terminologi itu menunjukkan keinginan penutur untuk menyampaikan (secara minimal) pengaruh perlokusi dari sambutan, tetapi sebagai kaidah, hal itu hanya akan dianggap hasil optimal jika penutur berhasil menyampaikan berbagai konsekuensi lain yang merupakan hasil dari sambutan petutur.

Namun, konsekuensi perlokusi komunikatif hanya mengacu kepada berbagai konsekuensi yang dimaksudkan oleh penutur. Perbedaan hanya mencakup pengaruh dan konsekuensi yang secara sadar ingin dicapai penutur melalui tuturannya.

Karena itu, menjadi penting membedakan lebih lanjut antara konsekuensi yang terjadi secara tidak sengaja (*accidentally*), yaitu yang tidak dimaksudkan oleh penutur dan pengaruh yang dimaksudkan oleh penutur (*intended by speaker*). Konsekuensi yang sama sekali tidak dimaksudkan oleh penutur tidak dapat dianggap sebagai tindak perlokusi dan juga tidak dapat dianggap sebagai ihwal bertindak sehingga tidak dapat dikatakan sebagai performansi tindak perlokusi. Contohnya ialah penutur dianggap menghina seseorang ketika membuat penawaran atau permohonan. Padahal, penutur sama sekali tidak bermaksud seperti itu.

Sebagai kriteria untuk membedakan tindak perlokusi dan tindak yang menimbulkan konsekuensi yang tidak dimaksudkan penutur dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika penutur dapat memberikan alasan yang masuk akal untuk menimbulkan pengaruh atau konsekuensi yang dibicarakan, tindak itu dapat dianggap sebagai tindak perlokusi. Karena itu, tindak itu memerlukan rasionalisme yang memungkinkan tindak perlokusi dilakukan.

Jika kita menerima pengaruh perlokusi sebagai bagian dari maksud penutur ketika dia melakukan tindak tutur, hal itu berarti bahwa penutur tidak hanya ingin tindakannya dipahami, tetapi dia juga ingin mencapai pengaruh yang dimaksudkan penutur. Misalnya, penutur benar-benar meninggalkan penutur atau meninggalkan ruangan ketika penutur meminta penutur pergi. Namun, perlu diingat bahwa perlokusi tidak ditentukan oleh penutur, tetapi perlokusi.

#### **1.4. Klasifikasi Tindak Ilokusi**

Austin (1962) terdorong untuk membuat klasifikasi tindak ilokusi berdasar asumsi bahwa performatif merupakan batu ujian yang eksplisit untuk semua ilokusi. Austin (1962) berasumsi bahwa setiap verba dalam bahasa Inggris pasti berpadanan dengan salah satu kategori tindak tutur. Atas dasar itu, Austin (1962) membedakan tindak ilokusi ke dalam 5 (lima) kelompok berikut.

##### **1. Verdiktif (*verdictives*)**

Tindakan memberikan penilaian, tetapi penilaian itu tidak final. Jenis verdiktif ada yang resmi, ada pula yang tidak resmi dan tidak resmi, dan selalu berdasarkan bukti, alasan, atau nilai sebuah kenyataan. Misalnya, juri menilai terdakwa, bersalah atau tidak, tetapi keputusan ada di tangan hakim. Contohnya ialah mendiagnosis, menilai, memeringkat, dan sebagainya.

2. Eksertif (*exertives*)

Tindakan memberikan keputusan yang menentang atau mendukung suatu tindakan atau kegiatan. Tindakan eksertif ini disertai kekuasaan, hak, atau pengaruh. Contohnya ialah menamai, memilih, menasihati, dan sebagainya.

3. Komisif (*commisives*)

Tindakan menyatakan, niat yang mengikat si penutur pada suatu tindakan di masa mendatang. Contohnya ialah berjanji, melakukan kontrak, dan sebagainya.

4. Behabitif (*behabitives*)

Reaksi terhadap kebiasaan, tingkah laku, keberuntungan, tindakan seseorang pada masa lalu dan akan datang. Tindak ini berkaitan dengan sikap dan perilaku sosial. Contohnya ialah meminta maaf, berterima kasih, mengucapkan selamat datang, dan sebagainya.

5. Ekspositif (*expositives*)

Tindak yang digunakan dalam berbagai tindak pernaparan yang melibatkan kegiatan menyampaikan pandangan, menjelaskan sesuatu, atau berargumentasi. Contoh tindak ini ialah menegaskan, melaporkan, menjawab, dan sebagainya.

Menurut Austin (1962), 2 (dua) kelompok terakhir, yaitu behabitif dan ekspositif menimbulkan banyak kesulitan sehingga pembagian atas hal itu tidak jelas dan bisa saja terjadi lintas klasifikasi. Bahkan, dia menyatakan bahwa klasifikasi yang baru secara keseluruhan sangat mungkin dilakukan. Behabitif dan ekspositif menyulitkan karena tindak ilokusi itu terlalu luas cakupannya. Kedua kelompok itu tampak bisa masuk ke dalam kelompok lain. Oleh Allan (1994), Austin (1962) dianggap menggunakan klasifikasi leksikal yang

disebut verba ilokusi untuk mengklasifikasi tindak tutur sehingga disebut sebagai ancangan klasifikasi leksikal.

Sehubungan dengan pengklasifikasian tindak ilokusi itu, Searle (1976) mengembangkan lebih lanjut teori tindak tutur secara sistematis. Searle (1976) tidak puas dengan klasifikasi Austin (1962) dengan menyatakan bahwa tidak ada prinsip yang jelas yang digunakan Austin (1962) untuk mengklasifikasi tindak ilokusi ke dalam lima kelas seperti telah disebutkan di atas. Searle (1976) juga mengkritik Austin (1962) berkaitan dengan perbedaan antara tindak tutur dan verba tindak tutur. Klasifikasi Austin (1962) dianggap tumpang tindih, mempunyai unsur-unsur yang tidak sepadan dalam kategorinya, dan ke dalam kategori-kategori itu dimasukkan unsur-unsur yang tidak memenuhi batasan kategorinya.

Karena itu, Searle (1976) mengklasifikasi tindak ilokusi berdasar asumsi yang berbeda dari asumsi Austin (1962). Searle (1976) membuat klasifikasi fungsi pemakaian bahasa yang konsisten dengan membagi tindak ilokusi ke dalam jumlah kategori utama yang terbatas berdasar kriteria utama, yaitu maksud komunikatif penutur yang dimanifestasi dalam tujuan ilokusi dari tiap tindak.

Menurut Searle (1976), pengklasifikasian tindak tutur harus berdasar pada 12 (dua belas) dimensi, yaitu

1. Titik ilokusi, misalnya titik ilokusi tindak tutur menyuruh ialah “agar orang melakukan sesuatu yang disuruhkan”;
2. Arah kecocokan, yaitu hubungan antara kata atau bahasa dan dunia atau realitas; misalnya permohonan memiliki kecocokan dunia ke kata karena dunia harus berubah untuk memenuhi permohonan penutur;
3. Keadaan psikologis yang terungkap, yang memungkinkan orang dapat memandang sejumlah tindak tutur yang tampaknya berbeda sebagai tindak tutur yang sama; misalnya permohonan mengungkapkan keinginan penutur bahwa petutur harus melakukan sesuatu;
4. Daya titik ilokusi yang diungkapkan, misalnya ujaran “kamu harus melakukan lebih kuat daya ilokusinya dari ujaran “saya

harap kamu melakukan....”.

5. Relevansi status sosial penutur-petutur, misalnya tindak memerintah merupakan hal sensitif berkaitan dengan status partisipan, sedangkan yang lain, seperti tindak menyatakan tidak begitu sensitif;
6. Kepentingan/orientasi, misalnya mengucapkan selamat adalah tindak yang berorientasi pada petutur;
7. Fungsi berkaitan dengan wacana, misalnya pertanyaan dan jawaban merupakan bagian dari pasangan berdekatan, sedangkan tindak perintah bukan;
8. Isi proposisional, misalnya penutur melakukan tindak tertentu untuk tindak berjanji;
9. Kaitan antara tindak tutur dengan verba tindak tutur, misalnya berjanji hanya dapat dilakukan sebagai tindak tutur, pengklasifikasian dapat dilakukan dengan cara lain;
10. Kaitan antara lembaga sosial dan tindak tutur, misalnya membaptis memerlukan syarat lembaga yang memenuhi syarat, tetapi tindak menyatakan (stating) tidak demikian;
11. Kaitan antara tindak tutur dan performatif karena tidak semua verba ilokusi adalah verba performatif, misalnya sesumbar dan mengancam bukan verba performatif;
12. Gaya melakukan tindak tutur, misalnya perbedaan antara mengumumkan dan menceritakan.

Menurut Searle (1976), kriteria 1-3 merupakan kriteria utama. Dari 12 (dua belas) dimensi itu, Searle (1976) hanya menggunakan empat dimensi sebagai kriteria pengelompokan tindak ilokusi, yaitu dimensi titik ilokusi (“daya” tindak tutur dalam terminologi Austin (1962)), arah kecocokan, keadaan psikologis yang diungkapkan penutur, yakni “kepercayaan” dapat diungkapkan sebagai pernyataan, penegasan, atau tindak lain, dan isi proposisional (tentang apa tindak tutur itu).

Dia mengemukakan bahwa fungsi komunikatif bahasa dapat direduksi ke dalam 5 (lima) kelompok utama, yaitu tindak representatif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklarasi. Hal itu diuraikan secara singkat sebagai berikut.

1. Tindak tutur representatif mengandung nilai kebenaran atau



ketidakbenaran. Tindak tutur ini harus memiliki arah kecocokan dari kata ke dunia. Pada ilokusi ini penutur terikat pada kebenaran proposisi yang diungkapkan, misalnya menyatakan, mengusulkan, membual, mengeluh, mengemukakan pendapat, dan melaporkan.

2. Tindak tutur direktif mewujudkan usaha pada pihak penutur agar petutur melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tersebut. Berbeda dengan tindak representatif, tindak tutur ini memiliki arah kecocokan dari dunia ke kata; dunia disesuaikan dengan kata yang terujar. Dalam tindak direktif ini, muncul kewajiban petutur yang harus dilakukan. Contoh tindak direktif ialah memerintah, memohon, menuntut, dan sebagainya.
3. Tindak tutur komisif menjalankan pengubahan di dunia dengan cara menciptakan kewajiban; penutur berjanji kepada diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Tindak tutur ini memiliki arah kecocokan dari dunia ke kata. Perbedaannya dengan tindak tutur direktif ialah bahwa dalam tindak tutur komisif kewajiban terletak pada diri penutur, bukan pada diri petutur. Jadi, pada ilokusi ini penutur (sedikit banyak) terikat pada suatu tindakan pada masa mendatang, misalnya menjanjikan, menawarkan, berkaul, dan sebagainya.
4. Tindak tutur ekspresif mengungkapkan keadaan psikologis penutur dan tidak memiliki arah kecocokan antara kata dan dunia. Contoh tindak ini ialah berterima kasih, meminta maaf, mengucapkan selamat, memuji, dan sebagainya.
5. Tindak tutur deklarasi merupakan pernyataan yang mengubah perikeadaan di dunia, misalnya dari sekadar sepasang manusia menjadi suami-istri. Tindak ini memiliki arah kecocokan dari kata ke dunia dan dari dunia ke kata. Berhasilnya pelaksanaan ilokusi ini akan mengakibatkan adanya kesesuaian antara isi proposisi dengan realitas, misalnya membaptis, memecat, memberi nama, menjatuhkan hukuman, mengangkat pegawai, dan sebagainya. Tindak deklarasi merupakan kategori tindak tutur yang sangat khusus, karena melibatkan seseorang yang dalam sebuah lembaga diberi wewenang untuk melakukannya.

Klasifikasi tindak ilokusi juga dibahas oleh Levinson (1983), Yule dan Widdowson (1996), dan Verschueren (1999). Searle (1976) berpendapat bahwa perbedaan yang ada di antara verba ilokusi merupakan pedoman yang baik, tetapi sama sekali bukan pedoman yang pasti untuk membedakan tindak-tindak ilokusi. Namun, cukup jelas bahwa dasar pemikiran seluruh makalah Searle (1976) bertolak dari verba ilokusi juga. Bahkan, menurut Mey (2001), meskipun klasifikasi Searle (1976), terutama berdasar ciri 'makna', beberapa dari klasifikasinya lebih dekat pada konsep yang oleh sintaksis tradisional diacu sebagai 'mood' seperti indikatif (representatif) atau 'imperatif (direktif).

Bach dan Harnish (1979) membahas taksonomi tindak ilokusi komunikatif juga. Mereka sependapat dengan Searle (1976) bahwa skema klasifikasi harus dilandasi prinsip. Kategori-kategori skema jangan sampai bertumpang tindih dan unsur dalam setiap kategori harus memenuhi kriteria untuk menjadi bagian kategori itu. Di samping itu, agar bisa menarik secara teoretis, dasar skema klasifikasi harus dikaitkan dengan pembahasan sistematis tentang tindak ilokusi. Dalam bahasannya, mereka tidak hanya menamai masing-masing tindak dalam taksonominya, tetapi juga mengurai spesifikasi apa yang membedakan tindak-tindak tersebut.

Bach dan Harnish (1979) membagi tindak ilokusi ke dalam enam kategori. Dua di antara 6 (enam) kategori itu, yaitu efektif (*effective*) dan verdiktif (*verdictive*), bersifat konvensional, tidak bersifat komunikatif sehingga tidak dibahas dalam buku mereka. Keempat jenis tindak ilokusi yang lain adalah konstatif, direktif, komisif, dan pengakuan (*acknowledgments*). Konstatif merupakan ungkapan kepercayaan yang disertai ungkapan maksud sehingga petutur membentuk kepercayaan yang serupa. Direktif mengungkapkan sikap penutur terhadap tindakan prospektif oleh petutur dan kehendaknya terhadap tindakan petutur. Komisif mengungkapkan kehendak dan kepercayaan penutur sehingga ujarannya mengharuskannya untuk melakukan sesuatu (mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu). Pernyataan (*acknowledgments*) mengungkapkan perasaan mengenai petutur atau dalam kasus-kasus ujaran berfungsi secara formal, kehendak penutur bahwa

ujarannya memenuhi kriteria harapan sosial untuk mengungkapkan perasaan dan kepercayaan tertentu. Bach dan Harnish (1979) juga menguraikan sub-kategori dari berbagai kategori tindak tutur tersebut secara rinci dengan berbagai karakteristiknya.

Berbeda dengan Austin (1962) dan Searle (1976), Leech (1980) mengklasifikasi fungsi ilokusi menjadi 4 (empat) kelompok berdasar tujuan sosial, yaitu membangun dan mempertahankan sikap hormat. Keempat fungsi ilokusi tersebut ialah

1. Bersaing (*competitive*): tujuan ilokusi bersaing dengan tujuan sosial, misalnya-memerintah, meminta, dan sebagainya;
2. Ramah tamah (*convivial*): tujuan ilokusi seiring dengan tujuan sosial, misalnya menawarkan, mengundang, dan sebagainya;
3. Bekerja sama (*collaborative*): tujuan ilokusi berlainan dengan tujuan sosial, misalnya melaporkan, mengumumkan, dan sebagainya;
4. Bertentangan (*conflictive*): tujuan ilokusi bertentangan dengan tujuan sosial, misalnya mengancam, menuduh, dan sebagainya.

Di antara 4 (empat) teori tindak ilokusi itu, teori tindak tutur yang diformulasi Searle (1976) mempunyai pengaruh yang sangat besar pada aspek fungsional teori pragmatik. Salah satu pengaruh teori pragmatik yang relevan terhadap pembelajaran bahasa adalah pentingnya aspek kesantunan dalam pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing (Kartika, 2019). Namun, Searle (1976) juga mendapat banyak kritik sehubungan dengan teorinya, yang dibahas pada sub-bab berikutnya.

Pertanyaan yang menarik ialah: berapa banyak tindak tutur yang ada dan bagaimana diungkapkan dalam bahasa? Klasifikasi tindak tutur Searle (1976) dapat dianggap sebagai “bongkahan”, yang mengelompokkan tindak tutur dalam kategori besar. Kita memiliki “pemecah” tindak tutur dalam jumlah kelompok-kelompok besar; jumlah aktual mungkin antara lima ratus dan enam ratus. Realisasi tindak tutur sendiri dapat terentang dari 1000 sampai 9.999 (seperti dinyatakan Austin (1962)), bahkan dapat di atas sepuluh ribu. Semua itu bergantung pada kesabaran dan ketajaman dalam membuat pembedaan penting.



# BAB 2

## TINDAK TUTUR MENURUT SEARLE

---

### 2.1. Kritik Sistematis

Meskipun teori Searle (1969) tentang tindak tutur berpengaruh luas, teorinya tidak terlepas dari berbagai kritik. Berkaitan dengan pengklasifikasian tindak ilokusi, Leech (1980) berpendapat bahwa taksonomi Searle (1969) harus diakui lebih berhasil dan lebih sistematis dari pada taksonomi Austin (1962). Namun, dapat diamati bahwa Searle (1969) pun lagi-lagi menyebut performatif sebagai bentuk kanonikal setiap ilokusi dan sebagai dasar klasifikasinya. Hal itu tercermin dalam tulisannya yang menyatakan bahwa “sekarang saya ingin meneliti struktur batin kalimat-kalimat performatif ekspresif yang terdapat pada masing-masing kategori ini”. Searle (1969) tidak berusaha mengemukakan dasar-dasar prosedurnya itu, tetapi menerimanya begitu saja. Tampaknya, ia bertolak dari prinsip keterekspresifan (*principle of expressibility*) yang menyatakan bahwa apa pun yang mempunyai makna dapat diucapkan. Prinsip itu juga digunakan oleh Searle (1969). Namun, pemakaian prinsip itu juga tanpa pemberian alasan.

Prinsip keterekspresifan merupakan tesis yang sangat memudahkan dan membantu penjelasan kita, terutama bila kita ingin menunjukkan bahwa dengan membubuhkan awalan performatif yang sesuai, daya ilokusi tuturan selalu dapat dibuat lebih jelas. Juga dalam aspek-aspek lain, Searle (1975) tampaknya mengandalkan pada Kekeliruan Performatif, walaupun dia sendiri tidak mengakuinya secara terbuka. Dia membenarkan bahwa daya ilokusi dapat diungkapkan dengan sejumlah “Peranti Penanda Daya Ilokusi” (*Illocutionary-Force Indicating Devices*), baik dengan intonasi, tanda baca, dan sebagainya, maupun dengan verba performatif. Akan tetapi, dalam praktik karya-karyanya dia tidak mengembangkan atau mencerminkan peranti-peranti ini selain verba performatif. Dia juga mengakui bahwa terdapat “ketidak

jelasan yang sangat besar” dalam penggolongan tuturan-tuturan ke dalam kategori-kategori ilokusi, namun ia tetap mempertahankan pendapat bahwa "jika kita menggunakan titik ilokusi sebagai pengertian dasar bagi klasifikasi penggunaan bahasa, maka itu berarti bahwa kita melakukan sejumlah hal dasar dengan bahasa”. Sehingga, Searle (1975) tetap mempertahankan teori kategorikal tindak tutur meskipun cukup sulit untuk menentukan kategori mana yang cocok dan tepat bagi sebuah tuturan.

Pengklasifikasian ilokusi berdasar verba performatif menimbulkan masalah. Menurut Leech (1980), ada 2 (dua) masalah sehubungan dengan empat kategori ilokusi (tanpa kategori deklarasasi). Masalah pertama ialah adanya polisemi. Yang dimaksud polisemi ialah verba dapat dimasukkan ke dalam lebih dari satu kategori, baik secara sintaktik maupun secara semantik. Ada beberapa-verba yang cukup lincah untuk berperilaku seperti itu. Misalnya, dalam bahasa Inggris, *verba advise, suggest, dan tell* dapat masuk kelompok asertif maupun direktif. Hal itu berarti bahwa leksikon verba tindak tutur harus mempunyai entri ganda. Yang lebih sulit dijelaskan lagi ialah aspek makna verba-verba tersebut nampaknya konstan dari makna yang satu ke makna yang lain. Misalnya, kata sugesti baik sebagai asertif maupun sebagai direktif menyiratkan suatu ilokusi tentatif, berbeda dengan verba *tell*. Karena kepolisemian itu, klasifikasi yang terjadi lebih banyak merupakan klasifikasi “makna verba” daripada klasifikasi verba.

Masalah kedua ialah beberapa verba yang diikuti oleh, objek langsung tidak menggunakan satu pun pelengkap klausa walaupun secara semantik verba ini mungkin mengandung komplemen tersebut. Contohnya ialah

(13) *Dokter menganjurkan istirahat.*

Mungkin tuturan tersebut diturunkan dari struktur batin

(14) *Dokter menganjurkan petutur agar ia istirahat.*

Oleh sebab itu, perlu ditekankan di sini bahwa ada ketidaksimetrisan tertentu antara verba tindak tutur dan tindak tutur yang sebenarnya. *Pertama*, tidak semua tindak tutur direpresentasikan oleh verba tindak tutur tertentu. Tindak tutur tersebut dapat direpresentasikan oleh berbagai cara. Tindak tutur-

memerintah dapat diungkapkan dalam berbagai cara, yaitu sering dengan cara tidak langsung, dengan verba 'memerintah' langsung, atau dengan verba 'normal' dalam bentuk imperatif atau bahkan pemakaian kata-kata terlalu banyak dan tidak perlu seperti contoh berikut.

- (15) a. *Saya memerintah Anda untuk menutup pintu itu.*  
b. *Tutup pintu itu!*  
c. *Anda dapat menutup pintu itu, kan?*

Semua ujaran itu mengungkapkan hal yang sama, yaitu memerintah. *Kedua*, tidak setiap tindak tutur memiliki kesepadanan dengan verba satu lawan satu. Tidak semua tindak tutur berkaitan dengan status verba tindak tutur. Hal itu dapat dilihat pada kasus verba performatif yang sudah dibahas.

Selain itu, menurut Trosborg (2011), salah satu titik kontroversial dari teori Searle (1976) ialah dasar pengklasifikasian ancangannya. Meskipun teori tersebut tentang tindak ilokusi berdasar kriteria fungsional, dia menggunakan kalimat lengkap (*the complete sentence*) sebagai ciri bentuk gramatikal dari tindak ilokusi. Padahal, konsep kalimat merupakan unit gramatikal (mengacu kepada sistem formal), sedangkan tuturan merupakan unit pragmatik yang mengacu kepada bagian ujaran dengan fungsi komunikatif dan tindak tutur dianggap sebagai unit minimal komunikasi.

## **2.2. Unsur Kebahasaan**

Untuk membedakan unsur kebahasaan sebagai konsep abstrak bebas konteks dan struktur yang diproduksi secara aktual dalam situasi tutur, pembedaan dibuat antara kalimat dan tuturan. Kalimat ialah unit kebahasaan yang terdiri atas unsur formal, sedangkan tuturan ialah kalimat yang disituasikan, yaitu unit komunikasi pragmatis. Sangat mungkin untuk dua atau lebih kalimat menyampaikan ilokusi tunggal. Misalnya, sejumlah kalimat dapat membentuk pernyataan tunggal atau sebuah informasi dan rekomendasi atau sebuah saran yang sangat sulit diungkapkan dalam kalimat tunggal.

Kekuatan teori tindak tutur pada dasarnya terletak pada keberhasilannya dalam menentukan taksonomi yang pasti dan ekonomis, yang berhasil mengaitkan jenis ilokusi dengan fungsi khasnya. Yang menjadi pertanyaan lain ialah bagaimana cara menentukan tindak tutur. Searle (1975) mengusulkan bahwa tindak tutur dipengaruhi oleh 4 (empat) syarat dalam penggunaannya, yaitu syarat isi proposisional (*propositional content condition*), syarat persiapan (*preparatory condition*), syarat ketulusan (*sincerity condition*), dan syarat esensial (*essential condition*). Masing-masing syarat itu berbeda dalam tindak tutur yang satu dengan yang lain. Searle (1975) memberikan contoh analisis syarat tindak tutur menasihati (*advice*) sebagai berikut.

- Syarat isi proposisi : Tindakan petutur di masa mendatang.
- Syarat persiapan : Penutur memfiksi alasan untuk percaya bahwa tindakan itu akan menguntungkan petutur. Tidaklah jelas bagi penutur maupun petutur akan melakukan tindakan itu dalam terjadinya peristiwa itu secara normal.
- Syarat ketulusan : Penutur percaya bahwa tindakan itu akan menguntungkan petutur.
- Syarat esensial : Diharapkan pelaksanaan tindakan itu akan menimbulkan efek bahwa tindakan itu amat penting bagi petutur.

Namun, 4 (empat) masalah yang saling berkaitan muncul berdasar teori tersebut. *Pertama*, tidak selalu mungkin membedakan secara penuh antara tindak tutur yang satu dengan yang lain (sebagian karena syarat yang diajukan Searle (1975) cenderung mencakupi hanya pemakaian verba tindak tutur yang paling utama atau tipikal). *Kedua*, jika kita berupaya menutup semua kesenjangan dalam kaidah Searle (1975), kita mengakhiri sekumpulan syarat-syarat yang kompleks dengan tanpa harapan untuk dapat menemukannya lagi. *Ketiga*, syarat-syarat yang diajukan Searle (1975) dapat mengeluarkan contoh-contoh tindak tutur yang lazim, tetapi memungkinkan terjadinya pemakaian anomali. *Keempat*, verba tindak tutur yang sama dapat mencakupi berbagai fenomena



berbeda sehingga beberapa tindak tutur dapat 'tumpang tindih' dan kaidah Searle (1975) tidak menjelaskan hal itu.

Dalam beberapa contoh, untuk menanggulangi ketumpangtindihan, Searle (1975) mengajukan kaidah persiapan tambahan, misalnya dalam membedakan perintah dan permohonan. Dalam tindak tutur memerintah ada kaidah persiapan tambahan, yaitu penutur harus berada dalam posisi otoritas di atas petutur, sedangkan hal itu tidak terjadi pada tindak tutur memohon. Dengan begitu, pentinglah memahami hakikat hubungan kekuasaan yang berlaku antara penutur dan petutur untuk menginterpretasi daya ilokusi dari berbagai ujaran. Namun, ketika hubungan kekuasaan diperebutkan antara penutur dan petutur, tidak ada jaminan perintah yang diucapkan akan berhasil.

Dalam praktiknya, serangkaian syarat Searle (1975) dapat diterapkan pada sejumlah tindak tutur. Namun, sulit kiranya melihat apakah syarat persiapan tambahan dapat digunakan untuk membedakan tindak memohon dengan mengundang, menuntut, bertanya biasa, bertanya dalam ujian, bertanya dalam kuis atau pemakaian tindak bertanya yang lain meskipun sebagian besar penutur asli suatu bahasa secara intuitif mengenali bahwa berbagai tindak tutur tersebut berbeda satu dengan yang lain dalam hal-hal penting. Sehingga, syarat kesahihan yang dia kaitkan dengan keberhasilan performansi tindak tutur lebih problematis dan kesahihan syarat-syarat tersebut, dipertanyakan oleh sebagian para akademisi.

Reiss (1985) (dalam Trosborg, 2011) menyatakan bahwa model kompetensi untuk menghasilkan dan memahami fungsi tindak tutur tidak bergantung pada definisi aksiomatik syarat kesahihan. Malahan, dia berpendapat bahwa apa yang didefinisikan Searle (1975) tentang syarat kesahihan lebih baik dijelaskan untuk manifestasi situasional (kontekstual) dari aspek kompetensi kognitif yang lebih global untuk melakukan tindakan. Dia mengacu kepada anggapan "rasionalitas instrumental" (pemakaian berbagai pesan untuk memotivasi berbagai respons) yang mendasari pemakaian tindak tutur dan logika tindakan yang mendasari struktur tindak tutur. Pemahaman bergantung pada

fungsi instrumental dan rancangan tindak tutur sebagai peranti untuk menentukan pengaruh perlokusi.

Sebagai argumen untuk mendukung penggantian syarat kesahihan dengan rasionalitas instrumental, Reiss (1985) menyatakan bahwa ketika penutur berkomunikasi, penutur tidak memberikan perhatian kepada syarat kesahihan dan juga tidak menyadari syarat tersebut. Penutur lebih memusatkan perhatian pada pencapaian tujuan sosial mereka. Namun, ketidaksadaran tidak dapat disamakan dengan ketidakadaan. Misalnya, penutur jati suatu bahasa memahami kaidah gramatikal bahasa yang mereka gunakan, tetapi mereka belum tentu menyadari kaidah itu sebagai pengetahuan jika mereka diminta untuk menjelaskan.

Reiss (1985) menyatakan bahwa meskipun Searle (1976) mengakui pentingnya berbagai tindak perlokusi, dia tidak mengembangkan hal itu secara rinci. Searle (1976) memusatkan perhatian karyanya sebagian besar pada tindak ilokusi dan menurut Searle (1976), yang diperlukan untuk bergerak dari tujuan yang dimaksudkan ke melakukan tindak tutur ialah membuat maksud tersebut diketahui orang lain. Meskipun begitu, Searle (1976) mengakui bahwa tiap tindak dilakukan dengan tujuan ganda, yaitu tujuan bahasa dari ungkapan yang disengaja dan tujuan ekstralinguistis berkaitan dengan pencapaian sesuatu yang dilakukan dengan pemakaian ungkapan itu. Asertif dibuat untuk tujuan memberi informasi, komisif untuk tujuan menciptakan harapan, dan direktif untuk tujuan membuat orang lain melakukan sesuatu. Namun, hanya dalam kasus direktif tindak berikutnya petutur melakukan sesuatu sebagai bagian dari maksud penutur. Pada tindak yang lain, hal tersebut tidak terjadi. Sehingga, Searle (1976) tidak memasukkan tindak perlokusi dilakukan oleh petutur mengikuti tindak tutur, sebagai bagian dari maksud penutur, kecuali tindak direktif. Kritik tajam terhadap teori Searle (1976) terarah pada kegagalannya mengembangkan konsep Austin (1962) tentang tindak perlokusi itu.

Searle (1975) juga dikritik atas pengesampingan peran petutur dalam interaksi. Bagi Searle (1975), percakapan direduksi ke jalur satu arah, yaitu performansi tindak perlokusi selalu terdiri

atas pemakaian ilokusi untuk menyampaikan pengaruh pada pikiran, tindakan, kepercayaan, dan sebagainya pada diri petutur. Petutur dianggap memainkan peran pasif dan dalam karya Searle (1975) tidak ada penjelasan berkaitan dengan aspek interaksional pemakaian bahasa.

Kritik lain datang dari Thomas (1993). Dia menyatakan bahwa alasan pengategorisasian ilokusi tertentu sebagai satu tindak tutur daripada tindak yang lain merupakan hal kompleks. Dalam interaksi yang nyata, kita menggunakan lebih dari sekadar kriteria formal seperti sistem klasifikasi Searle (1976). Misalnya, ada konteks tertentu yang tidak menginginkan kebenaran dikatakan secara keseluruhan. Kemudian, ada pula beberapa situasi spesifik budaya yang tidak menginginkan keseluruhan kebenaran tidak dikatakan. Akhirnya, ada saatnya penutur tidak menjelaskan kebenaran secara keseluruhan untuk menghindari menyakiti perasaan petutur atau menghindari mengungkapkan sesuatu yang dianggap sebagai rahasia.

Pertimbangan formal pengklasifikasian Searle (1976), perlu didukung oleh aspek fungsional, psikologis, dan faktor afektif. Kadang cara kita mengklasifikasi tindak tutur dipengaruhi oleh pertimbangan yang spesifik konteks atau spesifik budaya yang berkaitan dengan tujuan penutur dalam bertutur dengan cara tertentu. Konstelasi keseluruhan ciri itu berkontribusi terhadap cara partisipan dalam interaksi mengklasifikasi tindak tutur. Kriteria yang digunakan jauh lebih kaya dan lebih kompleks daripada kerangka deskriptif yang diajukan Searle (1976) dengan melibatkan berbagai kriteria yang berbeda.

Selain itu, kaidah Searle (1976) hanya mampu menanggulangi contoh-contoh tindak tutur yang tipikal saja dan gagal membedakan satu tindak tutur dengan tindak tutur lain secara memadai. Dalam realitas, alasan pengklasifikasian tindak tutur dengan cara tertentu jauh lebih kompleks dan sering tidak mungkin menentukan tindak tutur pada kategori "hitam putih". Itu berarti bahwa Searle (1976) telah terjebak pada perumusan kaidah yang terformalisasi seperti halnya pada tata bahasa. Formalisasi terbukti manjur dalam pembahasan tata bahasa deskriptif, namun

ketika diterapkan pada sebagian besar wilayah pragmatik, formalisasi terbukti banyak menyesatkan. Oleh sebab itu, Thomas (1983) menyarankan perlunya alternatif untuk mendeskripsi tindak tutur, yang mampu menangkap kompleksitas yang melingkupinya tanpa terperangkap pada penentuan kaidah terbatas. Menurut dia, tindak tutur tidak akan pernah dapat dideskripsi secara memuaskan berdasar kaidah. Karena itu, tindak tutur lebih baik dideskripsi berdasar prinsip-prinsip.

# BAB 3

## TINDAK TUTUR DIREKTIF

---

### 3.1. Ragam Tindak Tutur Direktif

Bach dan Harnish (1979) menguraikan tindak tutur direktif dengan lebih panjang lebar dibanding uraian Austin (1962) dan Searle (1975). Bach dan Harnish (1979) menyatakan bahwa direktif mengungkapkan sikap penutur terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh petutur. Apabila sebatas pengertian ini yang diungkapkan, menurut mereka, tindak direktif merupakan konstatif dengan batasan pada isi proposisinya, yakni tindakan yang akan dilakukan tertuju kepada petutur. Akan tetapi, tindak direktif juga bisa mengungkapkan maksud penutur (keinginan, harapan) sehingga ujaran atau sikap yang diungkapkan dijadikan sebagai alasan untuk bertindak oleh petutur. Bach dan Harnish (1979) memasukkan 6 (enam) sub-kategori utama tindak direktif, yakni *requestives*, *questions*, *requirements*, *prohibitives*, *permissives*, dan *advisories*. *Requestives* mengungkapkan keinginan penutur sehingga petutur melakukan sesuatu. Di samping itu, *requestives* mengungkapkan maksud penutur (atau jika jelas bahwa dia tidak mengharapkan kepatuhan, *requestives* mengungkapkan keinginan atau harapan penutur) sehingga petutur menyikapi keinginan yang terekspresikan ini sebagai alasan (atau bagian dari alasan) untuk bertindak. Maksud perlokusi yang sesuai adalah bahwa penutur menyikapi petutur benar-benar memiliki keinginan dan maksud yang dia ungkapkan dan bahwa petutur melakukan tindakan yang diminta penutur. Verba *requestives* ini mempunyai konotasi yang bervariasi dalam kekuatan. sikap yang diungkapkan, sebagaimana yang ada dalam mengundang, mendorong, dan meminta. Di samping itu, ada verba yang lebih kuat, yang mengandung pengertian kepentingan, seperti mendesak dan memohon. Sebagian verba *requestives* memiliki cakupan yang lebih spesifik, misalnya memanggil atau mengundang mengacu kepada permohonan terhadap permintaan agar petutur datang.

*Questions* (pertanyaan) merupakan *requests* dalam kasus yang khusus, yakni yang dimohon ialah petutur memberikan informasi tertentu kepada penutur. Terdapat perbedaan di antara berbagai jenis pertanyaan, tetapi tidak semuanya penting untuk taksonomi ilokusi. Menurut Bach dan Harnish (1979), pertanyaan yang tidak terialu cocok untuk analisis tindak tutur ialah antara lain pertanyaan ujian, pertanyaan retorik, interogasi, pertanyaan menguji (*quiz*), dan menyelidik (*quefy*).

*Requirements* (perintah) seperti menyuruh dan mendikte jangan sampai dikacaukan dengan memohon (*request*), meskipun permohonan dalam pengertian yang kuat. Ada perbedaan penting di antara keduanya, yakni perintah dan permohonan. Dalam *requestives* penutur mengungkapkan maksudnya sehingga petutur menyikapi keinginan yang diungkapkan oleh penutur sebagai alasan untuk bertindak. Sementara itu, dalam *requirements* maksud yang diungkapkan penutur adalah petutur menyikap ujaran penutur sebagai alasan untuk bertindak. Dengan begitu, ujaran penutur dijadikan sebagai alasan penuh untuk bertindak. Akibatnya, perintah tidak mesti melibatkan ungkapan keinginan penutur supaya petutur bertindak dengan cara tertentu. Dalam mengungkapkan kepercayaan dan maksud yang sesuai, penutur mempraanggapkan bahwa dia memiliki kewenangan yang lebih tinggi daripada petutur, misalnya otoritas fisik, psikologis, dan institusional, yang memberikan bobot ujarannya.

*Prohibitives* (larangan), seperti melarang atau membatasi (*proscribing*), pada dasarnya merupakan perintah (*requirements*) agar petutur tidak lengedakan sesuatu. Melarang orang merokok sama halnya menyuruhnya untuk tidak merokok. *Prohibitives* dipisahkan dari *requirements* karena *requirements* menggunakan bentuk gramatikal yang berbeda dan karena terdapat sejumlah verba semacam itu.

*Permissives* (pemberian izin) seperti halnya perintah dan larangan, mempraanggapkan kewenangan penutur. Pemberian izin mengungkapkan kepercayaan penutur dan maksud penutur sehingga petutur percaya bahwa ujaran penutur mengandung alasan yang cukup bagi petutur untuk merasa bebas melakukan

tindakan tertentu. Alasan yang jelas untuk menghasilkan pemberian izia tampak bahwa penutur mempraanggapkan adanya permohonan terhadap izin itu atau mempraanggapkan adanya pembatasan terhadap apa yang dimintakan izin itu. Paling tidak berkaitan dengan permisif non-institusional, penutur mengungkapkan bahwa dia tidak mengharapkan, menginginkan, atau berkehendak agar petutur tidak melakukan tindakan tersebut. Akan tetapi, yang diharapkan membentuk alasan petutur dalam bertindak ialah ujaran penutur, bukan sikap yang diungkapkan penutur. Sebagian verba pemberian izin ini sangqt, khusus, seperti melindungi (*bless*), berpamitan (*dismiss*), permisi (*excuse*), dan melepaskan (*release*).

Berkaitan dengan advisories, hal yang diungkapkan penutur bukanlah keinginan bahwa petutur bertindak tertentu, tetapi kepercayaan bahwa bertindak sesuatu merupakan hal yang baik dan tindakan itu merupakan kepentingan petutur. Penutur juga mengungkapkan maksud bahwa petutur mengambil kepercayaan berupa ujaran penutur sebagai alasan untuk bertindak. *Advisories* bervariasi menurut kekuatan kepercayaan yang diungkapkan, misalnya *admonishing* (memperingatkan) dan *suggesting* (menyarankan). Sebagian *advisories* mengimplikasi adanya alasan khusus sehingga tindak yang disarankan merupakan gagasan yang baik, misalnya, penutur mempraanggapkan adanya suatu sumber bahaya atau kesulitan bagi petutur.

Leech (1980) menyebut tindak tutur ini sebagai tindak impositif agar istilah direktif tidak dikacaukan dengan ilokusi langsung dan taklangsung (*direct and indirect illocutions*). Selain itu, menyatakan bahwa verba direktif biasanya terjadi dalam konstruksi 'S VERB (O) that X' atau 'S VERB O to Y' dengan S sebagai subjek dan O sebagai objek (masing-masing mengacu kepada penutur dan petutur) dan 'that X' merupakan klausa yang non-indikatif, sedangkan 'to Y' adalah klausa infinitif; misalnya *ask* (meminta), *beg* (meminta dengan sangat), *bid* (memohon dengan sangat), *command* (memberi perintah), *demand* (menuntut). Berbeda dengan klausa-*that* yang mengikuti verba asertif, klausa-*that* yang non-indikatif ini mengandung subjungtif atau modal

seperti *should*, karena mengacu kepada suatu perintah dan bukan kepada suatu proposisi, misalnya *We requested that the ban (should) be lifted* (Kami memohon agar larangan itu dihapus).

### **3.2. Tindak Tutur Memohon sebagai Bagian dari Tindak Tutur Direktif**

Dalam klasifikasi Searle (1976), tindak tutur memohon merupakan salah satu jenis tindak tutur direktif, yaitu tindak tutur yang titik ilokusinya “consists in the fact that they are attempts ... by the speaker to get the hearer to do something”. Verba dalam kelompok ini mencakupi *order, request, demand, advise, offer*, dan sebagainya. Searle (1976), verba performatif permohonan dikaitkan dengan kaidah regulatif sebagai berikut. *Pertama*, kaidah kandungan proposisi (*propositional content rule*): tindakan petutur di masa depan. *Kedua*, kaidah persiapan (*preparatory rule*): (petutur yakin bahwa) petutur dapat melakukan tindakan yang diinginkan oleh penutur walaupun tidak jelas bagi kedua partisipan apakah petutur akan melakukan tindakan itu. *Ketiga*, kaidah ketulusan (*sincerity rule*): penutur menginginkan agar petutur melakukan tindakan. *Keempat*, kaidah esensial (*essential rule*): upaya agar petutur melakukan suatu tindakan.

Bach dan Harnish (1979) juga mengungkapkan bahwa tindak tutur memohon merupakan tindak tutur yang mengungkapkan keinginan penutur agar petutur melakukan sesuatu dengan tambahan syarat bahwa keinginan yang diungkapkan penutur sebagai alasan bertindak bagi petutur .

Pada tataran yang lebih dalam, Edmondson dan House (dalam Trosborg, 2011) menyatakan bahwa tindak memohon dapat dianalisis sebagai tindak ritual yang mencapai sebuah keseimbangan antara dua hal yang berkecenderungan berkonflik dalam hakikat kita sebagai manusia. Pada satu sisi, kita memiliki kebutuhan untuk berkontak dengan sesama manusia, yang mengakibatkan keinginan untuk bekerja sama, berbagi, dan saling bertanggung jawab. Pada sisi lain, kita memiliki kebutuhan untuk keleluasaan pribadi (*privacy*), yang mengakibatkan keinginan



untuk memiliki wilayah pribadi dan kebutuhan untuk menjauh dari orang lain.

Ditinjau dari segi biaya-keuntungan, tindak tutur memohon ialah tindak ilokusi yang meminta petutur untuk melakukan tindak yang diinginkan penutur, yang keuntungannya ada pada penutur dan biaya ada pada petutur. Karena itu, tindak ini berbeda dengan tindak menyarankan, yang keuntungannya ada pada diri petutur. Permohonan itu dapat berupa benda non-verbal seperti sebuah objek atau tindakan lain dan dapat pula berupa hal verbal lain seperti permohonan informasi. Tindak yang diinginkan bersifat pascatuturan. Sehingga, tindak tutur memohon bercirikan praperistiwa, yang berbeda, misalnya dengan keluhan (*complaint*) yang berupa pascaperistiwa (*post-event*).

Penutur menekan petutur dengan berbagai strategi ketika penutur menuntut benda-benda atau layanan dalam tindak memohon. Dengan mengutip pendapat Haverkate (1990), Trosborg (2011) menyatakan bahwa tindak memohon sebagai tindak impositif dideskripsi sebagai tindak tutur yang bertujuan mempengaruhi perilaku petutur agar melakukan sesuatu sesudah tuturan dilakukan, terutama untuk keuntungan penutur. Tindak tutur itu dapat dinyatakan secara langsung maupun tidak langsung. Tindak tutur memohon juga merupakan Tindak Pengancam Muka. Penutur berusaha mengontrol perilaku petutur dan dalam melakukan tindakan itu penutur mengancam muka negatif penutur dengan menunjukkan bahwa dia tidak bermaksud mengganggu kebebasan bertindak petutur. Penutur juga berusaha mengurangi risiko kehilangan mukanya untuk berjaga-jaga manakala petutur memilih menolak untuk melakukan tindak yang diinginkan penutur.

### **3.3. Penentuan Tindak Tutur Memohon**

Menurut Searle (1975), syarat utama yang menjadi ciri tindak memohon dalam situasi komunikasi ialah bahwa tuturan ditujukan kepada petutur “counts as an attempt to get H to do A.” Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menandai bahwa

sebuah lokusi memiliki daya ilokusi tindak memohon seperti yang dikemukakan Trosborg (2011) berikut ini.

a. Modus

Teori tindak tutur mendasarkan diri pada anggapan bahwa sebuah tuturan disusun dari proposisi dan modalitas. Teori tata bahasa tradisional mengaitkan modus imperatif dengan daya direktif. Imperatif merupakan bentuk gramatikal kanonik untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Pada modus imperatif, subjek gramatikal dapat dilesapkan dari struktur permukaan, tetapi ketika menginterpretasikan struktur ini, petutur menjadi peran agen dari tindakan yang diinginkan penutur. Contohnya ialah

(16) *Bersihkan meja ini!*

Ujaran (16) tidak memiliki subjek gramatikal. Akan tetapi, petutur harus memahami bahwa yang diminta bertindak membersihkan meja ialah dirinya sehingga ia harus menjadi peran pelaku dalam ujaran (16).

Namun, struktur imperatif bukan satu-satunya cara menyampaikan daya ilokusi permohonan. Daya itu sering juga direalisasikan dengan struktur deklaratif dan interogatif. Contohnya ialah

(17) *Saya ingin Anda menyiapkan berkas-berkas ini besok.*

(18) *Dapatkah saya memiliki berkas-berkas itu besok pagi?*

Ujaran (17) dan (18) itu semua merupakan tindak permohonan yang meminta petutur menyelesaikan berkas-berkas yang memungkinkan dapat dibaca penutur besok pagi.

b) Verba performatif

Penutur dapat menyampaikan tindak memohon secara sederhana dengan menggunakan verba performatif yang secara eksplisit menandai daya ilokusi, misalnya dengan menggunakan verba meminta, mohon, dan ingin. Contohnya ialah

(19) *Saya mohon pintu dibuka saja.*

(20) *Saya minta pintu dibuka saja.*

(21) *Saya ingin pintu dibuka saja.*

c) Syarat kesahihan

Menurut Searle (1975), daya tuturan diperoleh dari seperangkat syarat tertentu yang berkaitan dengan tuturan tertentu. Syarat itu pada satu sisi berkaitan dengan kepercayaan dan sikap penutur dan petutur. Pada sisi lain, syarat itu berkaitan dengan saling pemahaman interlocutor pada peranti kebahasaan untuk berkomunikasi. Syarat itu menurut Searle (1975) meliputi

- Penutur ingin petutur melakukan suatu tindakan mendatang;
- Penutur menganggap petutur dapat melakukan suatu tindakan mendatang;
- Penutur menganggap petutur mau melakukan suatu tindakan mendatang;
- Penutur menganggap petutur tidak akan melakukan suatu tindakan mendatang dalam ketiadaan tindak tutur memohon;

Searle (1975) menunjukkan status penutur dan petutur sebagai syarat yang diperlukan untuk performansi kesahihan dari tindak memohon. Ketidakpunyaan otoritas kemungkinan besar akan menyebabkan tindak memohon tidak sah. Sehubungan dengan hal itu, Labov-Fanthele dalam Trosborg (2011) berusaha membangun teori syarat kesahihan sosial ke dalam teori tindak tutur. Mereka menyatakan bahwa penutur harus percaya bahwa petutur berada dalam kewajiban untuk melakukan tindak yang diinginkan penutur dan penutur memiliki hak mengatakan kepada petutur untuk melakukan sesuatu. Syarat ini diperjelas dalam tindak memohon dengan pemakaian modalitas seperti *must*, *ought to*, dan *have to*. Namun, ada pula tuturan memohon yang tidak mengeksplisitkan penjelasan dari tindak yang diinginkan penutur. Bahkan, penutur sengaja menghindari penjelasan tindakan yang dimaksudkannya. Tindak seperti itu merupakan realisasi tindak memohon dengan strategi isyarat.

Ellis (1985, 1994) menandai sejumlah ciri umum dari tindak tutur memohon, yang dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Tindak tutur memohon seringkali digunakan sebagai fungsi memulai

2. Dalam wacana. Dalam hal ini, tindak tutur memohon berbeda dari tindak ilokusi lain.
3. Tindak tutur memohon dapat dilakukan dalam satu pergantian tunggal (a single turn), misalnya  
 Guru : *Baca bukumu, Aziz.*  
 Tindak tutur memohon dapat pula dilakukan dalam lebih dari satu pergantian, yang didahului oleh tindak persiapan atau prapermohonan. Contohnya ialah  
 Guru : *Apakah Anda sudah menyelesaikan latihan ini?*  
 Murid : *Ya, sudah.*  
 Guru : *Kalau begitu, bacalah bacaan pada halaman berikutnya.*
4. Tindak tutur memohon dapat direalisasikan secara kebahasaan dalam berbagai cara. Ada 3 (tiga) dimensi modifikasi tindak tutur memohon, yaitu tingkat kelangsungan, modifikasi internal, dan modifikasi eksternal tindak tutur memohon. Tindak tutur memohon juga dapat direalisasikan dalam kalimat deklaratif, interogatif, dan imperatif.
5. Tindak tutur memohon dapat disampaikan dari perspektif penutur, perspektif petutur, atau perspektif impersonal.
6. Tindak tutur memohon juga dapat didukung oleh beberapa tindak tutur tambahan yang dirancang untuk mempersiapkan tindak tutur memohon itu sendiri, memberi alasan atau penguatan permohonan, meminimalisasi tingkat tekanan, dan sebagainya.
7. Pemilihan realisasi kebahasaan bergantung pada berbagai faktor sosial antara penutur dan petutur dan tingkat tekanan yang kemungkinan akan dirasakan oleh petutur atas tindak tutur memohon yang dikemukakan penutur.
8. Meskipun kategori utama tindak tutur memohon dapat ditemukan dalam bahasa yang berbeda, ada perbedaan lintas bahasa berkaitan dengan pilihan bentuk tindak tutur dalam situasi yang sama.

### **3.4. Strategi Tindak Tutur Memohon**

Konvensi yang berkaitan dengan tindak memohon dibuat dalam berbagai strategi ('konvensi cara') dan 'konvensi bentuk'.

Dalam teori tindak tutur, penekanan diutamakan pada hakikat konvensional yang disebut verba performatif. Jenis konvensi formal lain ialah prosodi, urutan kata tertentu, dan sebagainya. Sebetulnya, lebih sulit lagi memilah strategi yang secara konvensional digunakan untuk membuat tindak memohon karena ada banyak cara memohon yang dapat dilakukan dalam berbagai situasi. Hal itu membuat pesimisme para pakar dalam menentukan apa yang kita maksud dengan permohonan. Penutur dapat membuat permohonan dengan mengajukan pertanyaan, membuat perintah, menyarankan, dan sebagainya. Meskipun begitu, ada beberapa pakar yang membagi strategi memohon seperti Blum-Kulka dan Olshtain (1984), Trosborg (2011), dan Aijmer (1996). Hal itu akan diuraikan sebagai berikut.

Menurut Blum-Kulka dan Olshtain (1984), ada banyak upaya teoretis dan juga empiris pada tindak tutur memohon untuk menyusun klasifikasi strategi tindak memohon yang diharapkan, membentuk skala kelangsungan yang sah secara lintas bahasa. Berdasar latar teoretis, ada 3 (tiga) tingkat kelangsungan utama tindak direktif yang diharapkan dapat dimanifestasikan secara universal.

1. Paling langsung (tataran eksplisit) direalisasikan oleh permohonan yang dimarkahi oleh bentuk imperatif secara sintaktik atau oleh cara verbal lain yang disebut tindak memohon seperti performatif (Austin 1962) dan “performatif berpagar” (Fraser 1978).
2. Tingkat tidak langsung secara konvensional, yaitu prosedur tindak yang direalisasikan dengan mengacu kepada prasyarat kontekstual tertentu untuk performansinya, seperti dikonvensionalisasi dalam bahasa tertentu. Strategi ini umumnya diacu sebagai tindak tutur tidak langsung dalam kepastakaan tindak tutur.
3. Tingkat tidak langsung non-konvensional, yaitu kelompok strategi tidak langsung (isyarat) yang terbuka (tidak terbatas). Strategi ini direalisasi dengan mengacu, baik kepada acuan parsial dari objek atau unsur yang diperlukan untuk implementasi tindak (*Why is the window open*) atau dengan

menyatakan petunjuk kontekstual (*'It's cold in here*).

Berdasar kajian empiris tentang tindak memohon dalam berbagai bahasa yang berbeda, Blum-Kulka dan Olshtain (1984) menjabarkan 3 (tiga) tingkat tersebut ke dalam 9 (Sembilan) sub-tingkat yang berbeda yang disebut "jenis strategi", yang membentuk skala ketidaklangsungan. Contoh-contoh dalam bahasa Indonesia diambil dari Gunarwan (1995).

1. Kalimat bermodus imperatif (*mood derivable*): modal verba gramatikal dalam ujaran memarkahi daya ilokusinya sebagai tindak permohonan. Contoh: (22) *Pindahkan kotak ini!*
2. Performatif eksplisit (*explicit performatives*): daya ilokusi ujaran secara eksplisit disebut oleh penutur. Contohnya: (23) *Saya minta Saudara memindahkan kotak ini.*
3. Performatif berpagar (*hedged performative*): ujaran menyisipkan sebutan daya ilokusi. Contohnya: (24) *Saya sebenarnya mau minta Saudara memindahkan kotak ini.*
4. Pernyataan keharusan (*locution derivable*): titik ilokusi secara langsung ditimbulkan dari makna semantik lokusi. misalnya: (25) *Saudara harus memindahkan kotak ini.*
5. Pernyataan keinginan (*scope stating*): ujaran mengungkapkan maksud penutur, keinginan, atau perasaan yang diharapkan dilakukan penutur Seperti: (26) *Saya ingin kotak ini dipindahkan.*
6. Rumusan saran (*language specific suggestory formula*): ujaran berisi saran untuk melakukan tindak. Serperti: (27) *Bagaimana kalau kotak ini dipindahkan?*
7. Persiapan pertanyaan (*reference to preparatory conditions*): ujaran berisi acuan kepada syarat persiapan (misalnya kemampuan atau keinginan, kemungkinan tindak dilakukan) seperti dikonvensionalisasi Aalarn bahasa tertentu. Contohnya: (28) *Saudara dapat memindahkan kotak ini?*
8. Isyarat kuat (*strong hints*): ujaran berisi acuan sebagian kepada objek atau kepada unsur-unsur yang diperlukan untuk pelaksanaan tindak memohon. Seperti pada: (29) *Dengan kotak ini di sini, ruangan ini kelihatan menjadi sempit.*
9. Isyarat halus (*mild hints*): ujaran yang dibuat tidak mengacu

kepada ciri permohonan (atau unsur-unsurnya), tetapi dapat diinterpretasi melalui konteks sebagai permohonan (secara tidak langsung dan secara pragmatik mengimplikasikan tindak). Lihat pada: (30) *Ruangan ini kelihatan sesak*.

Trosborg (1995) mengajukan 4 (empat) kategori strategi memohon dengan melibatkan 8 (delapan) sub-strategi. Kategori itu dibuat Trosborg (1995) berdasar studi sebelumnya, khususnya berdasar teori Austin (1962) dan Searle (1969) seperti diformulasikan oleh House dan Kasper (1987), Blum-Kulka dan Olshtain (1984), serta Brown dan Levinson (1987).

Strategi yang dikemukakan Trosborg (1995) dapat dikemukakan secara ringkas sebagai berikut. Kategori I ialah tindak memohon tidak langsung dengan strategi isyarat, baik lemah maupun kuat. Kategori II ialah tindak memohon tidak langsung secara konvensional dengan syarat berorientasi kepada pendengar dengan menggunakan strategi menanyakan kemampuan, keinginan, dan pembolehan. Hal itu dapat pula dilakukan dengan menggunakan strategi menyatakan formula saran. Kategori III ialah tindak memohon tidak langsung dengan syarat berorientasi kepada penutur dengan menggunakan strategi menyatakan keinginan dan kebutuhan. Kategori IV ialah tindak memohon langsung yang dapat dilakukan dengan menggunakan strategi menyatakan kewajiban, menggunakan performatif, baik berpagar (*hedged*) maupun tidak dan dengan menggunakan imperatif dan frasa eliptik.

Selain itu, pemakaian strategi itu juga didukung oleh pemakaian modifikasi internal dan eksternal yang biasa digunakan pemakai bahasa dalam melakukan tindak memohon. Modifikasi internal dapat berupa tingkat pemerlunak (*downgraders*) dan penguat pengaruh (*upgraders*). Modifikasi internal dapat digunakan penutur dengan menggunakan penanda sintaktik yang berupa pertanyaan, klausa persyaratan, serta penyisipan apresiatif dan subjektif. Modifikasi internal lain dapat digunakan dengan menggunakan pengaruh frasal/leksikal yang berupa penanda kesantunan, pernyataan yang mengurangi kenyataan (*understatement*), pagar (*hedge*), keraguan, dan penanda

antarrribadi. Sementara itu, penguat pengaruh (*upgraders*) tindak memohon dapat berupa pengintensif adverbial, peningkatan komitmen, dan intensifikasi leksikal.

Modifikasi eksternal digunakan penutur untuk mempengaruhi petutur agar mau melakukan tindak yang diinginkan dan itu dilakukan dengan menggunakan pernyataan pendukung. Tindak pendukung yang biasa dipakai penutur ialah tindak persiapan (*preparations*), pemerdaya (*dissamers*), pemanis (*sweeteners*), alasan pendukung, pemanipulasian biaya, dan berjanji memberikan ganjaran.

Strategi yang dikemukakan Trosborg (1995) tadi dapat ditabelkan sebagai berikut dari peringkat paling tidak langsung ke paling langsung.

**Tabel 1.**  
*Strategi Tindak Tutur Memohon*

Situasi: Penutur memohon untuk meminjam mobil petutur	
<b>Kategori I:</b> Tindak memohon tidak langsung	
Strategi 1: Isyarat (Kuat)	<i>Mobil saya rusak. Padahal, saya harus sampai bandara setengah jam lagi</i>
(Lemah)	<i>Saya harus sampai di bandara setengah jam lagi</i>
<b>Kategori II:</b> Tindak tidak langsung secara konvensional (syarat berorientasi pada petutur)	
Strategi 2: Kemampuan	<i>Bisa meminjami saya mobil setengah jam saja?</i>
Kemauan	<i>Mau meminjamkan mobilmu tidak?</i>
Keterbolehan	<i>Boleh saya meminjam mobilmu?</i>
Strategi 3 Formula saran	<i>Bagaimana kalau kamu meminjamkan mobilmu kepada saya?</i>
<b>Kategori III:</b>	



Tidak Langsung secara konvensional (Syarat berdasar petutur)	
Strategi 4 Keinginan	<i>Saya ingin meminjam mobilmu.</i>
Strategi 5 Kebutuhan	<i>Saya perlu mobilmu sebentar saja, ya?</i>
<b>Kategori IV:</b>	
Permohonan langsung	
Strategi 6 Kewajiban	<i>Kamu harus meminjamkan mobilmu kepada Saya!</i>
Strategi 7 Performatif (berpagar)	<i>Saya ingin memohon kepada Anda agar bersedia meminjami saya mobil.</i>
(takberpagar)	<i>Saya mohon Anda meminjamkan mobil.</i>
Strategi 8 Imperatif Frasa eliptis	<i>Pinjami saya mobil dong! Kunci mobilmu, sini!</i>

Aijmer mengelompokkan strategi tindak permohonan ke dalam 18 (delapan belas) strategi berdasar data yang ditemukan dalam *London Lund Corpus*. Contoh-contoh diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia.

1. Kemampuan: menanyakan kemampuan penutur untuk melakukan suatu tindak. Contohnya ialah  
(31) *Dapat membantu saya sebentar saja?*
2. Konsultasi: menanyakan kemungkinan tindak yang diinginkan terjadi. Contohnya ialah  
(32) *Bagaimana jika Anda membantu saya sebentar saja?*
3. Kesiadaan: menanyakan apakah petutur ingin melakukan sesuatu atau memiliki keberatan melakukan sesuatu. Contohnya ialah  
(33) *Bersedia membantu saya tidak sebentar saja?*
4. Keinginan: mengungkapkan keinginan bahwa pelaku seharusnya melakukan sesuatu. Contohnya ialah  
(34) *Saya ingin Anda membantu saya menyelesaikan pekerjaan ini.*
5. Kebutuhan: mengungkapkan kebutuhan atau keinginan atas sesuatu hal (non-verbal). Contohnya ialah  
(35) *Saya perlu sekali bantuan Anda.*
6. Kewajiban: menyatakan bahwa petutur dalam kewajiban

- melakukan tindak yang diinginkan. Contohnya ialah  
(36) *Anda harus membantu saya menyelesaikan pekerjaan ini.*
7. Kepatutan: menyatakan bahwa patut jika petutur melakukan tindak yang diinginkan penutur. Contohnya ialah  
(37) *Lebih baik Anda membantu saya dulu. Sp(elah itu baru pulang.*
8. Pertanyaan WH: mengajukan pertanyaan idiomatis WH. Contohnya ialah  
(38) *Kenapa Anda tidak membantu saya menyelesaikan pekerjaan ini?*
9. Hipotesis: mengacu kepada tindakan hipotetis. Contohnya ialah  
(39) *Jika Anda ingin membantu saya, pasti saya akan senang sekali.*
10. Penghargaan: mengungkapkan bahwa seseorang akan menghargai, merasa senang, merasa bersyukur, jika tindak yang diinginkan terealisasi. Contohnya:  
(40) *Saya akan sangat menghargai Anda jika bersedia membantu saya.*
11. Pertanyaan izin: menanyakan izin untuk melakukan sesuatu. Contohnya:  
(41) *Bolehkah saya ikut membantu Anda?*
12. Kemungkinan: menegaskan bahwa sangat mungkin bagi petutur untuk melakukan sesuatu tindak. Misalnya:  
(42) *Mungkin Anda bisa membantu saya sebentar saja.*
13. Pilihan: mengacu kepada opini penutur bahwa sesuatu lebih baik daripada yang lain. Seperti contoh berikut:  
(43) *Anda lebih baik membantu saya sentar, saja daripada duduk-duduk tanpa melakukan apa-apa.*
14. Performatif mengacu secara eksplisit kepada tindak memohon. Contohnya adalah:  
(44) *Saya memohon kepada Anda untuk membantu saya menyelesaikan tugas ini.*
15. Keadaan: mengacu kepada keadaan dunia yang perlu diubah. Contohnya ialah  
(45) *Ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.*

16. Penyebutan: menyebutkan objek yang dimohon. Contohnya ialah  
(46) *Slide berikutnya.*
17. Keberadaan: mengecek kesediaan objek yang diinginkan. Misalnya:  
(47) *Ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan tidak?*
18. Lain-lain (misalnya, memberi pembenaran untuk melakukan tindak memohon).

Berdasar uraian di atas, tampak hanya ada sedikit kesamaan tentang jumlah strategi yang ada. Blum-Kulka (1987) mengklasifikasi permohonan pada 9 (sembilan) skala titik berdasar ketidaklangsungannya. Trosborg (2011) mengklasifikasi menjadi 4 (empat) kategori strategi dengan 8 (delapan) sub-strategi dan Aijmer (1996) mengajukan delapan belas strategi. Namun, dari ketiga pendapat itu, pendapat Blum-Kulka (1987) dan Trosborg (2011) relatif lebih mungkin diterapkan dalam studi karena keterurutan derajat kelangsungannya.

Pada dasarnya, tidak mungkin menyatakan jumlah strategi yang ada berkaitan dengan fungsi tertentu. Dari satu perspektif, jumlah strategi yang tersedia untuk mengungkapkan permohonan tidak terbatas karena penutur selalu memikirkan cara baru untuk membuat orang lain melakukan sesuatu. Yang difokuskan dari set strategi ialah menghasilkan strategi paling patut secara fungsional dan selanjutnya dikodifikasi secara kebahasaan. Bahkan, dari perspektif ini kita dapat mengajukan pertanyaan “mengapa strategi ini dan bukan strategi yang lain?” Seperti halnya strategi tindak tutur lain, pada tindak tutur memohon strategi tertentu dapat dianggap sebagai strategi yang lebih eksplisit daripada yang lain. Strategi 1 dan 3, seperti yang dikemukakan Aijmer (1996), misalnya berkaitan dengan prasyarat untuk permohonan dan dapat dianggap sebagai strategi paling eksplisit. Sementara itu, pada strategi nomor lain membuat acuan lebih tidak langsung pada prasyarat permohonan.

# BAB 4

## APA ITU KESANTUNAN?

---

### 4.1. Konsep Dasar Kesantunan

Banyak tulisan yang condong mengarah pada beberapa jenis tindak tutur terpilih dan mengesampingkan tindak tutur yang lain dalam analisis kesantunan. Namun, perlu diingat bahwa tiap tindak tutur melibatkan daya kesantunan. Sehingga, tidak hanya tindak tutur direktif saja, misalnya, yang memerlukan daya kesantunan.

Kesantunan merupakan sebuah “mekanisme pragmatik”, yang melibatkan berbagai struktur (termasuk non-verbal dan ciri prosodik) bersamasarna mengikuti maksud penutur untuk mencapai komunikasi yang lancar. Percakapan begitu juga tindak tutur yang dilakukan dalam percakapan ditempatkan sepanjang kontinum kesantunan yang terentang dari “sangat tidak santun” sampai ke “sangat santun”. Bahkan, Lavandera (1988) dengan mengutip pendapat Fraser dan Nolen (1981) menyatakan bahwa santun dan tidak santun bukan makna bentuk kebahasaan. Tidak ada kalimat yang secara inheren santun atau tidak santun. Kesantunan tidak terletak pada ungkapan kebahasaan itu sendiri, tetapi kondisi saat teriadinya ujaran itulah yang menentukan penilaian kesantunan. Hal itu dapat dimaknai bahwa santun atau tidak santun tidak semata-mata bergantung pada bentuk bahasa yang digunakan, tetapi bergantung pada situasi saat ujaran tersebut digunakan.

Kesantunan memiliki tujuan untuk mencapai komunikasi yang lancar dengan orang lain dan untuk menjaga martabat sebagai anggota masyarakat dewasa yang kompeten. Keduanya berasal dari keinginan manusia yang sama untuk membuat orang lain memiliki pendapat yang lebih baik tentang kita dan diri mereka sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Pranowo (2012) yang mengatakan bahwa penggunaan bahasa yang santun mampu menjaga harkat dan martabat penutur dan menghormati orang lain

sebagai bentuk cerminan budi pekerti halus dan luhur seseorang. Untuk itu, menjaga harkat dan martabat berupa substansi kesantunan, sedangkan menghormati orang lain bersifat perlukatif.

Oleh karena itu, dari sudut pandang etimologinya, kesantunan dapat didefinisikan sebagai alat sosial yang bertujuan untuk mencapai komunikasi yang lancar dan bebas konflik. Selain itu, fenomena kesantunan tidak dapat direkapitulasi sebagai seperangkat aturan karena memiliki karakteristik yang beragam dan didasarkan pada konteks (Obana. 2021).

Studi tentang fenomena kesantunan dapat memberikan wawasan tentang isu-isu yang sangat berbeda. Keterbatasan utama adalah jenis data yang digunakan dalam analisis (seperti, etnografi berbicara tentang *face and politeness* dalam budaya dan konteks yang berbeda). Untuk itu, penelitian tentang kesantunan telah jauh lebih kuat di bidang sosiologis daripada di bidang teoretis. Penekanan dalam penelitian tentang kesantunan sebagian besar terletak pada perbedaan lintas budaya, dengan perhatian yang tidak memadai pada paralel lintas bahasa/lintas budaya. Sehingga, arti kesantunan lebih luas adalah dalam interaksi, komunikatif, dasar kehidupan sosial sehari-hari dan perilaku hubungan sosial. Penelitian tentang kesantunan perlu berlabuh dalam teori interaksi sosial yang memperhitungkan sifat manusia kita bersama dan kemampuan kita untuk berkomunikasi lintas budaya dan perbedaan budaya.

Teori kesantunan tergantung pada variabel sosial dan kontekstual, interpretasi perilaku santun dan tidak santun berbeda dari budaya ke budaya. Sehingga, pertimbangan interaksi kesantunan di antara orang-orang yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda membutuhkan kerangka kerja antar budaya universal yang dibagikan secara global. Menurut Shahrokhi dan Bidabadi (2013). Teori kesantunan harus mengalami pengembangan dengan beberapa prinsip yaitu pertama harus ada beberapa prinsip dan aturan universal yang dianggap santun sebagai kerangka kesantunan antar budaya (*intercultural framework of politeness*) dan kedua dalam setiap budaya, interaksi

orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang sama harus mengikuti aturan dan prinsip-prinsip norma-norma interaksi bersama dalam budaya tertentu sebagai kerangka intrakultural (*intera-cultural framework*).

Selanjutnya, penghormatan dapat bercampur dalam tata bahasa seperti yang terdapat dalam bahasa Jepang dan Korea. Hal ini yang beberapa kalimatnya dikaji oleh Kartika dan Aditiawarman (2019). Dalam kedua bahasa itu, beberapa kelas kata (nomina, adjektiva, verba, dan pronomina) dapat berpenanda dan takberpenanda untuk penghormatan. Pemilihan honorifik dalam kedua bahasa itu juga bukan masalah individual, tetapi merupakan varian di antara pilihan wajib dan hal itu merefleksikan 'makna tempat dan peran dalam situasi tertentu menurut konvensi sosial tertentu'. Ini juga ditemukan dalam bentuk sapaan "sistem TN" dalam bahasa Prancis, Jerman, dan Rusia.

Brown dan Gilman (1960) memperkenalkan simbol T dan V untuk menandai pronomina sapaan akrab (T) dan pronomina sapaan santun dan berjarak (V). Singkatan T dan V diturunkan dari bahasa Latin *tu* dan *vos*. Pernilihan bentuk bahasa, baik *tu* maupun *vous* (dalam bahasa Prancis) ditentukan oleh penutur dengan mempertimbangkan hubungan antara penutur dan petutur. Jika penutur mempertimbangkan status sosial dirinya sendiri lebih tinggi, lebih tua, dan lebih berkuasa, penutur akan memilih bentuk *tu* (familiar) dan sebaliknya petutur menggunakan bentuk *vous* (non-familiar).

Penghormatan hanya mendapat sedikit tempat dalam pragmatik karena dalam kasus penghormatan, penutur tidak memiliki bentuk pilihan. Pemakaian bentuk-bentuk bahasa untuk penghormatan itu sudah didikte oleh norma sosiolinguistik. Misalnya, seorang prajurit tidak memiliki pilihan lain untuk menyetujui pemimpin pasukannya selain mengucapkan "Siap!"

Kesantunan dan penghormatan berbeda meskipun sistemnya dapat saja berkaitan. Namun, perlu diingat bahwa penghormatan dapat terjadi tanpa kesantunan. Penutur dapat menggunakan bentuk penghormatan, sementara pada saat yang sama mengimplikasikan seseorang dengan cara tidak santun.

Selain pembedaan kesantunan dengan penghormatan, ada pula pakar yang membedakan kesantunan dengan kepatutan/kepantasan. Gunarwan (1993) membedakan kepatutan (*appropriateness*) dan kesantunan (*politeness*) berkaitan dengan pembahasan tindak tutur direktif. Kepantasan dalam tindak tutur direktif lebih ditentukan oleh apa yang oleh Brown dan Gilman (1960) disebut semantik kekuasaan dan semantik solidaritas. Kepada dua faktor ini dapat ditambahkan faktor latar (*setting*), yaitu tempat terjadinya interaksi verbal. Singkatnya, kepatutan bentuk tuturan direktif lebih ditentukan oleh siapa yang “menyuruh” siapa dan di mana; dan soal “di mana” itu mengacu kepada situasi, yaitu resmi ataukah tidak resmi. Sebaliknya, kesantunan lebih ditentukan oleh adanya dua kebutuhan penutur, yang menurut Blum-Kulka (1987) adalah kebutuhan akan kejelasan pragmatik dan kebutuhan untuk menghindari kemungkinan terdengar memaksa. Sehingga, yang pantas atau wajar belum tentu yang santun. Sebaliknya, yang santun belum tentu wajar. Dengan dua fitur wajar (w) dan santun (s), sebuah tindak tutur dapat digolongkan sebagai +w+s, +w-s, -w+s, atau w--s.

Kesantunan pada akhirnya terletak dalam evaluasi tindakan, bentuk, dan makna sosial oleh orang-orang yang terletak relatif terhadap waktu dan ruang sosial. Ada empat lokus kunci dasar pemahaman kesantunan yaitu:

- 1) Pemahaman peserta/metapartisipan: interpretasi pengguna
- 2) Pemahaman *emic/etic*: konseptualisasi pengguna
- 3) Pemahaman pengamat/pengamat awam: interpretasi pengamat
- 4) Pemahaman teoretis/teori rakyat: konseptualisasi pengamat.

Setiap pemeriksaan kesantunan dapat didasarkan pada sejumlah lokus pemahaman yang berbeda. Memang, penting untuk dipahami bahwa setiap orang dapat memiliki banyak perspektif tentang kesantunan. Sehingga, untuk menganalisis pemahaman kesantunan dalam interaksi, dapat dimulai dengan analisis tindakan sosial dan makna yang muncul dalam interaksi tersebut serai evaluasi dilakukan secara refleksi (Kdar and Haugh, 2013).

## **4.2. Model Pragmatik Kesantunan**

Kesantunan telah menjadi pusat perhatian sejumlah linguis. Dalam tradisi ilmiah Anglo-Saxon, kajian kesantunan dilakukan dari perspektif pragmatik linguistik dan sosiolinguistik. Secara teoretis, semua pakar setuju bahwa kesantunan merupakan sub-bidang linguistik. Kesepakatan itu berpangkal dari fakta bahwa kesantunan dilakukan dengan menggunakan bahasa dan lebih spesifik pemakaian bahasa. Selain itu, dasar kesepakatan itu ialah kesantunan merupakan fenomena yang mengaitkan bahasa dengan dunia sosial. Kesantunan tampak sebagai fenomena hubungan antara bahasa dan realitas sosial. Namun, di balik tataran kesepakatan umum itu, kesamaan pendapat tentang kesantunan sulit ditemukan. Tiap teori lebih kurang memiliki definisi kesantunan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang kaidah sosial pemakaian bahasa, yang berkaitan dengan kesantunan berbahasa, penting sekali dipahami pemakai bahasa, terutama oleh pembelajar bahasa asing (Kartika, 2017).

Teori dasar kesantunan telah dikemukakan antara lain oleh Lakoff (1973, 1975), Leech (1980, 1983), dan Brown dan Levinson (1987). Jika dicermati, kerangka kerja teoretis dari tiga model itu melibatkan dua teori filosofis rasionalistik: Maksim Percakapan Grice (1961) dan teori tindak tutur Austin (1962) dan Searle (1969). Kedua teori itu memberi konsep untuk menjelaskan ketidaklangsungan dalam pemakaian bahasa, yaitu implikatur percakapan dan tindak tutur tidak langsung. Gunarwan (1999) menambahkan bahwa para linguis itu memiliki satu kesamaan pandang, yaitu pada dasarnya, dalam suatu interaksi, orang tidak selamanya mematuhi Prinsip Kerja Sama Grice (1961). Perbedaan di antara mereka terletak pada cara para pakar itu melihat wujud kesantunan sebagai kaidah (kaidah sosial).

Dengan begitu, ada 3 (tiga) anjakan kesantunan yang utama, yaitu pandangan kaidah sosial yang dikemukakan Lakoff (1986), pandangan maksim percakapan yang dikemukakan Leech (1983), dan pandangan pemertahanan muka yang dikemukakan Brown dan Levinson (1987). Pandangan maksim percakapan



mempostulasi prinsip kesantunan sebagai pelengkap Prinsip Kerja Sama Grice (1961). Prinsip kerja Sama mengatur percakapan yang bertujuan memaksimalkan transmisi informasi yang efisien. Prinsip kesantunan mengarah pada tujuan relasional; berfungsi mengurangi konflik dalam interaksi antarpribadi. Uraian-paling lengkap tentang hal itu dikemukakan oleh Leech (1980; 1983). Pandangan pemertahanan muka diajukan oleh Brown dan Levinson (1987). Teori kesantunannya memiliki anggapan pokok berdasarkan pandangan Weber tentang komunikasi sebagai aktivitas rasional yang memiliki tujuan, yang dikombinasi dengan konsep muka Goffman (1967). Pandangan kontrak percakapan dikemukakan Fraser (1990), yang merepresentasikan perspektif paling global pada kesantunan. Kontrak percakapan ditentukan hak dan kewajiban partisipan yang dapat berubah selama berlangsungnya interaksi. Bertindak secara santun sama seperti menggunakan bahasa secara patut.

Di antara tiga teori utama itu, pada bagian ini hanya dibahas dua teori utama, yang dikemukakan Leech (1980), dan Brown dan Levinson (1987) dengan alasan bahwa kedua teori itulah yang dapat dioperasionalkan untuk menganalisis data studi ini. Di samping pendapat kedua pakar itu, pada bagian ini juga dikemukakan beberapa pendapat pakar lain tentang kesantunan secara sepintas, yang umumnya merupakan kritik terhadap kelemahan teori sebelumnya atau modifikasinya.

#### **4.2.1. Model Kesantunan Leech**

Kesantunan berbahasa dapat diekspresikan sebagai bentuk penghormatan antara penutur dan lawan tutur (Kartika dan Aziz (2021). Leech mengemukakan teori kesantunannya pertama kali pada tahun 1980. Teori Leech (1980) itu oleh Lavandera (1988) dirangkum sebagai berikut. Leech menyatakan bahwa tujuan pembahasannya ialah melanjutkan pandangan tertentu (atau teori tertentu) tentang hubungan antara semantik dan pragmatik; secara lebih sempit, bahasanya memusatkan perhatian pada cara berperilaku bijaksana dari jenis tindak tertentu, yang digunakan

untuk menyampaikan dan menginterpretasikan ujaran-ujaran yang bersifat memaksa.

Untuk mencapai tujuannya itu, Leech (1980) mengkritik teori tindak tutur tidak langsung yang dikemukakan Searle (1975) dan berbagai pendapat yang dikemukakan Gordon/Lakoff (1975) dan Sadock (1974) yang gagal – menjelaskan secara mendasar – perihal hubungan arti (*sense*) dan daya (*force*), yaitu antara semantik dan pragmatik. Dengan memberi contoh kalimat seperti:

(48) *Would you like to type this letter for me?*

Leech (1980) menganggap bahwa akan sangat menyesatkan jika menyatakan bahwa ujaran (48) sebagai bentuk direktif yang dilakukan dengan cara bertanya. Hal yang lepas dari interpretasi Searle (1976) ialah penjelasan sistematis tentang peran kesantunan.

Leech (1980) mengadopsi berbagai-maksim dan prinsip kerja sama Grice (1961) dan menambahkan satu maksim lagi, yang disebutnya maksim Pebijaksanaan (*tact maxim*). Model kesantunannya tahun 1980 juga memasukkan definisi skala kesantunan sebagai fungsi 2 (dua) skala, yaitu skala biaya keuntungan dan skala opsionalitas. Kesantunan tindak tutur dapat ditingkatkan, misalnya, dengan menjaga faktor biaya keuntungan (menentukan seberapa banyak tindak mengadu pada isi proposisional tindak tutur yang dinilai menguntungkan atau membebani penutur dan petutur) dan meningkatkan faktor opsionalitas (sejauh mana performansi tindak menjadi pilihan penutur atau petutur). Leech (1980) menempatkan konsep kesantunan untuk menjelaskan pemetaan pragmatik linguistik dari arti (*sense*) ke daya (*force*) yang berhasil dalam ungkapan ketidaklangsungan bahasa.

Bagi Leech (1980), ada kombinasi 3 (tiga) faktor yang menciptakan perlunya dilakukan kesantunan, yaitu faktor kekuasaan, solidaritas, dan tinokat risiko atas konflik. Leech (1980) kemudian memprediksi bahwa “kecuali kalau faktor kekuasaan dan faktor solidaritas secara memadai kuat, penting kiranya menggunakan kebijaksanaan dalam rangka mereduksi faktor konflik.” Argumentasi yang diajukan Leech (1980) ialah bahwa

kebijaksanaan merupakan milik penutur yang dapat dilakukan tanpa menunggu dalam situasi luar biasa, ketika faktor kekuasaan dan solidaritas cukup kuat.

Konsep kebijaksanaan umum sepadan dengan pendapat bahwa selalu ada beberapa ukuran kesantunan. Hal itu menjadi lebih jelas ketika Leech (1980) menegaskan bahwa sangat mungkin orang menjadi tidak santun dan masih menggunakan kebijaksanaan dalam beberapa tingkat tertentu.

Kemudian, dinyatakan pula bahwa bukan hanya kesantunan yang merupakan skala; kebijaksanaan juga merupakan persoalan derajat. Akhirnya, Leech (1980) menyatakan bahwa tidak ada pertentangan antara ilokusi langsung dan tidak langsung, yang ada hanyalah derajat kelangsungannya.

Uraian Leech (1980) memberikan kontribusi terhadap pembentukan teori pemakaian bahasa dengan menyumbangkan satu maksim yang dapat diterapkan dalam kesantunan pragmatik. Dia tidak berhasil dalam memberikan penjelasan umum ketidaklangsungan ujaran. Didapatkan bukti dari bahasa Spanyol bahwa ada ketidaklangsungan yang tidak berfungsi untuk menghindari konflik. Selain itu, dalam bahasa lain juga ditemukan bahwa ada pemakaian bahasa yang tidak santun dengan menggunakan ketidaklangsungan.

Leech pada 1983 menyajikan perkembangan model maksim kebijaksanaan, yang telah ditulisnya sendiri pada 1980. Leech (1983) membahas kesantunan berkaitan dengan retorik interpersonal. Berdasar teori filosofis yang sama dan kritik-kritiknya terhadap Searle (1975), dia berusaha melengkapi keterbatasan tulisannya tahun 1980. Hal itu dapat dikemukakan secara ringkas sebagai berikut.

Leech (1983) memandang kesantunan (dan berkaitan dengan konsep "kebijaksanaan") sebagai hal penting dalam upaya menjelaskan "mengapa orang sering bertindak tidak langsung dalam menyampaikan maksud mereka dan sebagai "penyelamatan Prinsip Kerja Sama" dalam arti bahwa kesantunan dapat menjelaskan pengecualian dan penyimpangan Prinsip Kerja Sama dengan sangat memuaskan.

Sulit membuat kesantunan dengan menempatkannya pada penyandian tingkat permukaan yang kemungkinan besar akan melanggar petutur. Akan tetapi, dengan menggunakan ujaran ambivalen (yang memiliki lebih dari satu daya pragmatik potensial), sangat mungkin seseorang menyampaikan pesan yang besar kemungkinan penutur menemukan ketidaksetujuan tanpa menyebabkan pelanggaran yang tidak pantas. Daya pragmatik seperti itu membuat petutur bertanya-tanya: (1) apa sebenarnya daya yang tepat dari pesan itu?; (2) apakah betul hal itu ditujukan kepadanya?

Leech (1983) menempatkan teori kesantunannya setingkat dengan Prinsip Kerja Sama dengan memperkenalkan Prinsip Kesantunan. Secara ringkas prinsip itu berisi saran agar kita meminimalkan ungkapan yang kita yakini tidak santun dan memaksimalkan ungkapan yang kita yakini santun. Menurut Leech (1983), prinsip kesantunan ini berstatus sama dengan Prinsip Kerja Sama Grice (1961), yaitu merupakan bagian dari retorika antarpribadi dan tidak dilaksanakan secara terpisah.

Berkaitan dengan Prinsip Kerja Sama Grice (1961), Leech (1983) menyatakan bahwa dalam batas-batas tertentu dia bersedia menerima Prinsip Kerja Sama Grice (1961) dan tidak mengubahnya. Akan tetapi, dia menambahkan prinsip kesantunan di atas dengan 6 (enam) sub-maksim sebagai “pelengkap” untuk menyelamatkan Prinsip Kerja Sama Grice (1961) dari masalah serius. Leech (1983) merasa perlu merancang prinsip kesantunan untuk menjelaskan pemakaian bahasa yang berkaitan dengan pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam interaksi sosial.

Prinsip Kesantunan yang disusun berdasar format yang sama dengan Prinsip Kerja Sama dianalisis dalam serangkaian maksim, yaitu maksim kearifan/kebijaksanaan (*tact maxim*), maksim kedermawanan (*generosity maxim*), maksim pujian (*approbation maxim*), maksim kerendahan hati (*modesty maxim*), dan maksim kesantunan lain meliputi maksim kesepakatan (*agreement maxim*), maksim simpati (*sympathy maxim*).

Leech (1983) memformulasi semua maksim itu dalam bentuk imperatif. Akan tetapi, hal itu tidak harus diartikan sebagai

“kaidah untuk berperilaku yang baik”. Semua maksim itu perlu diinterpretasikan dipandang dari sudut parameter pragmatik, khususnya berkaitan “diri” (*self*) dengan “liyan” (*the other*). Istilah yang dalam konsep Leech (1983) mengacu kepada petutur maupun orang ketiga yang dibicarakan atau hadir dalam interaksi.

Secara ringkas maksim-maksim yang cenderung berpasangan dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Maksim kearifan (dalam ilokusi impositif dan komisif)
  - a. Buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin
  - b. Buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin
2. Maksim kedermawanan (dalam ilokusi impositif dan komisif)
  - a. Buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin
  - b. Buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin
3. Maksim pujian (dalam ilokusi ekspresif dan asertif)
  - a. Kecamlah orang lain sesedikit mungkin
  - b. Pujilah orang lain sebanyak mungkin
4. Maksim kerendahan hati (dalam ilokusi ekspresif dan asertif)
  - a. Pujilah diri sendiri sesedikit mungkin
  - b. Kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin
5. Maksim kesepakatan (dalam ilokusi asertif)
  - a. Usahakan agar kesepakatan antara diri dengan liyan terjadi sesedikit mungkin
  - b. Usahakan agar kesepakatan antara diri dengan liyan terjadi sebanyak mungkin
6. Maksim simpati (dalam ilokusi asertif)
  - a. Kurangilah rasa antipati antara diri dengan liyan hingga sekecil mungkin
  - b. Tingkatkan rasa simpati sebanyak-banyaknya antara diri dengan liyan

Dapat dilihat bahwa 4 (empat) maksim pertama berpasangan, yaitu (1) dengan (2) dan (3) dengan (4) karena maksim-maksim itu melibatkan skala-skala berkutub dua, yaitu skala untung-rugi dan skala pujian-kecaman. Dua maksim lain melibatkan skala yang hanya satu kutub, yaitu skala kesepakatan dan skala simpati.

Ada satu maksim Leech (1983) yang kurang digeneralisasi, yaitu Prinsip Pollyanna. Prinsip ini menyatakan bahwa orang lebih

suka memandang hidup ini secara positif daripada negatif. Dalam kerangka acuan komunikatif, Prinsip Pollyanna berarti mempostulasikan bahwa para partisipan dalam percakapan lebih menyukai topik-topik yang tidak menyenangkan. Aspek negatif prinsip ini tentunya eufemisme. Artinya, untuk mengacu pada topik-topik yang tidak menyenangkan dan yang ingin ditutupinya penutur menggunakan ungkapan yang tidak menyakitkan hati. Namun, aspek lain ialah kecenderungan untuk mengurangi kejelekan yang ada pada suatu keadaan tertentu. Sehingga, adverbial-adverbial tingkatan seperti *sedikit* dan *agak sedikit*, yang fungsinya 'mengecilkan' arti, khususnya digunakan untuk keadaan yang dinilai negatif. Misalnya, catnya sedikit kotor.

Pada bagian lain, Leech (1983) mengemukakan adanya 3 (tiga) skala yang menunjukkan derajat kearifan untuk tindak direktif. *Pertama*, skala untung rugi. Pada skala ini diperkirakan keuntungan atau kerugian tindakan bagi penutur atau bagi petutur. *Kedua*, skala opsionalitas. Skala ini mengurut ilokusi-ilokusi menurut jumlah pilihan yang diberikan oleh penutur kepada petutur. *Ketiga*, skala ketaklangsungan. Dari sudut pandang penutur skala ini mengurut ilokusi-ilokusi menurut panjang jalan yang menghubungkan tindak ilokusi dengan tujuan ilokusi. Skala ketaklangsungan juga dapat dirumuskan dari sudut pandang petutur, yaitu sesuai dengan panjangnya jalan inferensial yang dibutuhkan oleh makna untuk sampai ke daya.

Selain tiga skala itu, terdapat 2 (dua) skala lagi yang sangat berkaitan dengan kesantunan, yaitu skala yang bertolak dari pendapat Brown dan Gilman (1960) tentang kekuasaan dan solidaritas. Namun, Leech (1983) melihat faktor solidaritas dari arah berlawanan yang disebut jarak sosial. Di sisi lain, Prayitno (2011) menjelaskan bahwa kesantunan merupakan bahasa yang dapat menunjukkan jarak sosial dan peran antara penutur-tindak dalam suatu masyarakat. Sehingga, kesantunan memiliki prinsip berupa hubungan teori maksim percakapan, pandangan norma sosial, teori kontrak percakapan, serta teori penyelamatan muka.

Teori kesantunan Leech (1983) pun tidak lepas dari kritik. Kritik pertama berkaitan dengan pengesampingan jenis

komunikasi tertentu dalam interaksi verbal. Tidak semua komunikasi secara optimal bersifat kooperatif, misalnya tanya jawab di pengadilan, wawancara politik, dan debat. Ketidakooperatifan dan begitu juga kekurangantunan tersebut tidak dijelaskan oleh kedua pakar itu dalam teorinya.

Kritik kedua berkaitan dengan jumlah garis besar maksim: mengapa sembilan sub-maksim teori PK Grice (1961) mendapatkan padanan enam sub-maksim kesantunan Leech (1983)? Padahal, sejak awal Leech (1983) ingin menjelaskan pelanggaran yang terjadi pada PK Grice (1961) dengan teori kesantunannya. Dengan begitu, bagaimana sisa sub-maksim Grice (1961) bisa dijelaskan dengan prinsip kesantunan Leech (1983) yang jumlahnya tidak sepadan?

Di sisi lain, Kdar & Haugh (2013) mengungkapkan bahwa *Cooperative Principle* (CP) memiliki empat *conversational maxims* yaitu *Quality* (harapan bahwa seseorang akan jujur), *Quantity* (harapan bahwa seseorang akan memberikan jumlah informasi yang tepat), *relevance* (harapan bahwa informasi yang diberikan akan relevan), dan *Manner* (harapan bahwa informasinya akan jelas).

Masih berkaitan dengan jumlah maksim, ancaman kesantunan Leech (1983) tampak tidak didukung oleh cara membatasi jumlah maksim. Dengan cara yang dikembangkan seperti di atas, sangat memungkinkan menghasilkan maksim baru untuk menjelaskan tiap hal kecil yang dirasakan merupakan regularitas dalam pemakaian bahasa. Contohnya ialah penerapan Prinsip *Pollyanna*. Hal itu membuat teori Leech (1983) kurang luwes. Ketidakuwesan ancaman Leech (1983) dapat terjadi jika “maksim Leech” dipandang sebagai serangkaian kendala sosial-psikologis pada pemilihan bentuk ungkapan bahasa yang dibuat dalam parameter pragmatik, baik pada tingkat yang lebih besar maupun pada tingkat yang lebih kecil. Beberapa dari kendala itu berlaku (dalam tingkat berbeda) secara universal, yaitu prinsip kesantunan itu sendiri; yang lain mungkin berlaku hanya pada budaya tertentu (tabu, misalnya); maksim lain dapat bersifat idiosinkretik (*Pollyanna*).

#### 4.2.2. Teori Kesantunan Menurut Brown dan Levinson

Secara teoretis, model kesantunan Brown dan Levinson (1987) merupakan sebuah integrasi konsep rasionalistik implikatur percakapan (Grice, 1961), tindak tutur tidak langsung (Searle, 1975), dan konsep interaksi sosial (Goffman, 1967). Berkaitan dengan Prinsip Kerja Sama Grice (1961), mereka berasumsi teori bahwa kesantunan yang mereka kembangkan itu merupakan koreksi umum atas pandangan Grice (1961) tentang interaksi percakapan. Dengan tidak mematuhi Prinsip Kerja Sama Grice (1961) secara ketat, hal itu berarti penutur menerapkan kesantunan. Meskipun begitu, mereka mengakui bahwa kesantunan bukanlah satu-satunya alasan bagi penutur untuk tidak mematuhi Prinsip Kerja Sama dalam percakapan. Alasan lain ialah penutur ingin mengungkapkan humor, ironi, atau sarkasme.

Brown dan Levinson (1987) menggabungkan konsep-konsep di atas dengan memformulasikan *Model Person* (MP). Seorang peserta komunikasi yang kompeten dan menguasai kaidah-kaidah pemakaian bahasa yang benar dan tepat (*Model Person*) akan selalu memegang teguh 2 (dua) prinsip, yaitu rasionalitas dan muka. Mereka beranjak dari pemikiran bahwa setiap manusia melakukan tindakan rasional untuk mencapai pemuasan keinginan tertentu (*wants*). Keinginan yang berkaitan dengan konsep kesantunan ialah keinginan melindungi muka. Dengan rasionya ia akan berusaha untuk mencapai tujuan komunikasi. Sementara itu, dengan kesadaran muka ia akan berusaha memenuhi 2 (dua) keinginan, yakni ingin dihargai dan tidak ingin dipaksa. Sehingga, muka sebagai istilah teknis berarti 'citra diri publik seseorang'.

Konsep muka diperoleh dari Goffman (1967) dan selanjutnya dikembangkan oleh Brown dan Levinson (1987). Konsep muka bertalian dengan istilah dalam masyarakat Inggris—yang juga ada dalam banyak bahasa lain—tentang *lost face* dalam arti 'dipermalukan atau dihina'. Dalam bahasa Indonesia pun ada ungkapan seperti kehilangan muka, menyembunyikan muka, menyelamatkan muka, dan tebal muka. Konsep ini mengakui



kesantunan sebagai tindakan ritual dan mempertahankan “muka” dalam interaksi merupakan unsur utama dalam konsep kesantunan yang berterima. Dengan kata lain, muka ialah sesuatu yang secara emosional dicurahkan, dan dapat hilang, dipertahankan, atau ditingkatkan, dan harus diperhatikan secara konstan dalam interaksi.

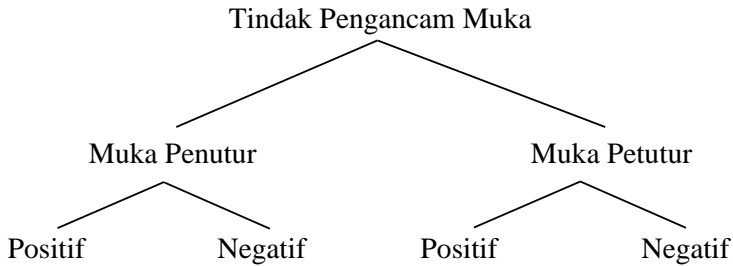
Brown dan Levinson (1987) memperlakukan aspek muka sebagai “keinginan dasar”. Mereka membedakan muka positif dan muka negatif. Muka negatif mengacu pada citra diri seseorang yang berkeinginan agar ia dihormati dengan dibiarkan bebas melakukan apa yang diinginkannya. Karena itu, kesantunan negatif berkaitan dengan keinginan tiap orang untuk bebas bertindak, tidak dihalangi oleh orang lain, terbebas dari tekanan. Jika yang dikemukakan ialah tindak tutur direktif, misalnya, yang terancam ialah muka negatif petutur. Dinyatakan demikian karena dengan meminta orang lain untuk melakukan sesuatu, penutur sebenarnya menghalangi, kebebasan dia untuk melakukan tindakannya atau bahkan kebebasan dia menikmati tindakannya. Sebuah penawaran (*offer*) pun dapat mengancam muka negatif penutur karena dengan penawaran petutur harus bersedia melakukan apa pun keputusan penutur.

Selanjutnya, Meyerhoff (2006) menyatakan bahwa orang dalam kelompok yang lebih berorientasi pada keinginan wajah negatif (*negative face*) dan kesantunan negatif (*negative politeness*) berkemungkinan untuk menemukan bahwa mereka dianggap menyendiri atau dingin ketika mereka pindah ke suatu tempat kesantunan positif lebih dominan. Mereka mungkin juga salah mengira beberapa tindakan kesantunan positif yang konvensional sebagai ungkapan persahabatan atau kedekatan yang 'asli'. Sebaliknya, orang yang terbiasa memperhatikan keinginan wajah positif (*positive face*) dan menggunakan strategi kesantunan positif (*positive politeness*) mungkin akan dianggap tidak canggih atau vulgar jika mereka berada dalam komunitas yang lebih berorientasi pada keinginan wajah negatif.

Sementara itu, muka positif mengacu pada citra diri yang berkeinginan agar apa yang dilakukan dan dimilikinya, termasuk

nilai yang diyakini, diakui atau dihargai oleh orang lain. Jadi, muka positif berkaitan dengan keinginan tiap orang untuk dihargai orang lain. Misalnya, ada orang yang telah bersusah payah belajar dan mendapatkan IP 3,50. Kemudian, orang lain berkata: “*Ah, IP 3,50 itu belum ada apa-apanya.*” Dengan ujaran itu, petutur akan merasa tidak dihargai atas apa yang telah diraihinya yang dapat mengakibatkan terancamnya muka positif petutur. Ungkapan ketidaksetujuan (*disagreement*) juga dapat mengancam muka positif petutur sebab ungkapan ketidaksetujuan itu mengandung arti bahwa ada sesuatu yang salah dengan pendapat yang diajukan petutur.

Brown dan Levinson (1987) menyatakan bahwa banyak tindak tutur yang secara intrinsik mengancam muka. Tindak itu diacu sebagai Tindak Pengancam Muka (*Face Threatening Acts*), yang selanjutnya disingkat TPM. Petutur dalam interaksi berorientasi, baik kepada mukanya sendiri maupun muka petutur. Dengan begitu, terdapat 2 (dua) orientasi, yaitu orientasi defensif yang mengarah pada penyelamatan muka sendiri dan orientasi protektif yang mengarah pada penyelamatan muka petutur. Orang diharapkan mempertahankan muka sendiri jika terancam. Namun, ketika mempertahankan mukanya sendiri, mereka mengancam muka orang lain. Selanjutnya, pada umumnya hal itu akan memunculkan keinginan antarpartisipan untuk mempertahankan muka masing-masing pihak dan bekerja sama dalam mempertahankan muka selama berlangsungnya interaksi. Dengan kata lain, keterancaman muka dapat dialami baik oleh petutur maupun penutur, baik pada muka positif maupun positif. Hal itu dapat dibagikan dalam bentuk sebagai berikut.



**Gambar 1.**

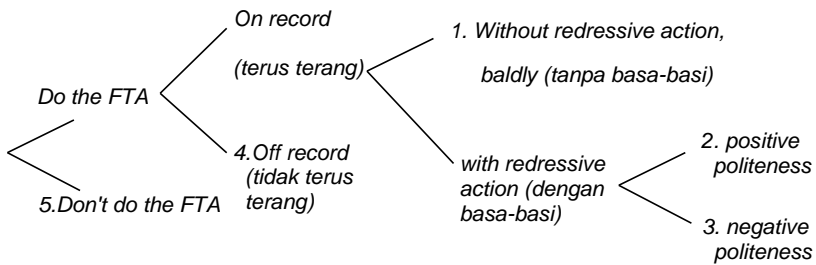
*Tindak Pengancam Muka*

Sumber: Brown dan Levinson (1987)

Berdasar konsep seperti terbagikan di atas, Brown dan Levinson (1987) membedakan berbagai jenis TPM secara rinci. Setiap pelaku yang rasional akan berusaha menghindari TPM. Namun, jika terpaksa, ia akan memakai strategi tertentu untuk mengurangi tingkat ancaman. Dengan kata lain, ia akan mempertimbangkan 3 (tiga) keinginan, yaitu keinginan untuk mengomunikasikan TPM, keinginan untuk bertindak efisien dan urgen, dan keinginan untuk menjaga muka petutur.

Kerja sama antarpeserta komunikasi dalam upaya saling menjaga muka perlu dilakukan karena kerawanan muka tiap partisipan. Jika kerja sama itu tidak terjadi, seorang peserta komunikasi akan bertindak menjaga/melindungi mukanya sendiri, yang ditandai oleh adanya ungkapan dan kepentingan yang egois, langsung, dan efisien.

Konsep “muka” dan gagasan “kerja muka (*face-work*)” digunakan Brown dan Levinson (1987) untuk membangun model dasar deskripsi kesantunan verbal seperti yang ditunjukkan pada bagan berikut, yang dapat dianggap sebagai superstrategi untuk melakukan TPM.



**Gambar 2.**

*Model Dasar Deskripsi Kesantunan Verbal*

Sumber: Brown dan Levinson (1987)

Berdasar bagan di atas, menurut Brown dan Levinson (1987), keputusan pertama yang dibuat penutur ialah apakah ia akan melakukan TPM atau tidak. Jika penutur memutuskan melakukan TPM, ada 4 (empat) kemungkinan yang dapat dipilih, yaitu 3 (tiga) *set superstrategis on record*: melakukan TPM apa adanya (*bald on record*), melakukan TPM on record dengan menggunakan kesantunan positif, melakukan TPM on record dengan menggunakan kesantunan negatif dan satu strategi pelunakan (*off record*). Jika penutur mempertimbangkan tingkat keterancaman muka begitu besar, dia menghindari TPM dengan diam (strategi 5). Hal itu diuraikan secara sepintas berikut ini.

Jika seseorang memilih strategi on record, hal itu berarti penutur mengungkapkan maksudnya secara jelas dan tidak taksa. Misalnya, seseorang berkata (49) *Saya berjanji akan datang besok*.

Jika penutur dan petutur menyetujuinya, dengan mengatakan ujaran itu penutur mengungkapkan maksudnya tanpa ketaksaan untuk melakukan tindakan di waktu mendatang.

Ada 2 (dua) kemungkinan berkaitan dengan strategi ini, yaitu penutur dapat mengungkapkan maksudnya tanpa *redressive action*, yaitu *baldly on record* atau penutur dapat memilih menggunakan strategi untuk meminimalisasi TPM yang diacu sebagai "*redressive action*".

Jika penutur memilih strategi *bald on record*, hal itu berarti penutur melakukan tindakan verbal dengan cara paling singkat,

lugas dan langsung, apa adanya atau tanpa basa basi. Contohnya, seseorang yang memberi perintah langsung (50) *Tutup pintu itu.*

Dalam hal ini, jelas bahwa penutur menyuruh petutur untuk menutup pintu. Pada umumnya, TPM dilakukan dengan strategi ini jika penutur tidak mengkhawatirkan balas jasa dari petutur dengan pertimbangan

- a. penutur dan petutur sama-sama mengerti akan pentingnya suatu tindakan sehingga penutur dan petutur setuju untuk mengabaikan “muka” karena keadaan mendesak atau efisiensi (*urgency and efficiency*);
- b. bahaya keterancaman muka sangat kecil, seperti dalam penawaran,
- c. penutur jauh lebih superior (*more powerful*) daripada petutur sehingga penutur dapat mengancam muka petutur tanpa kehilangan mukanya sendiri.

Jika penutur memilih *on record with redressive action* (dengan basabasi), penutur memberikan “muka” kepada petutur, yakni dengan meminimalkan ancaman terhadap muka dengan cara melakukannya sedemikian rupa atau memodifikasi atau dengan tambahan-tambahan lain yang dapat menunjukkan bahwa tidak ada ancaman muka yang diinginkan. Penutur secara umum memperhatikan keinginan muka petutur dan keinginan mukanya sendiri.

Strategi ini dapat dilakukan dengan memilih salah satu dari dua, bentuk kesantunan, yaitu kesantunan negatif atau positif. Hal itu bergantung pada aspek muka mana yang ditekankan. Dalam pemakaian strategi kesantunan negatif, seperti meminimalisasi, memperlemah, dan menghindari pelanggaran, penutur mengakui “wilayah” pribadi dan kebebasan pribadi petutur untuk bertindak. Itu berarti penutur telah mengancam muka petutur atau melakukan TPM, namun penutur mengurangi ancaman muka tersebut dengan tetap menunjukkan perhatian terhadap muka negatif petutur, yaitu bebas dari paksaan. Sebagai contoh, seseorang akan mengatakan

(51) *Saya tidak ingin mengganggu Anda, tetapi maukah Anda melakukan sesuatu untuk saya?*

Kesantunan negatif bertujuan melindungi muka negatif petutur, yang diungkapkan dalam bentuk kesabaran (tidak emosional), formalitas, dan menjaga jarak. Tendensi pemakaian bentuk kesantunan negatif menekankan hak petutur akan kebebasan. Strategi ini biasa disebut strategi penghormatan atau kesantunan formal.

Jika seorang penutur menggunakan strategi kesantunan positif, misalnya pengintensifan strategi, penutur dapat menunjukkan penghargaan terhadap citra diri petutur. Pada dasarnya, dengan menggunakan kesantunan positif ini, penutur telah mengancam muka petutur, namun ia berusaha mengurangi ancaman tersebut dengan memberikan perhatian terhadap muka positif petutur. Misalnya, dalam sebuah diskusi, seseorang berkata

(52) *Pada dasarnya saya setuju dengan pendapat Anda, tetapi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Anda.*

Kesantunan positif bertujuan melindungi muka positif petutur, yang diungkapkan dalam bentuk solidaritas, informalitas, dan familiaritas. Tendensi pemakaian kesantunan positif menekankan kedekatan antara penutur dan petutur. Dengan demikian, kesantunan positif berorientasi pada solidaritas yang menekankan tenggang rasa dan nilai serta meminimalisasi perbedaan status.

Strategi pelunakan (*off record*) digunakan ketika seorang penutur melakukan tindakan yang taksa sehingga ia dapat tetap menjaga kemungkinan luntuk mengingkari suatu maksud jika mukanya terancam. Ketaksaan itu menimbulkan multiinterpretasi pada petutur, yang mungkin berbeda dengan maksud penutur. Contohnya ialah

(53) Anak: *Yah, dapatkah ayah memperbaiki sepedaku?*

Ayah: *Aduh, ayah lagi sibuk.*

Anak: *Aku kan hanya ingin tahu apakah Ayah memang betul-betul bisa memperbaiki sepeda.*

Pada contoh itu dapat dipahami bahwa si anak bermaksud meminta tolong kepada ayahnya untuk memperbaiki sepedanya. Namun, ketika muka si anak terancam karena penolakan yang dilakukan ayahnya dengan alasan sibuk, anak itu mengingkari maksudnya dengan menyatakan bahwa ia hanya ingin sekadar

mengetahui apakah ayahnya mampu melakukannya atau tidak. Dengan demikian, anak itu tetap dapat mempertahankan mukanya sendiri.

Dengan *off record*, di dalam melakukan tindak tutur terkandung lebih dari satu maksud yang tersirat sehingga penutur tidak dapat menyatakan dirinya pada sebuah maksud tertentu. Contoh lain ialah

(54) *Busyet! Saya kehabisan uang tunai. Kemarin saya lupa pergi ke bank.*

Dengan mengujarkan ujaran seperti itu, penutur mungkin mengharapkan petutur untuk meminjamkan uang kepadanya. Akan tetapi, penutur tidak mengungkapkannya secara pasti.

Menurut Brown dan Levinson (1987), semakin besar risiko keterancaman muka, pilihan strategi akan jatuh pada nomor makin besar, yaitu strategi dengan tidak melakukan TPM. Hal itu berarti seseorang tidak melakukan tindakan apa pun yang dapat mengancam muka. Ada kalanya sesuatu sangat berpotensi mengancam muka sehingga kita diam saja. Brown dan Levinson tidak mendiskusikan strategi ini lebih jauh.

Akan tetapi, Tanaka (dalam Thomas, 1983) membahas dua hal yang berkaitan dengan “tidak berkata apa-apa” dengan istilah *opting out choice* (OOC). Ada kalanya penutur memutuskan untuk tidak berkata apa-apa dan dengan ikhlas ingin membatalkannya. Namun, pada kesempatan lain individu memutuskan tidak berkata apa-apa (memutuskan tidak mengeluhkan sesuatu, misalnya), tetapi masih ingin mencapai pengaruh seperti halnya pengaruh yang dicapai melalui tindak tutur. Dia membedakan 2 (dua) hal itu dengan uraian berikut:

- OOC : tulus Penutur tidak melakukan tindak tutur dan secara tulus bermaksud tetap ingin diam. Penutur tidak bermaksud mencapai pengaruh perlokusi.
- OOC strategis : Penutur tidak melakukan. tindak tutur, tetapi dia tetap berharap petutur menginferensikan keinginannya untuk mencapai pengaruh perlokusi.

Selain itu, ada situasi ketiga, yakni ada keinginan kuat untuk mengungkapkan sesuatu, tetapi orang tersebut tidak mengatakan apa-apa. Hal itu dapat dianggap sebagai TPM secara besar-besaran dalam dirinya sendiri (misalnya gagal mengungkapkan bela sungkawa kepada seseorang pada kematian orang yang dicintai).

Berbagai strategi di atas digunakan untuk menjaga agar partisipan dalam berkomunikasi tidak kehilangan muka. Pada umumnya, muka seseorang bergantung pada muka orang lain yang dipertahankan. Karena itu, partisipan dalam komunikasi harus saling berusaha menjaga muka dari keterancamannya.

Pemilihan strategi itu bergantung pada perkiraan penutur atas risiko kehilangan muka. Keseriusan tekanan, diacu sebagai beratnya tekanan yang dinilai berdasar 3 (tiga) faktor, yaitu hubungan kekuasaan antara penutur dan petutur, jarak sosial antara penutur dan petutur, dan keabsolutan imposisi sebuah ujaran dalam konteks sosial. Ketiga faktor itu memberi dasar bagi penutur dalam mempertimbangkan bagaimana dia bertindak mengancam muka dengan menentukan strategi verbal yang diperlukan untuk menamengi beratnya tekanan. Lebih jauh lagi, Brown dan Levinson (1987) menyatakan bahwa strategi kesantunan positif, negatif, dan pelunakan memiliki sub-strategi yang lebih rinci.

Alabdali (2019) mempercayai bahwa model kesantunan yang diusulkan oleh Brown and Levinson (1987) cukup komprehensif dan dicontohkan secara menyeluruh. Model tersebut dapat diterapkan, di sebagian besar, bahkan dalam studi yang mengklaim bahwa model tersebut penyimpangan-Barat dan terutama untuk budaya non-Barat. Aspek umum yang sebenarnya dari model ini adalah hubungan yang diusulkan antara ketidaklangsungan dan kesantunan. Untuk itu, model tersebut perlu dipertimbangkan kembali dengan potensi untuk memasukkan lebih banyak strategi luaran dan pertimbangan faktor ekstralinguistik lainnya dalam penilaian kesantunan dalam tuturan.

Akan tetapi, Al-Hindawi dan Alkhazaali (2016) berpendapat bahwa secara umum, teori Brown dan Levinsons



tidak mendefinisikan teori kesantunan dengan baik dan model Leech juga terbatas pada beberapa tindak tutur. Serta, modelnya tidak jelas apakah mencakup aspek budaya tertentu maupun lintas budaya. Secara umum, *face theory* menyiratkan masalah bagaimana mendefinisikan dengan benar pengertian wajah dan permasalahan bagaimana membatasi efek mengancam dari beberapa tindakan dan fungsi tindak tutur.

# BAB 5

## TINDAK TUTUR MEMOHON DAN KESANTUNAN

---

### 5.1. Tindak Tutur Memohon

Pada tataran yang lebih jauh, strategi penutur membuat permohonan dimotivasi oleh keinginannya untuk menjadi orang yang santun. Ada beberapa contoh strategi kesantunan, yang biasa digunakan penutur dalam berkomunikasi, misalnya pemakaian pertanyaan alih-alih permohonan langsung, pemilihan bentuk saran-daripada permohonan langsung, pemilihan verba bantu modal, pemilihan subjek, pemberian alasan untuk melakukan suatu tindak daripada menyatakan keinginan seseorang secara kasar, dan memperlunak daya tindak tutur impositif.

Untuk membahas perihal tersebut, hubungan antara tindak memohon dan kesantunan harus dijelaskan. Masalah sosial tindak tutur dapat mengungkapkan sikap positif kepada petutur. Leech (1983) menyebutnya sebagai ungkapan penghargaan (tindak tutur menyenangkan/ramah tamah). Tindak tutur menyenangkan dipertentangkan dengan tindak tutur lain seperti tindak mengancam yang secara inheren bersifat agresif (tindak tutur konfliktif). Tindak permohonan sendiri berbeda dengan tindak agresif, tetapi secara potensial tetap saja dapat bersifat ofensif atau mengancam karena tindak memohon membatasi keleluasaan pribadi (*privacy*) seseorang yang diminta untuk melakukan suatu tindak yang dimaksudkan dalam tindak memohon. Karena itu, ditemukan sejumlah tindak memohon tidak langsung. Dengan begitu, kesantunan akan timbul dari keseimbangan interaksional antara kejelasan pragmatik dan ketidakmemaksaan yang dicapai oleh berbagai strategi dalam bertindak tutur memohon.

Dalam taksonomi Leech (1983), tindak tutur memohon merupakan ilokusi kompetitif, yaitu tujuan ilokusi bersaing dengan tujuan sosial. Tindak tutur kompetitif pada dasarnya adalah tujuan-



tujuan yang tidak bertata krama (*discourteous*). Karena itu, tindak tutur ini memerlukan strategi kesantunan negatif yang berkontribusi untuk “meminimalisasi ilokusi tidak santun”.

**5.2. Skala Pengukuran Kesantunan**

Leech (1983) menambahkan ada 3 (tiga) skala yang dipakai untuk mengukur derajat kesantunan sebuah tindak tutur direktif, yaitu skala biaya-keuntungan, skala keopsionalan, dan skala ketidaklangsungan.

Skala biaya keuntungan dipakai untuk “menghitung” biaya dan keuntungan untuk melakukan tindakan. Dalam kaitannya dengan penutur dan petutur, skala ini menjelaskan mengapa, walaupun sama-sama bermodus imperatif (dan intonasi seita nada bertutur juga sama), ujaran-ujaran berikut makin ke bawah makin santun. Contoh-contoh diambil dari Gunarwan (1992).



**Tabel 2.**  
*Skala Biaya*

	Biaya bagi Petutur	Keuntungan Santun
1. Bersihkan toilet saya.		
2. Kupaskan mangga ini.		
3. Ambilkan koran di meja itu.		
4. Beristirahatlah.		
5. Dengarkan lagu kesukaanmu.		
6. Minum kopinya.		
	Keuntungan bagi Penutur	Lebih Santun

Sumber: Gunarwan (1992)

Skala kedua ialah skala opsionalitas, yaitu skala yang dipakai untuk menghitung berapa banyak penutur memberi petutur pilihan dalam melaksanakan tindakan. Makin banyak pilihan, ujaran terdengar makin santun. Berikut ini adalah contoh yang diambil dari Gunarwan (1992).

**Tabel 3.**  
*Skala Opsionalitas*

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pindahkan kotak ini.</li> <li>2. Kalau tidak lelah, pindahkan kotak ini.</li> <li>3. Kalau tidak lelah dan ada waktu, pindahkan kotak ini.</li> <li>4. Kalau tidak lelah dan ada waktu, pindahkan kotak ini kalau kamu mau.</li> <li>5. Kalau tidak lelah dan ada waktu, pindahkan kotak ini. Itu kalau kamu mau dan tidak keberatan.</li> </ol>	<p align="center">Lebih sedikit Pilihan</p>  <p align="center">Lebih banyak Pilihan</p>	<p align="center">Keuntungan Santun</p>  <p align="center">Lebih Santun</p>
--	--	--

Sumber: Gunarwan (1992)

Skala ketiga ialah skala ketidaklangsungan ujaran. Kesantunan permohonan tidak langsung muncul dari kebutuhan membuat permohonan yang memungkinkan "petutur untuk lebih mudah tidak melakukan atau mematuhi permohonan petutur. Hal itu berkaitan dengan ketidaklangsungan atau ketentatifan. Ujaran (55) Maukah Anda mengangkat telepon itu?

Merupakan tindak memohon yang santun karena penutur memberikan kebebasan kepada petutur untuk memilih apakah petutur mau atau tidak melakukan tindak permohonan itu. Pada skala ketidaklangsungan berikut ini, isi proposisional permohonan sama, tetapi ilokusi berbeda berkaitan dengan ketidaklangsungan atau kesantunan.

**Tabel 4.**  
*Skala Ketidaklangsungan*

	Lebih Langsung	Kurang Santun
1. Angkat telepon!	↑	↑
2. Saya ingin kamu angkat telepon.	↑	↑
3. Maukah Anda-mengangkat telepon?	↑	↑
4. Dapatkah Anda mengangkat telepon?	↑	↑
5. Apakah Anda keberatan megangkat telepon?	↑	↑
6. Apa mungkin Anda mengangkat telepon?	↑	↑
	Kurang Langsung	Lebih Santun

Sumber: Gunarwan (1992)

Seperti tampak pada contoh di atas, bentuk imperatif merupakan bentuk alternatif paling langsung karena keinginan penutur diungkapkan tanpa pagar (*hedge*) sama sekali. Sama halnya dengan (1), ungkapan eksplisit penutur pada (2) memberi sedikit pilihan kepada petutur untuk tidak melakukan permohonan dan hal itu selanjutnya berkait erat dengan kelangsungan tujuan. Varian (3) – (6) ditempatkan pada skala dalam urutan peningkatan ketrdaklangsungan dan opsionalitas. Pada contoh tersebut, derajat ketaklangsungan tidak hanya berkorelasi dengan derajat kesantunan, tetapi juga berkorelasi dengan derajat kebebasan petutur untuk memilih tidak melakukan tindakan yang dimaksudkan oleh penutur, yaitu mengangkat telepon pada contoh di atas. Sehingga, inti strategi ketidaklangsungan di sini ialah membawa ilokusi impositif semakin dekat ke arah suatu pilihan negatif sehingga semakin mudah bagi petutur untuk mengatakan “tidak” kepada penutur. Dengan cara ini, kesantunan negatif (misalnya dengan cara menghindari agar petutur tidak rugi) semakin dapat diwujudkan.

Kesahihan skala peringkat kesantunan berkaitan dengan ketidaklangsungan telah dites secara eksperimental dengan hasil yang cukup menarik. Mohan (yang dilaporkan Perkins dalam Aijmer, 1996) menyatakan, misalnya, butir ujaran yang memiliki bentuk interogatif dinilai sebagai bentuk permohonan paling santun di antara sejumlah besar ungkapan permohonan. Dia juga menemukan bahwa *you can* dianggap lebih santun daripada *you will* karena petutur diberi lebih banyak pilihan untuk menolak melakukan permohonan. Pengujian skala seperti itu juga dilakukan oleh Fraser dan Nolen (1981), Blum-Kulka (1987), dan Gunarwan (1995). Skala tersebut menjelaskan adanya kesahihan antara hubungan ketidaklangsungan dan kesantunan.

Berdasar hal itu, Aijmer (1996) menyatakan bahwa kesantunan merupakan ciri penting dari beberapa bentuk permohonan yang dapat diidentifikasi dengan tipe strategi sehingga dapat dideskripsikan bentuk permohonan berkaitan dengan kesantunan. Permohonan paling langsung atau asertif merupakan ungkapan keinginan penutur secara langsung, tanpa mempertimbangkan petutur. Permohonan bersifat tentatif jika keinginan dan pilihan petutur dipertimbangkan dalam membuat tindak tutur merhohon.

# BAB 6

## RAGAM KAJIAN TERKAIT TINDAK TUTUR

---

Tindak tutur direktif, terutama tindak tutur memohon, mendapat banyak sekali perhatian dalam studi pemerolehan bahasa kedua/asing. Ada 3 (tiga) alasan atas terjadinya hal tersebut. *Pertama*, tindak tutur itu merupakan tindak pengancam muka sehingga memerlukan sejumlah keahlian kebahasaan yang ada pada diri pemelajar. *Kedua*, tindak tutur itu berbeda dalam lintas kebahasaan. *Ketiga*, tindak tutur itu seringkali direalisasikan dengan cara yang dapat diidentifikasi secara jelas.

Pada bagian ini dikemukakan beberapa hasil studi yang berkaitan dengan topik kesantunan direktif, antara lain:

### 6.1. Shosana Blum-Kulka

Blum-Kulka, S. (1982). Learning to Say What You Mean in a Second Language: A Study of the Speech Act Performance of Learners of Hebrew as a Second Language. *Applied Linguistics*, 3, 29-59

Studi ini beranjak dari pemahaman tentang hubungan yang erat antara kaidah bahasa dan kaidah sosial yang menentukan keefektifan pemakaian bahasa dalam konteks. Aspek tertentu dari ciri komunikatif pemakaian bahasa ditentukan oleh budaya. Berdasar hal itu, muncul pertanyaan: dapatkah pemelajar bahasa kedua memperoleh pengetahuan tentang semua ciri penting komunikatif untuk pemakaian bahasa yang efektif dalam bahasa sasaran? Blum-Kulka (1982) berusaha menjawab pertanyaan tersebut dengan menyoroti pemerolehan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai fungsi komunikatif tertentu (melakukan tindak tutur, khususnya tindak tutur direktif dalam bahasa kedua). Tujuan utama penelitian ini ialah diketahuinya pemerolehan pengetahuan tentang performansi tindak tutur tidak langsung dalam bahasa kedua.

Blum-Kulka (1982) menggunakan kerangka teori tindak tutur dan ketidak langsung ujaran sebagai fenomena sosial dengan menggunakan rancangan studi eksperimen. Subjek yang terlibat ialah 1) 44 pemelajar dewasa bahasa Ibrani, yang semuanya penutur jati bahasa Inggris pada Universitas Michigan; 2) 32 penutur dewasa bahasa Ibrani, yang semuanya berada di Universitas Ibrani, Jerusalem; dan 3) kelompok tambahan, yang terdiri atas 10 orang dewasa penutur asli bahasa Inggris, semua peserta Program Pascasarjana di *Modern Language Centre pada The Ontario Institute for Studies in Education, Toronto*.

Instrumen yang digunakan ialah tes melengkapi wacana (*discourse completion test*), yang terdiri atas tujuh belas butir soal. Butir tes disusun untuk mengumpulkan 1) jenis-jenis tindak direktif, 2) pemakaian pemarkah tindak tutur direktif dalam bahasa Ibrani, dan 3) interpretasi subjek studi tentang realisasi tindak tutur yang dikendalikan oleh pragmatik lintas budaya.

Prosedur yang dilakukan dapat dikemukakan sebagai berikut. Tes melengkapi wacana (*discourse completion test*) versi bahasa Ibrani diberikan kepada kelompok penutur jati bahasa Ibrani (di Israel) dan kepada kelompok pemelajar bahasa Ibrani di Universitas Michigan. Versi tes dalam bahasa Inggris diberikan kepada kelompok penutur jati bahasa Inggris.

Hasil studi menunjukkan bahwa pemelajar bahasa kedua melakukan penyimpangan dalam melakukan tindak tutur direktif dari pemakaian penutur jati pada 3 (tiga) tataran keberterimaan, yaitu keberterimaan sosial, kebahasaan, dan pragmatik.

#### 1) Keberterimaan sosial

Distribusi respons pemelajar untuk tiap butir berbeda secara signifikan dari penutur jati. Dalam konteks tertentu, pemakaian bahasa pemelajar menyimpang dari pemakaian bahasa oleh penutur jati dengan merealisasikan tindak tutur mereka dengan bentuk yang sangat jarang digunakan oleh penutur jati, yaitu bentuk yang tidak berterima oleh sebagian besar penutur jati. Pada tingkat kelangsungan ujaran, pemelajar bahasa Ibrani cenderung memilih bentuk kurang langsung dari bentuk yang biasa dipakai penutur jati bahasa



Ibrani. Hal itu dapat dianggap sebagai bukti adanya transfer norma sosial.

2) Keberterimaan kebahasaan

Penyimpangan dari keberterimaan kebahasaan dalam ujaran tampak dalam ujaran yang gramatikal secara sempurna, tetapi gagal dalam penyampaian realisasi tindak tutur idiomatik.

3) Keberterimaan pragmatik-pergeseran dalam daya ilokusi

Akibat paling serius dari penyimpangan dalam realisasi tindak tutur ialah penggeseran yang tidak dimaksudkan dalam daya pragmatik ujaran. Pelanggaran kaidah kepatutan dapat juga menyebabkan penggeseran daya pragmatik. Kegagalan memarkahi tindak tutur juga menjadi sumber lain dari ketidakpatutan pragmatik. Pemelajar tidak menunjukkan adanya upaya untuk memarkahi isyarat umum seperti yang dilakukan penutur jati.

Berdasar hasil analisis, Blum-Kulka (1982) berkesimpulan bahwa penutur jati mengetahui, dalam bahasa pertamanya, alternatif kebahasaan yang tersedia untuk mencapai tujuan komunikatif dan hubungan sistematis antara berbagai alternatif tersebut serta ciri konteks sosial. Pada saat penutur tersebut belajar bahasa kedua, biasanya pemelajar berharap menemukan cara langsung dan tidak langsung yang sepadan untuk menyampaikan maksudnya, yang ditentukan oleh sistem norma sosial yang akrab. Sekali dia menemukan tingkat kompetensi linguistik tertentu, pemelajar akan mencoba menggerakkan berbagai jenis kompetensi fungsional dalam mencapai tujuan komunikatifnya. Pragmatik sebagai komponen non-linguistik dari kompetensi komunikatif umumnya akan memungkinkannya menghubungkan informasi linguistik pada konteks-situasional dan menerima keberadaan cara langsung dan tidak langsung dalam bahasa sasaran. Meskipun begitu, hakikat kompleks dari saling ketergantungan antara linguistik pragmatik dan faktor sosial dalam bahasa seringkali menghalanginya dalam pencapaian maksud.

## 6.2. Shigenori Tanaka dan Kawade Saiki

Tanaka, S., & Kawade, S. (1982). Politeness strategies and second language acquisition. *Studies in second language acquisition*, 5(1), 18-33.

Tulisan ini memaparkan 2 (dua) jenis studi, yaitu konsep kesantunan seperti dirasakan oleh penutur jati bahasa Inggris dan pemelajar bahasa Inggris tingkat lanjut. Dari sudut pandang teoretis, studi pertama memusatkan perhatian pada pernyataan Lakoff (1973) bahwa kesantunan meningkat dengan menurunnya tekanan (*imposition*). Sedangkan studi kedua memusatkan perhatian pada hipotesis jarak-kesantunan, yang memprediksi bahwa seseorang akan menggunakan strategi kesantunan dalam situasi penutur memiliki jarak psikologis dan atatusosial dengan petutur.

Pada studi pertama, penulis artikel ini memusatkan perhatian pada 3 (tiga) hal. *Pertama*, apakah penutur jati bahasa Inggris benar-benar sadar tentang berbagai tingkat kesantunan, yang disampaikan melalui tindak tutur memohon (*request*) tertentu dalam bahasa Inggris? *Kedua*, apakah pemelajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua tingkat lanjut sensitif terhadap berbagai tingkat kesantunan yang disampaikan melalui tindak tutur memohon tertentu dalam bahasa Inggris? *Ketiga*, adakah korelasi yang tinggi antara penutur jati bahasa Inggris dengan pemelajar bahasa Inggris dalam penilaian kesantunan mereka?

Untuk mengumpulkan penilaian kesantunan, Tanaka dan Kawade (1982) menggunakan teknik pengurutan tingkat kesantunan dari 12 (dua belas) kalimat permohonan dalam bahasa Inggris. Studi ini menemukan, *pertama*, penutur jati bahasa Inggris sadar akan berbagai tingkat kesantunan, begitu juga pemelajar. *Kedua*, dalam penilaian kesantunan mereka, ada korelasi yang tinggi antara penutur jati bahasa Inggris dan pemelajar bahasa Inggris. Namun, pemelajar cenderung *oversensitive* pada perbedaan kesantunan mereka dalam bahasa Inggris.

Namun, studi ini mengabaikan peran konteks. Karena itu, hasil studinya tidak dapat menjelaskan apa-apa tentang pengaruh faktor situasional pada penilaian bentuk kebahasaan tertentu.

Apakah penutur jati bahasa Inggris menggunakan bentuk santun dalam situasi santun dan bentuk kurang santun dalam situasi kurang santun? Bagaimana halnya dengan pemelajar bahasa Inggris? Pertanyaan tersebut menggoda diri Tanaka dan Kawade untuk melakukan studi lebih lanjut.

Pada studi kedua, Tanaka dan Kawade menguji 6 (enam) strategi permohonan, yang dipilih dari 10 (sepuluh) kalimat permohonan dalam studi pertama. Mereka secara teoretis menyatakan sikapnya bahwa kesantunan sebagai strategi berkaitan dengan jarak, yaitu jarak sosial: variabel usia, jenis kelamin, status sosial, dan sebagainya dan jarak psikologis yang berkaitan dengan cara seseorang menerima orang lain berkaitan dengan dirinya sendiri, yaitu variabel suka-tidak suka.

Ada 2 (dua) pertanyaan yang hendak dicari jawabnya melalui studi ini. *Pertama*, apakah penutur jati bahasa Inggris benar-benar menggunakan strategi “santun” dalam situasi “berjarak” dan strategi “kurang santun” dalam situasi “akrab”? *Kedua*, apakah pemelajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua juga menggunakan strategi yang sama dalam dua situasi tersebut?

Hasil studi menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kesantunan pada diri seseorang dengan meningkatnya jarak, baik jarak sosial dan/atau psikologis. Ketika seseorang merasakan dirinya berjarak dari petutur, orang tersebut akan menggunakan strategi santun dalam melakukan tindak tutur memohon, begitu juga sebaliknya. Selain itu, studi ini juga menunjukkan empat hal. *Pertama*, penutur jati bahasa Inggris menggunakan strategi kesantunan yang berbeda sesuai dengan situasi yang berbeda, yaitu mereka menggunakan strategi santun dalam situasi berjarak dan kurang santun dalam situasi yang akrab. *Kedua*, tampak menjadi kaidah umum yang dapat diikuti dalam berbagai situasi, yaitu santunlah ketika anda meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, kecuali ada alasan khusus untuk tidak santun. *Ketiga*, pemelajar bahasa Inggris cenderung menggunakan strategi santun dalam situasi berjarak dan strategi kurang santun dalam situasi akrab. *Keempat*, ada beberapa perbedaan antara penutur jati dan non-jati dalam menggunakan strategi kesantunan

dalam situasi tertentu. Penutur non-jati cenderung menggunakan strategi kurang santun dalam situasi tertentu, sedangkan penutur jati menggunakan strategi yang lebih santun.

Perbandingan dua hasil studi itu menunjukkan bahwa kemampuan pemelajar bahasa kedua dalam hal menilai kesantunan dalam bahasa sasaran tidak serta-merta dapat diartikan bahwa pemelajar tersebut dapat menggunakan secara patut dalam situasi komunikasi aktual. Karena itu, Tanaka dan Kawade (1982) menyarankan perlunya studi lebih lanjut hubungan antara persepsi kesantunan dan produksi aktualnya oleh pemelajar bahasa kedua.

### **6.3. Peansiri Eknuyom Vongvipanond**

Vongvipanond, P. E. (1983). Indirect speech acts: a case of deviant forms and limited repertoire in interlanguage. In *Transfer and Translation in Language Learning and Teaching: Selected Papers from the RELC Seminar on Interlanguage Transfer Processes in Language learning* (pp. 144-152).

Tulisan ini menyajikan analisis data antarbahasa dalam performansi pernelajar bahasa Inggris yang merupakan penutur jati bahasa Thailand. Data terdiri atas pemakaian dan interpretasi pemelajar tentang tindak tutur tidak langsung, terutama dalam tindak direktif. Data dikumpulkan dengan cara observasi performansi keterampilan menulis dan berbicara mahasiswa di Universitas Chulalongkorn, Bangkok. Penyimpangan bentuk dan ketidakpadaan kemampuan interpretatif yang diamati bukan peristiwa yang sekali saja terjadi, melainkan peristiwa yang sudah terjadi secara berulang.

Tindak tutur tidak langsung yang disorot dalam makalah ini ialah tindak ilokusi membuat perintah (command), permohonan (request), dan saran (suggest), yang dipayungi istilah tindak direktif.

Berdasar analisis data, ada beberapa contoh performansi yang patut dibahas.

- 1) Question tags untuk imperatif positif

Dalam bahasa Inggris, imperatif dapat diberi pemerlunak *pseddo-tagquestion* dengan tambahan *will you* atau *won't you*. Namun, data pemakaian bahasa Inggris pemelajar menunjukkan bahwa bentuk *tags* yang digunakan justru *can you* atau *can't you*.

- 2) Question tags untuk imperatif negatif  
Kasus transfer lain yang dapat diprediksi ialah dalam *tags* untuk imperatif negatif, yaitu mahasiswa menggunakan *you know, you see, dan you hear?*
- 3) Pemakaian verba *to help*  
Banyak pemelajar menggunakan *tag-imperatif* yang dimulai dengan verba *to help*, misalnya *Help speak louder, please*. Konstruksi seperti itu tidak lazim dalam pemakaian bahasa Inggris.

Contoh 1-3 tersebut adalah contoh penyimpangan dari norma bahasa sasaran di bawah pengaruh materi kebahasaan bahasa pertama pemelajar. Dua contoh berikut adalah contoh penyimpangan dalam kemampuan interpretatif pemelajar. Yang terjadi bukan penyimpangan bentuk, tetapi salah pemahaman dan salah interpretasi, yang dapat disebut repertoir terbatas.

- 4) *Negatif Why-questions*  
Dalam bahasa Inggris, negatif *why-questions* dapat digunakan untuk membuat dua jenis tindak tutur tidak langsung, yaitu direktif dengan praanggapan tentang keraguan atau ketidakinginan pada diri petutur, seperti: *why don't you come in?* dan direktif tanpa praanggapan, yaitu hanya menyarankan, seperti *Why don't you tell me the problem?*

Di Thailand, negatif *why-questions* yang digunakan hanya jenis direktif yang pertama. Akibatnya, ketika pemelajar mencoba menransfer repertoire tindak tutur tidak langsung berkaitan dengan tindak direktif dari bahasa asli mereka ke bahasa sasaran, negative *why-questions* yang ditransfer hanya sebagai diraktif dengan praanggapan.

- 5) Direktif dalam bentuk pertanyaan yang terfokus pada

keinginan petutur dalam bahasa Inggris, jika ada pertanyaan: *Do you want to read the next two chapters for our next class?* Biasanya jawabannya ialah *“yes, I do”* atau *“No, I don’t”*. Namun, pemelajar cukup sering menggunakan jawaban *“yes, I want* atau *“No, I don’t want”*. Kasus kedua dari jawaban pemelajar merefleksikan baik repertoir terbatas dan penyimpangan bentuk. Pada akhir tulisan, ditunjukkan bahwa transfer bahasa dapat menyebabkan tidak hanya penyimpangan bentuk, tetapi juga terbatasnya repertoir yang berkaitan dengan ketidaklangsungan tindak tutur.

#### **6.4. Shoshana Blum-Kulka dan Elite Olshtain**

Blum-Kulka, S., & Olshtain, E. (1984). Requests and apologies: A cross-cultural study of speech act realization patterns (CCSARP). *Applied linguistics*, 5(3), 196-213.

Tulisan ini merupakan kajian pola realisasi tindak tutur lintas-budaya, yang bertujuan membandingkan pola realisasi tindak tutur memohon dan meminta maaf secara lintasbahasa dan menentukan kesamaan dan perbedaan antara pola realisasi penutur jati dan non-jati dalam tiap bahasa yang diteliti, yang mencakupi bahasa Inggris Australia, Inggris Amerika, Inggris British, Prancis Kanada, Denmark, Jerman, Ibrani, dan Rusia.

Instrumen kajian ini ialah tes melengkapi wacana dengan melibatkan 2 (dua) variasi, yaitu 1) variasi sit (jasional dengan parameter + jarak sosial dan + dominansi, dan 2) variasi individual seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Informan untuk tiap bahasa berjumlah 400 orang dan terdiri atas mahasiswa pria dan wanita dalam jumlah yang sama. Setengah informan adalah penutur jati dan setengahnya non-jati.

Kerangka analisis pada tindak tutur memohon ditetapkan sebagai berikut.

##### **1) Penentuan unit analisis**

Analisis sekuens ujaran dilakukan dalam segmen-segmen: 1) bentuk sapaan (*address term*), 2) tindak utama (*head act*), dan 3) adjung pada tindak utama. Segmentasi tersebut dimaksudkan untuk menyingkap ujaran yang merupakan inti

tindak tutur ('tindak utama'), yaitu bagian dari sekuens yang berfungsi merealisasikan tindak unsurunsur lain secara bebas, meskipun segmentasi itu juga diakui menimbulkan masalah.

## 2) Jenis strategi

Berdasar tiga tingkat utama kelangsungan, yaitu 1) paling langsung, 2) tidak langsung secara konvensional, dan 3) tidak langsung non-konvensional, diidentifikasi sembilan jenis strategi, yang diurutkan dalam bentuk skala ketidaklangsungan. Sembilan jenis strategi tersebut ialah modus imperatif, performatif eksplisit, performatif berpagar, pernyataan keharusan, pernyataan keinginan, rumusan saran, persiapan pertanyaan, isyarat kuat, dan isyarat halus.

## 3) Sudut pandang pelaksanaan

Berdasar sudut pandang ini, tindak memohon pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam strategi: 1) berorientasi kepada petutur, 2) berorientasi kepada penutur, 3) berorientasi kepada penutur dan petutur, dan 4) impersonal.

## 4) Analisis dimensi pemerlunak sintaksik/unsur lain

## 5) Analisis dimensi penguat daya tutur.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada satu sisi, fenomena tindak tutur dapat menjadi sesuatu yang universal, tetapi analisis komparatif lintas bahasa menunjukkan bahwa distribusi pola-pola realisasi tindak-tutur yang berkaitan dengan kendala sosial yang sama akan menghasilkan variabilitas budaya yang variatif.

### 6.5. Asim Gunarwan

Gunarwan, A. (1993). The politeness rating of English and Indonesian directive types among Indonesian learners of English: Towards contrastive pragmatics. In *4th International Pragmatics Conference, Kobe, Japan*, 25-30 Juli 1993.

Studi ini membahas cara pemelajar bahasa Inggris dari Indonesia dalam menilai tingkat kesantunan sembilan jenis tindak tutur direktif bahasa Inggris dan kesepadannya dalam bahasa Indonesia yang mencakupi modus imperatif (MI), performatif berpagar (PB), pernyataan keharusan (PH), pernyataan keinginan

(PI), performatif eksplisit (PE), formula saran (FS), persiapan pertanyaan (PP), isyarat kuat (IK), dan isyarat halus (N). Masing-masing berbeda satu sama lain berkaitan dengan kejelasan pragmatik atau kelangsungan arah ilokusi.

Tujuan studi ini ialah mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan penilaian kesantunan; dan mencari petunjuk perbedaan antara persepsi penutur jati bahasa Inggris dan non-jati tentang kesantunan tipe direktif bahasa Inggris dengan membandingkan persepsi pemelajar Indonesia dalam nuansa direktif dengan penutur jati.

Data studi ini dikumpulkan melalui 2 (dua) jenis kuesioner. Kuesioner pertama ialah kuesioner dalam bahasa Indonesia untuk pemelajar bahasa Inggris dan dirancang untuk menjangkau persepsi responden tentang tingkat kesantunan sembilan tipe tindak tutur direktif dalam bahasa Indonesia. Kuesioner kedua ialah kuesioner dalam bahasa Inggris untuk pemelajar bahasa Inggris dari Indonesia dan penutur jati bahasa Inggris dan dirancang untuk menjangkau persepsi responden tentang tingkat kesantunan sembilan tindak direktif bahasa Inggris.

Responden terdiri atas 2 (dua) kelompok, yaitu pemelajar bahasa Inggris dari Indonesia dan penutur jati bahasa Inggris. Kelompok pertama sebagian besar adalah partisipan OTO BAPPENAS, lulusan dari berbagai bidang (tetapi bukan bahasa Inggris), dan berasal dari berbagai universitas di Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri untuk mengambil program Master dan Ph.D., sebagian besar di USA. Kelompok ini dibagi menjadi dua sub-kelompok. *Pertama*, kelompok yang baru menyelesaikan program pelatihan pertama yang TOEFL-nya berkisar 475-525 sebanyak 109 orang. *Kedua*, kelompok yang hampir menyelesaikan program pelatihan kedua, yang berarti TOEFL mereka di atas 525 dan sudah siap berangkat ke luar negeri: 49 orang dengan 15 mahasiswa yang berperingkat tinggi dari UI sehingga jumlahnya menjadi 64 responden. Responden penutur jati bahasa Inggris berjumlah 58 orang. Berdasar ragam bahasa Inggris yang mereka pakai, kelompok ini dibedakan menjadi 3 (tiga) sub-kelompok,



yaitu 1) penutur Inggris Amerika: 27 orang; 2) penutur Inggris British: 12 orang, dan 3) penutur Inggris Australia: 15 orang.

Isi kuesioner pada dasarnya ialah meminta responden untuk menilai apakah token direktif lebih santun daripada yang lain. Dengan sembilan token, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, penilaian dilakukan dengan mengikuti skala Likert, yaitu nilai 1 diberikan kepada token yang dianggap paling kurang santun dan nilai 9 untuk nilai paling santun. Nilai rerata dari tiap sembilan token direktif dihitung berdasar berapa banyak responden memberi nilai pada token tersebut. Berdasarkan hal tersebut, ada lima urutan yang diperlukan untuk studi ini:

- a. Dua urutan untuk kelompok pemelajar bahasa Inggris: satu urutan peringkat direktif bahasa Inggris dan satu urutan peringkat direktif bahasa Indonesia;
- b. Dua urutan untuk dua sub-kelompok di atas, yang mencakupi: satu urutan direktif bahasa Inggris pemelajar dengan skor TOEFL di bawah 525 dan satu urutan direktif Inggris untuk responden yang TOEFL-nya di atas 525;
- c. satu urutan untuk kelompok penutur jati (hanya peringkat urutan direktif bahasa Inggris).

Berkaitan dengan urutan peringkat menurut keseluruhan pemelajar, ada kesamaan antara dua urutan peringkat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yaitu modus imperatif, yang terdiri atas modus imperatif (MI), pernyataan keharusan (PH), dan isyarat lemah (IL). Baik dalam versi Indonesia maupun Inggris, modus imperatif dinilai paling kurang santun dan diikuti pernyataan keharusan dan isyarat lemah. Kesamaan antara urutan peringkat kesantunan direktif bahasa Inggris dan yang sepadan dengan versi bahasa Indonesia hanya ada pada isyarat lemah, pernyataan keharusan, dan modus imperatif. Enam jenis direktif lain berbeda urutan peringkatnya lintas bahasa. Namun, jika ditelaah lebih mendalam, perbandingan dua urutan itu menunjukkan bahwa dua urutan hampir serupa jika kita membagi sembilan tipe direktif ke dalam 3 (tiga) dan 9 (Sembilan) skala ke dalam tiga juga, yaitu tinggi, menengah, dan rendah. Dengan begitu, kemiripannya menjadi terbatas. Hal itu dapat ditafsirkan

sebagai petunjuk adanya interferensi, yaitu responden pelnelajar menilai tingkat kesantunan tipe direktif bahasa Inggris berdasar latar kesantunan bahasa Indonesia.

Berkaitan dengan urutan peringkat menurut sub-kelompok pemelajar, diketahui bahwa berdasar nilai rerata kesantunan yang diberikan oleh sub-kelompok pelnelajar dengan TOEFL di bawah 525 dan di atas 525, ada kesamaan antara kedua sub-kelompok yang ditemukan, yaitu berkaitan dengan performatif berpagar, pernyataan keinginan, isyarat lemah, pernyataan keharusan, dan modus imperatif. Sementara itu, ketidaksamaan yang ditemukan berkaitan dengan persiapan pertanyaan, formula saran, isyarat kuat, dan performatif eksplisit.

Dengan 5 (lima) tipe direktif yang sama dan 4 (empat) yang tidak sama, hal itu dapat diperkirakan bahwa dua urutan peringkat tersebut sama. Penyebab ketidaksamaan itu ialah persiapan pertanyaan dan performatif eksplisit. Jika kedua jenis itu dikeluarkan, ditemukan adanya dua urutan peringkat identik. Dengan demikian, enam bulan pelatihan bahasa Inggris intensif ternyata tidak membawa perubahan yang signifikan berkaitan dengan cara responden merasakan tingkat kesantunan tipe direktif bahasa Inggris. Interferensi dari norma kesantunan bahasa Indonesia tampaknya tidak dapat dikurangi dalam pelatihan intensif selama enam bulan.

Berkaitan dengan urutan peringkat menurut penutur jati, bahasa Inggris, yang dibedakan menjadi 3 (tiga) sub-kelompok, yaitu penutur jati bahasa Inggris Amerika, Inggris British, dan Inggris Australia, ketiga penilaian sub-kelompok tersebut memiliki tingkat kesamaan yang tinggi dalam penilaian kesantunan tipe direktif bahasa Inggris. Ketidaksamaan hanya ditemukan berkaitan dengan performatif eksplisit, isyarat lemah, dan isyarat kuat. Hal yang dapat disimpulkan ialah pada umumnya 3 (tiga) sub-kelompok responden penutur jati bahasa Inggris memiliki persepsi yang sama pada sembilan tipe direktif.

Berkaitan dengan urutan peringkat penilaian kesantunan dari sembilan tipe direktif bahasa Inggris, penutur jati bahasa Inggris dan pemelajar menilai secara berbeda. Penyebab semua itu

tampaknya ialah interferensi pemelajar dalam menggunakan norma bahasa Indonesia ketika menilai tingkat kesantunan sembilan tipe direktif bahasa Inggris. Salah satu implikasi dari temuan ini ialah bahwa masalah kesantunan direktif bahasa Inggris dan mungkin kesantunan bahasa Inggris secara umum, merupakan problematik bagi pemelajar bahasa Inggris di Indonesia.

Ada beberapa hal yang perlu dikomentari berkaitan dengan hasil studi ini. *Pertama*, masih dapat dipertanyakan apakah penggunaan instrumen berupa skala penilaian saja tanpa mengikutsertakan konteks pemakaian itu dapat dianggap instrumen yang sah dan terpercaya. Kalau kita percaya bahwa kesantunan itu bersifat relatif, bergantung pada kekuasaan (*power*) dan solidaritas antara penutur dan petutur serta latar yang menyertai dan tingkat tekanan, instrumen tersebut sangat diragukan kesahihannya. *Kedua*, studi ini masih bersifat persepsi, sedangkan data studi yang bersifat produksi belum dilakukan. Karena itu, hal ini masih merupakan peluang untuk melakukan studi terkait dengan topik ini.

#### **6.6. Janet Banerjee dan Patricia L. Carrell.**

Banerjee, J., & Carrell, P. L. (1988). Tuck in your shirt, you squid: Suggestions in ESL. *Language learning*, 38(3), 313-364.

Studi ini membahas 1) konvensi penutur jati bahasa Inggris dan pemelajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua dalam memproduksi tindak tutur menyarankan; 2) kesamaan dan perbedaan tuturan kedua kelompok responden berkaitan dengan upaya menjaga muka sendiri dan muka petutur; 3) kegagalan tindak tutur menyarankan yang dibuat pemelajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua; dan 4) cara mengajarkan tindak tutur menyarankan. Subjek penelitian ini terdiri atas dua kelompok, yaitu pemelajar bahasa Inggris berlatar bahasa China dan Melayu berjumlah 28 orang dan penutur jati yang berjumlah 12 orang.

Instrumen studi berupa kuesioner tes melengkapi wacana dengan 60 situasi. Variabel yang diperhitungkan ialah jenis kelamin, keakraban, dan tingkat keadaan memalukan pada petutur yang mungkin berpengaruh terhadap frekuensi, kelangsungan, dan

bentuk saran. Data dianalisis berdasar variabel bebas, yaitu tingkat keadaan memalukan. Situasi terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu keadaan tidak memalukan, agak memalukan, dan potensial memalukan. Tiap butir jawaban diberi skor menurut 1) ada tidaknya respons, 2) kelangsungan respons, dan 3) bentuk respons- pernyataan, pertanyaan, atau imperatif.

Berdasar hasil analisis khi-kuadrat, hasilnya dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal frekuensi pemberian saran. Penutur jati membuat saran lebih sering daripada penutur non-jati.
2. Tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara penutur jati dan non-jati berkaitan dengan saran langsung yang mereka buat.
3. Dalam situasi yang lebih mengancam muka (potensial inemalukan), keinginan penutur jati maupun non-jati berkurang untuk membuat saran.
4. Terdapat perbedaan yang signifikan pada dua tingkat memalukan, yaitu agak memalukan dan potensial memalukan. Penutur non-jati secara signifikan kurang memberikan saran daripada penutur jati pada kedua keadaan itu.
5. Tingkat kelangsungan saran tidak berkaitan dengan tingkat keadaan memalukan.
6. Baik penutur jati maupun non-jati secara signifikan menggunakan saran kurang langsung dalam situasi pengancam muka.
7. Bentuk pernyataan merupakan bentuk yang paling sering dipilih untuk digunakan sebagai saran, baik oleh penutur jati maupun non-jati.

Ada 8 (delapan) strategi yang digunakan dalam membuat saran.

1. Strategi dengan cara menunjukkan perhatian untuk sesuatu yang penting bagi petutur: keinginan, kebutuhan, dan kesukaan petutur. Kegagalan penutur non-jati dalam masalah ini ialah penutur non-jati memberi saran yang tampak lebih menyerupai penghinaan karena informasi yang mereka berikan kepada petutur terfokus pada

penampilan/kebersihan diri petutur. Penutur non-jati kadang-kadang juga membuat saran tidak santun dengan menggunakan bentuk-bentuk yang lebih patut dianggap sebagai permohonan santun. Masalah gramatikal tampak menginterferensi maksud pemelajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing.

2. Strategi dengan cara memperlunak saran dengan pagar (*hedge*).
3. Strategi dengan mengurangi jarak antara penutur dan petutur: dengan menggunakan pemarkah solidaritas.
4. Strategi dengan mengubah fokus dari petutur ke penyebab luar atau diri penutur.
5. Strategi menawarkan bantuan.
6. Strategi pemakaian alasan dengan pernyataan mengapa saran sebaiknya diikuti atau mengapa penutur merasa bebas membuat saran.
7. Strategi mencari alasan perilaku petutur.
8. Strategi penutur menyarankan secara eksplisit maksud mereka bahwa mereka tidak ingin menyinggung atau melukai hati petutur.

Perbedaan saran yang dibuat penutur jati dan non-jati tampak dalam frekuensi pemakaian jenis saran dan ragam strategi kesantunan positif maupun negatif dan bentuk redressive yang digunakan.

Pada bagian simpulan dinyatakan bahwa “apa pun saran dan jenis strategi yang digunakan akan selalu berkaitan dengan *power* interlokutor dan jarak sosial antar partisipan.” Akan tetapi, studi ini tidak memasukkan konsep *power* dalam pembuatan instrumen. Padahal, faktor *power* dan solidaritas merupakan dua aspek yang tidak mungkin dipisah satu sama lain. Saran yang santun yang tertuju pada petutur yang +P +S belum tentu santun jika saran itu ditujukan kepada petutur yang +P -S atau -P -S dengan berbagai latar yang berbeda.

## 6.7. Tim Hassal

Hassall, T. (1999). Request strategies in Indonesian. *Pragmatics*, 9(4), 585-606.

Studi ini bertujuan mengetahui cara penutur asli bahasa Indonesia melakukan tindak tutur memohon dalam situasi keseharian. Dalam kajian teori, Hassal (1999) meragukan universalitas performansi tindak tutur. Dia menggunakan teori kesantunan Brown dan Levinson (1987). Tindak tutur memohon diidentifikasi berdasar 3 (tiga) tingkat kelangsungan memohon, yaitu langsung, tidak langsung secara konvensional, dan tidak langsung secara non-konvensional dengan sejumlah sub-strategi seperti yang dikemukakan Blum-Kulka (1984).

Subjek studi terdiri atas 18 penutur jati bahasa Indonesia yang sedang belajar di Universitas Australia: 9 pria dan 9 wanita, tidak ada yang tinggal di Australia lebih dari tiga tahun. Mereka sebagian besar berasal dari Pulau Jawa. Data dikumpulkan dengan cara bermain peran lisan interaktif. Tiap situasi permainan peran dianalisis berkaitan dengan status pemohon terhadap petutur, tingkat tekanan, kenyamanan pemohon saat mengungkapkan permohonan.

Berdasar hasil analisis data, 42,7% tindak memohon berupa permohonan langsung dengan imperatif penuh dan pelesapan, performatif eksplisit, dan pernyataan keinginan. Lebih dari setengah tindak tutur yang terkumpul ialah permohonan tidak langsung secara non-konvensional dengan sub-strategi persiapan pertanyaan dengan menggunakan verba modal bisa atau boleh dan sub-strategi mempertanyakan ketersediaan item yang diinginkan. Strategi tidak langsung secara non-konvensional (isyarat) merupakan strategi yang paling sedikit digunakan.

Bentuk imperatif dipilih responden dalam situasi penutur merasa berstatus lebih tinggi daripada petutur karena faktor kemendesakan. Permohonan dengan modal persiapan pertanyaan cenderung digunakan ketika ancaman terhadap muka dirasakan begitu tinggi dengan ciri status penutur lebih rendah daripada petutur, tekanan tinggi, dan tingkat kenyamanan rendah. Sementara itu, variasi pemakaian strategi isyarat tampak tidak

teratur dan tidak berkaitan dengan besarnya keterancaman muka yang dirasakan.

Tindak meminta informasi dianalisis secara terpisah dengan tindak tutur memohon karena berkaitan dengan masalah strategi pertanyaan langsung. Subjek studi ternyata lebih menyukai strategi langsung untuk menanyakan informasi, disusul permohonan tidak langsung secara konvensional, dan isyarat.

Berdasar hasil analisisnya itu, dia menyimpulkan bahwa strategi permohonan yang terkumpul tercakupi oleh taksonomi yang dibuat CCSARP. Sehingga, strategi dan sub-strategi membuat permohonan cenderung memiliki kesantunan yang tinggi lintas budaya. Strategi isyarat sebagai strategi paling tidak langsung ternyata digunakan tidak lebih sering daripada strategi permohonan tidak langsung konvensional. Sub-strategi modal persiapan pertanyaan dianggap sebagai tipe permohonan utama. Padahal, tipe ini sebelumnya digunakan sebagai strategi utama pada kelompok bahasa Germanik dan Romans dan juga di Australia yang mencerminkan etos egalitarian yang kuat. Dengan demikian, temuan di Indonesia itu merupakan cermin adanya pertentangan orientasi budaya kelompok elit Indonesia yang diwakili kaum terpelajar vs. tradisional.

Temuan menarik lain dari studi ini ialah rendahnya frekuensi strategi isyarat. Ini bertentangan dengan etos ketidaklangsungan dalam budaya Jawa. Diduga hal itu disebabkan oleh situasi permohonan tidak cukup komprehensif sehingga tidak dapat menampakkan kecenderungan tersebut atau mungkin karena metode pengumpulan data tidak mendukung strategi isyarat.

Hal yang patut dipertanyakan ialah dapatkah hasil studi ini dirampatkan sebagai tindak tutur memohon dalam bahasa Indonesia, sedangkan subjek studi mayoritas berasal dari kelompok etnis Jawa? Padahal, Indonesia terdiri atas berbagai kelompok etnis dengan berbagai karakter budaya masing-masing. Menurut Gunarwan (1999), tindak tutur direktif antara dua kelompok etnis Jawa dan Batak saja sudah berbeda secara

signifikan, apalagi jika ada perbandingan dengan kelompok etnis di wilayah Indonesia Timur.

### **6.8. Ahmad Mahmoud Abdul-Hadi Atawneh**

Atawneh, A. M. A. H. (1991). *Politeness theory and the directive speech-act in Arabic-English bilinguals: An empirical study*. State University of New York at Stony Brook.

Disertasi ini mengetes pernyataan universal teori kesantunan Brown dan Levinson (1987). Tujuan studi ini ialah 1) mengevaluasi keberadaan model analisis tindak tutur dalam wacana kesantunan dan mengetes keterterapannya untuk menganalisis tindak direktif yang dilakukan oleh bilingual Arab-Inggris; 2) mengidentifikasi strategi kesantunan dalam bahasa Arab dan mendiagnosis masalah yang dimiliki penutur bahasa pertama bahasa Arab dalam melakukan tindak direktif dalam bahasa Inggris; dan 3) memunculkan rekomendasi untuk memodifikasi keberadaan model kesantunan dengan kerangka yang lebih luas dari teori analisis wacana.

Untuk mencapai tujuan itu, studi kontrastif empiris dilakukan untuk mengkaji strategi memohon penutur asli bahasa Arab dan Inggris pada satu sisi, dan bilingual bahasa Arab-Inggris pada sisi lain. Subjek studi ini adalah 30 penutur asli bahasa Inggris Amerika, 30 dwibahasawan bahasa Arab-Inggris yang hidup di Amerika Serikat yang menjawab dalam bahasa Arab maupun Inggris, 30 monolingual bahasa Arab yang menjawab dalam bahasa Arab, dan 20 dwibahasawan bahasa Arab-Inggris yang hidup di Palestina yang menjawab dalam bahasa Inggris. Usia mereka terentang dari 20-60 tahun.

Instrumen yang digunakan ialah kuesioner dalam bahasa Arab dan Inggris yang melibatkan 12 situasi permainan peran yang dilakukan dalam pasangan. Tiap dua pasangan yang dites dipengaruhi oleh satu dari 3 (tiga) penentu kesantunan, yaitu kekuasaan, jarak sosial, dan tingkat tekanan (*rank of imposition*).

Hipotesis yang diuji ialah 1) pola kesantunan bahasa Arab berbeda dari pola kesantunan bahasa Inggris dalam struktur dan hierarki yang disebabkan oleh perbedaan bahasa dalam budaya;



dan 2) pola-pola tersebut itu ditransfer dari satu bahasa ke bahasa lain dalam komunikasi lintas budaya.

Hasil studi secara kuat mendukung kedua hipotesis tersebut. Di samping itu, studi ini juga menunjukkan bahwa teori yang dikemukakan Brown dan Levinson (1987) gagal membuat pembedaan dalam penilaian direktif undangan dalam situasi yang berbeda. Tindakan “diam” sebagai fungsi kesantunan juga tampak dipertanyakan. Selanjutnya, dinyatakan bahwa teori Brown dan Levinson (1987) dapat dilengkapi sebagian oleh model kesantunan Leech (1983). Analisis deskriptif menunjukkan bahwa penutur bahasa Arab lebih sedikit menggunakan modalitas sebagai pagar (*hedge*) dalam bertindak tutur direktif dibanding penutur bahasa Inggris dan menggantinya dengan strategi kesantunan lain untuk menutup celah ini. Keterterapan studi pada bahasa asing dan bahasa kedua terletak pada pernyataannya bahwa budaya tempat bahasa asing atau bahasa kedua dipelajari membentuk norma pragmatik dari bahasa tersebut.

Studi ini tidak berkaitan dengan konteks pembelajaran bahasa kedua atau asing. Oleh sebab itu, dalam analisis tidak dijumpai adanya kegagalan pemelajar dalam bertindak tutur. Yang dibahas ialah adanya transfer negatif dalam komunikasi lintas budaya. Yang unik ialah untuk melihat terjadinya transfer, Atawneh (1991) menggunakan dwi-bahasawan yang tinggal di Amerika Serikat dan juga di Palestina selain monolingual bahasa Inggris dan Arab yang tinggal di negaranya masing-masing; dengan tetap mengacu pada konsep pragmatik antarbahasa.

# BAB 7

## SINTESA DAN PERKEMBANGAN

---

### 7.1. Sintesa Kajian Terdahulu

Berdasar kajian terdahulu tentang kesantunan dan tindak direktif, topik tersebut dapat dibahas lagi dengan mengisi berbagai kerumpangan yang telah disebutkan pada tiap akhir rangkuman. Studi terdahulu ada yang memfokuskan pada persepsi seperti yang dilakukan oleh Gunarwan (1993), ada yang memfokuskan pada aspek produksi seperti yang dilakukan Banerjee dan Carrell (2006), Hassal (1999), dan Atawneh (1991). Akan tetapi, studi yang berkaitan dengan aspek persepsi kesantunan tindak tutur pada belum melibatkan konteks power dan solidaritas. Begitu pun dalam studi aspek produksi tindak tutur.

Berdasar telaah, dapat dinyatakan bahwa studi pragmatik antarbahasa tampaknya lebih berkonsentrasi pada upaya mendeskripsi perbedaan antara cara pemelajar B2 dan penutur jaja dalam melakukan tindak tutur yang sama. Sayangnya, perhatian kurang diberikan kepada perkembangan kompetensi pragmatik pemelajar dari waktu ke waktu. Akibatnya, meskipun sekarang cukup banyak diketahui tentang cara pemelajar menggunakan tindak tutur dalam B2, sedikit diketahui tentang bagaimana “kaidah berbicara” diperoleh pemelajar atau berkembang berdasar tingkatan studinya di ruang kelas. Oleh sebab itu, studi seperti ini masih patut mendapat perhatian, meskipun hanya dengan menggunakan studi lintas bagian (*cross-sectionao*). Sehingga, idealnya studi ini dilakukan dengan menggunakan metode longitudinal.

Selain itu, menurut Ellis (1992), secara ideal, studi tentang tindak ilokusi dalam bahasa harus melibatkan kumpulan 3 (tiga) *set data*, yaitu 1) percontoh tindak ilokusi yang dilakukan dalam bahasa sasaran oleh pemelajar B2; 2) percontoh tindak ilokusi yang dilakukan oleh penutur jati dari bahasafasaran pemelajar; dan 3) percontoh tindak ilokusi yang dilakukan oleh pemelajar

dalam bahasa pertama. Hanya dengan cara tersebut sangat mungkin peneliti menentukan performansi pemelajar berbeda dari performansi penutur jati dan apakah perbedaan itu dapat ditelusuri melalui transfer B1. Hal tersebut telah dilakukan oleh Gunarwan (1993) dalam studi persepsi kesantunan tindak direktif seperti yang telah diuraikan di atas. Namun, pada studi tindak menyarankan seperti yang dilakukan oleh Banerjee dan Carrell (2006) belum dimasukkan percontoh tindak ilokusi pemelajar dalam bahasa pertama. Sementara itu, Atawneh (1991) menggunakan tindak ilokusi B1 dan B2 meskipun konteks studinya berada dalam konteks pragmatik kontrastif, bukan pragmatik antarbahasa dalam upaya pembelajaran.

Berdasar hal itu, studi pragmatik antarbahasa berkaitan dengan pembelajaran B2 dapat berkisar pada masalah

1. Aspek persepsi, termasuk persepsi kesantunan,
2. Aspek produksi, termasuk produksi tindak ilokusi,
3. Kesamaan dan perbedaan tindak ilokusi penutur jati dan pemelajar dalam bahasa sasaran,
4. Kegagalan pragmatik pemelajar B2 dalam bertindak ilokusi,
5. Perkembangan kompetensi pragmatik pemelajar yang dapat dilakukan melalui studi longitudinal maupun lintas bagian,
6. Interferensi pragmatik pemelajar dari B1 ke B2.

Berbagai aspek itu menjadi masukan bagi studi pragmatik antarbahasa.

## **7.2. Perkembangan Buku Pragmatik di Indonesia**

Pragmatik merupakan ilmu yang relatif baru dalam dunia linguistik, apalagi dunia linguistik Indonesia. Oleh sebab itu, penting kiranya menyelusuri perkembangan penulisan buku-buku pragmatik di Indonesia sebagai bagian dari penghargaan kepada para penulisnya dan juga untuk melihat bahasan pragmatik dalam berbagai buku tersebut.

Tarigan (1990b) menulis buku pragmatik, yang berjudul Pengajaran Pragmatik. Buku tersebut ditulis untuk mengisi kelangkaan bahan bacaan mengenai pragmatik di Indonesia, sebagai salah satu bahan yang harus diajarkan di sekolah sejak

diberlakukannya Kurikulum Bahasa Indonesia 1984. Materi utama yang terdapat dalam buku ini ialah hakikat dan fungsi bahasa, tata bahasa dan pragmatik, pragmatik dan tindak ujar, ungkapan kebijaksanaan, retorika antarpribadi, lokusi, ifokusi, dan perlokusi, aneka tindak komunikatif, dan pragmatik dalam kurikulum bahasa Indonesia. Dari sekian banyak materi yang terdapat dalam buku ini, tulisan Leech (1983) dalam buku yang berjudul *The Principles of Pragmatics* begitu sangat dominan dalam buku karya Tarigan (1990b). Dari bab 2 sampai dengan bab 6 semua alur pemaparan materi betul-betul mengikuti tulisan Leech (1983). Selain itu, materi “aneka tindak komunikatif” dan “pragmatik dalam kurikulum bahasa Indonesia” hanya berisi contoh-contoh berbagai tindak tutur seperti menyapa orang lain, bertanya, memberi izin, mengungkapkan persetujuan dan ketidaksetujuan, menawarkan bantuan, mengungkapkan rasa marah, puas dan tidak puas, dan sebagainya. Selain itu, dalam buku ini tampak ada pencampuran antara pragmatik sebagai materi pengajaran linguistik dan pragmatik sebagai sebuah konsep yang mempengaruhi kurikulum pembelajaran.

Nababan (1987) menulis buku pragmatik yang berjudul *Ilmu Pragmatik: Teori dan Penerapannya*. Buku ini ditulis sebagai buku pengantar untuk mempeajari pragmatik, terutama bagi mahasiswa S2. Hal itu tampak pada pencantuman program mata kuliah pragmatik untuk S2 IKIP. Topik utama yang dibahas dalam buku ini ialah (1) pengertian pragmatik (pendahuluan), (2) variasi bahasa, (3) tindak bahasa, (4) implikatur percakapan, (5) teori deiksis, (6) praanggapan, (7) analisis wacana, dan (8) pendekatan pragmatik dalam pengajaran.

Dari segi materi yang dibahas, tampak bahwa dalam buku ini ada upaya mencampur materi sosiolinguistik, wacana, dan pragmatik meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa ketiganya bisa saling bersinggungan. Hal itu tampak pada materi variasi bahasa, yang lebih lazim masuk dalam materi sosiolinguistik. Begitu pun materi analisis wacana, yang biasainya lazim menjadi disiplin ilmu tersendiri. Meskipun dinyatakan dalam sub-judul buku ini berkaitan dengan penerapan pragmatik dalam pengajaran,

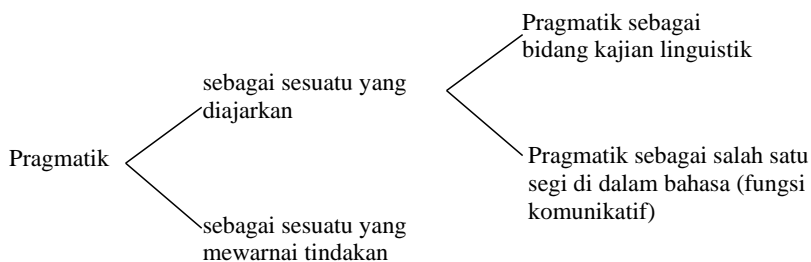
ternyata hanya satu bab yang membahas hal itu. Oleh sebab itu, cakupan bahasan penerapan pragmatik dalam pengajaran tentu saja belum memadai.

Namun, ada kelebihan yang patut dicatat dari buku ini, yaitu dicantumkannya, daftar 20 buku bacaan lanjutan pada akhir buku ini, yang berkaitan dengan aspek pragmatik. Dia memberi ulasan singkat tiap buku, yang dapat memandu pembaca untuk mengetahui secara sekilas masing-masing isi buku yang dicantumkan judulnya itu.

Pada tahun 1990, terbit satu buku Proses Belajar Mengajar Pragmatik, yang ditulis oleh Tarigan (1990a). Buku ini ditulis sehubungan dengan pencantuman pokok bahasan pragmatik dalam kurikulum 1984, baik untuk tingkat SD, SMP, maupun SMA (waktu itu). Pada bagian awalnya, buku ini mengajukan berbagai pertanyaan yang hendak dibahas, yakni apakah pragmatik itu?; apa tujuan pengajaran pragmatik?; bagaimana kaitan, antara pragmatik, CBSA, dan keterampilan proses?; bagaimana cara menyusun dan mengajarkan bahan pengajaran pragmatik?

Akan tetapi, tampaknya tujuan yang sudah dikemukakan penulis buku itu sendiri tidak tercapai karena bahasan kaitan antara pragmatik dan berbagai aspek pengajaran tersebut sama sekali tidak rinci. Hal yang paling rinci dibahas ialah pengembangan bahan pengajaran pragmatik, yang merupakan pengembangan berbagai aspek bahasan pragmatik dalam GBPP (Garis-garis Besar Program Pengajaran) Kurikulum 1984 bidang studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada bagian itu pun, contoh-contohnya yang paling banyak dikemukakan dengan dominasi latar percakapan. Dalam buku ini penulis buku tidak membedakan pragmatik sebagai sebuah pendekatan pengajaran bahasa dan pragmatik sebagai bahan pengajaran bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, judul bukunya pun sudah mengandung ketaksamaan, yakni Proses Belajar Mengajar Pragmatik. Tampak bahwa dengan judul itu pragmatik dianggap sebagai materi pembelajaran yang harus diajarkan. Akan tetapi, di dalam buku tersebut tidak ada bahasan sedikit pun tentang berbagai aspek pragmatik seperti tindak tutur, praanggapan, implikatur, deksis, kesantunan, dan sebagainya.

Selanjutnya, terbit buku yang berjudul *Pragmatik dan Pengajaran Bahasa: Menyibak Kurikulum 1984* yang ditulis oleh Purwo (1990). Buku ini ditulis berdasar perenungan panjang sejak tahun 1986 demi menjawab berbagai ketidakjelasan dalam kurikulum 1984. Penulis buku ini memulainya dengan analisis yang sangat tajam tentang pragmatik dengan membuat pembidangan sebagai berikut.



**Gambar 3.**

*Analisis Tajam Pragmatik*

Sumber: Purwo (1990)

Fenomena pragmatik sebagai bahan pengajaran linguistik, yang dibahas dalam buku ini terhitung singkat, yakni deiksis, pra-anggapan, tindak ujaran, dan implikatur percakapan. Namun analisis atas berbagai pendekatan pengajaran bahasa, metode, dan pendekatan pragmatik dalam pengajaran sangat mendalam. Itulah keistimewaan yang tidak ditemukan dalam buku lain. Dia mencoba mengembangkan pengajaran tata bahasa dengan pendekatan pragmatik dan ihwal mengarang sebagai materi yang dapat dikembangkan dengan pendekatan pragmatik. Bagi dia, pragmatik tidak identik dengan percakapan seperti pada buku-buku yang ditulis oleh penulis lain sebelumnya. Kelebihan lain buku ini ialah kemampuannya merangkum pengajaran 2 (dua) bahasa, yakni pengajaran bahasa Inggris dan pengajaran bahasa Indonesia dalam satu buku.

Pada tahun 1993, terbit buku *Kajian Tindak Tutur*, yang ditulis oleh Abdul Syukur Ibrahim. Menurut penulisnya, buku ini dimaksudkan mengisi keterbatasan pustaka kajian tindak tutur yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Buku ini memuat tujuh

pemikiran dari empat pakar, yaitu Bach dan Harnish (1979), Stubbs (1983), Wunderlic (1980), dan Fasold (1990). Jika dicermati, isi buku ini hanya terjemahan dari tujuh tulisan para pakar itu. Dua bagian pertama buku ini diambil dari tulisan Bach dan Harnish (1979) bab 3 dan bab 5. Bagian keempat dan kelima dari buku tersebut diambil dari tulisan Stubbs (1983) bab 2 dan bab 3. Tiga bagian terakhir dari buku ini diambil dari tulisan Wunderlic dan Fasold. Tampaknya penulis buku ini ingin mendasari pembacanya dengan teori tindak tutur, kemudian cara analisis percakapan dan permasalahan yang ada dalam teori tindak tutur. Akan tetapi, dengan memasukkan materi mengkaji data percakapan dan menganalisis data etnografi, kelihatan ada pencampuran materi analisis wacana dan pragmatik meskipun di antara keduanya tidak dapat dipungkiri ada keterkaitan juga. Selain itu, sesuai dengan judulnya, buku ini tidak membahas aspek pragmatik lain selain tindak tutur.

Pada tahun 1996 terbit buku *Dasar-Dasar Pragmatik*, yang ditulis oleh I Dewa Putu Wijana. Buku ini benar-benar buku yang berisi pragmatik sebagai bahan pengajaran linguistik. Berbeda dengan buku-buku yang sudah dibahas di atas, buku ini tidak mengaitkan bahasannya dengan aspek pengajaran bahasa. Topik utama yang dibahas dalam buku ini ialah

pengertian dan sejarah pragmatik, situasi tutur, tindak tutur, tuturan performatif dan konstatif, jenis-jenis tindak tutur, presuposisi, implikatur, dan *entailment*, kalimat analitis, kontradiktif dan sintesis, prinsip kerja sama, prinsip kesantunan, dan parameter pragmatik. Berdasar jumlah topik yang dibahas, dapat dinyatakan bahwa bahasan dalam buku ini tergolong luas. Namun, bahasan tiap topik akhirnya tampak sekadar mengenalkan suatu istilah sehingga seperti menjadi ensiklopedia. Bahasan pun tampak menjadi terpisah-pisah. Misalnya, penulis tidak mencoba mengaitkan prinsip kerja sama dengan implikatur atau prinsip kerja sama dengan prinsip-prinsip kesantunan Leech (1983). Padahal, kedua hal itu terkait erat.

Berkaitan dengan topik kesantunan, penulis buku ini membahas prinsip kesantunan yang dikemukakan Leech (1983)

tanpa menyinggung prinsip kesantunan yang lain seperti konsep kesantunan Brown, dan Levinson (1987). Padahal, konsep kesantunan Brown dan Levinson tentu jauh lebih populer dan lebih aplikatif dalam analisis kesantunan. Namun, ketika penulis buku ini membahas parameter pragmatik, ia menggunakan konsep Brown dan Levinson (1987), dan bukan konsep Leech (1983).

Pada tahun 2001 terbit buku *Pragmatik Bahasa: Pengantar Teori dan Pengajaran*, yang ditulis oleh Atmazaki. Topik yang dibahas dalam buku ini ialah hakikat pragmatik, bahasa dan pemakaiannya, tindak tutur, praanggapan, implikatur dan perikutan, kesantunan berbahasa, Kawasan kajian dalam pragmatik, pragmatik sebagai pendekatan dalam pengajaran bahasa, dan pengembangan silabus/rancangan pengajaran pragmatik. Meskipun tampaknya topik yang dibahas sangat luas, kalau dicermati isi buku ini tampak seperti nukilan dari berbagai buku, yang dicoba untuk dikompilasi. Akhirnya, banyak topik yang salah tempat sehingga teks menjadi sangat tidak koheren. Misalnya, pada bab 2 “Bahasa dan Pemakaiannya”, di dalamnya ada bahasan “berbagai aspek keterampilan berbahasa” atau bahasan “fungsi direktif secara khusus. Padahal, fungsi direktif itu bagian dari klasifikasi tindak tutur yang baru dibahas dalam bab berikutnya. Pada bab 3, pada sub-bagian kekeliruan verba performatif dan verba ilokusi ditempatkan 5 (lima) klasifikasi tuturan menurut Searle (1976) yang salah menuliskan sumbernya. Pada bagian itu pula ada kesalahan pemahaman tentang syarat kesahihan, yang ditulis tanpa menyebutkan syarat kesahihan untuk tindak tutur apa (2001: 63). Yang lebih aneh lagi, ia memasukkan sub-bab “Prinsip Kerja Sama” dalam bab 4 “Praanggapan, Implikatur, dan Perikutan” tanpa mengaitkan apa peranan Prinsip Kerja Sama dengan ketiga aspek itu. Pada bab 5 “Kesantunan Berbahasa”, materi itu dapat dijumpai persis dalam buku Jenny Thomas, *Meaning in Interaction* (bab 6). Pada bagian pengajaran pun, pembahasan dalam buku ini hanya seperti rangkuman dari tulisan Nababan (1987) (Metodologi Pengajaran Bahasa) dan tulisan Purwo (1984) (*Pragmatik dan Pengajaran Bahasa*).



# BAB 8

## PENUTUP

---

Setelah mengkaji berbagai teori dan hasil studi yang berkaitan dengan tindak tutur, kesantunan, dan pemerolehan bahasa kedua, dapat disusun kerangka berpikir sebagai landasan pelaksanaan studi.

Tindak tutur adalah tindak verbal atau lebih tepatnya tindak ilokusi yang dilakukan seseorang dalam bertutur. Terdorong oleh munculnya teori tindak tutur, Hymes (1971a) menunjukkan bahwa tidak ada hubungan satu lawan satu antara bentuk gramatikal sebuah ujaran dan realisasi tindak tutur. Bergantung pada situasi, kalimat yang identik secara gramatikal dapat berfungsi sebagai tindak tutur yang berbeda. Sebaliknya, satu tindak tutur yang sama dapat direalisasi dalam cara yang berbeda-beda. Keberhasilan performansi tindak tutur bergantung pada keterpenuhan syarat tindak tutur tertentu dan kepatutan kontekstual tindak tutur tertentu saat direalisasikan. Karena itu, pelaksanaan tindak tutur berkaitan dengan faktor sosiokultural.

Berdasar hal itu, Hymes (1971b) memperluas konsep kompetensi yang dikemukakan Chomsky dengan memasukkan konsep kepatutan pada konteks dalam definisinya tentang kompetensi. Hymes (1972) menunjukkan pergeseran dari studi bahasa sebagai sistem dalam isolasi menuju studi bahasa sebagai sistem komunikasi, yang menekankan hubungan erat antara bahasa dan faktor ekstralinguistik. Dengan begitu, teori tindak tutur Austin (1962) dan Searle (1969) menggerakkan perubahan studi bahasa dari definisi struktural bahasa menuju definisi fungsional bahasa.

Perubahan penekanan dalam bidang linguistik itu menjadi dasar bagi munculnya ancangan komunikatif dalam pengajaran bahasa dengan kompetensi komunikatif sebagai konsep utama. Konsep kompetensi Hymes (1971a) diperluas oleh Canale dan Swain (1980) serta Canale (1983). Mereka membagi kompetensi

komunikatif menjadi 2 (dua) bagian utama, yaitu pada tataran linguisitis dan pada tataran psikolinguistis. Pada tataran linguistis, kompetensi komunikatif meliputi 4 (empat) bidang kompetensi yang saling bersinggungan, yaitu kompetensi linguistis, kompetensi sosiolinguistis kompetensi pragmatik dalam tradisi British, kompetensi wacana, dan kompetensi strategi. Pada tataran psikolinguistis, ada 2 (dua) dimensi kompetensi komunikatif, yaitu komponen pengetahuan dan komponen keterampilan. Kompetensi sosiolinguistis (pragmatik) menurut Faerch dan Kasper (1984) terdiri atas pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Pengetahuan pragmatik deklaratif direpresentasikan dalam bentuk kaidah pragmatik dan pengetahuan pragmatik prosedural direpresentasikan dalam bentuk prosedur pragmatik.

Pada pemerolehan bahasa kedua (asing), ada tahapan antarbahasa (*interlanguage*) yang biasa dilampaui pemelajar. Dulu kajian bidang antarbahasa lebih menitikberatkan pada aspek formal bahasa. Namun, kini antarbahasa lebih marak di bidang kompetensi pragmatik, terutama berkaitan dengan kesantunan pemelajar bahasa dalam bertindak tutur dalam bahasa sasaran dengan jalan membandingkan tindak tutur penutur jati.

Berdasar runtutan pemikiran di atas, dasar-dasar kerangka berpikir yang menjadi landasan pelaksanaan studi ini dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Teori dasar tindak tutur, terutama tindak tutur memohon dalam menggunakan teori Austin (1962), Searle (1969), serta Bach dan Harnish (1979). Berdasar teori tersebut, sebuah tuturan dapat diidentifikasi sebagai tindak tutur memohon atau bukan.
2. Studi ini berorientasi pada pragmatik antarbahasa (*interlanguage pragmatics*), bukan pragmatik lintas budaya (*crosscultural pragmatics*).
3. Studi kompetensi pragmatik pada pemelajar bahasa dapat mencakupi persepsi dan produksi tindak tutur atau dapat dikaitkan dengan kompetensi dan performansi. Pusat perhatian terletak pada aspek produksi (performansi) tindak tutur pemelajar bahasa Indonesia sebagai bahasa asing.

4. Analisis strategi kesantunan studi ini bertumpu pada strategi tindak tutur memohon yang dikemukakan Trosborg (2011), teori kesantunan Leech (1983), serta teori kesantunan Brown dan Levinson (1987).

# DAFTAR PUSTAKA

---

- Aijmer, K. (1996). *Conversational Routines in English: Convention and Creativity*. New York: Longman.
- Alabdali, T. S. (2019). Revisiting Brown and Levinson's Politeness Theory: A Middle-Eastern Perspective. *Bulletin of Advanced English Studies*, 2(2), 73-78.
- Al-Hindawi, F. H., & Alkhazaali, M. A. R. (2016). A critique of politeness theories. *Theory and Practice in Language Studies*, 6(8), 1537.
- Allan, K. (1994). Speech Act Classification and Definition. *Concise Encyclopedia of Pragmatics*, ed. Jacob L. Mey, 922-926. Oxford: Elsevier.
- Atawneh, A. M. A. H. (1991). *Politeness theory and the directive speech-act in Arabic-English bilinguals: An empirical study*. State University of New York at Stony Brook.
- Atmazaki. (2001). *Pragmatik: Pengantar Teori dan Pengajaran*. Padang: UNP Press.
- Austin, J. L. (1962). *How to Do Things with Words*. Oxford: University Press.
- Bach, K., & Harnish, R. M. (1979). *Linguistic Communication and Speech Acts*. Cambridge: MIT Press.
- Banerjee, J. & Carrell, P. (2006). Tuck in Your Shirt, You Squid: Suggestions in ESL. *Language Learning*. 38(3): 313 - 364. DOI:10.1111/j.1467-1770.1988.tb00416.x
- Blum-Kulka, S. (1982). Learning to Say What You Mean in a Second Language: A Study of the Speech Act Performance of Learners of Hebrew as a Second Language. *Applied Linguistics*, 3, 29-59.
- Blum-Kulka, S. (1987). Indirectness and politeness in requests: Same or different?. *Journal of pragmatics*, 11(2), 131-146.
- Blum-Kulka, S., & Olshtain, E. (1984). Requests and apologies: A cross-cultural study of speech act realization patterns (CCSARP). *Applied linguistics*, 5(3), 196-213.

- Brown, P. & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press
- Brown, P. (2015). Politeness and language. In *The International Encyclopedia of the Social and Behavioural Sciences (IESBS)*, (2nd ed.) (pp. 326-330). Elsevier.
- Brown, R., & Gilman, A. (1960). The pronouns of power and solidarity. *Style in Language*, ed. Thomas A. Sebeok. Cambridge: The MIT Press, pp. 252-281.
- Canale, M. (1983) From communicative competence to communicative language pedagogy. In: Richards J, Schmidt R (eds) *Language and Communication*. Longman, London, pp 2-27
- Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. *Applied linguistics*, 1(1), 1-47.
- Djajasudarma, T. F. (2012). *Wacana dan Pragmatik*. Bandung: Refika Aditama.
- Ellis, R. (1992). Learning to Communicate in the Classroom: A study of Two Language Learners' Requests. *Studies in Second Language Acquisition*, 14(1), 1-23.
- Ellis, R. (1994). *The Study of Second Language Acquisition*. Oxford University.
- Ellis, Rod. (1985). *Understanding Second Language Acquisition*. Oxford: Oxford University Press.
- Faerch, C., & Kasper, G. (1984). Pragmatic knowledge: Rules and procedures. *Applied Linguistics*, 5(3), 214-225.
- Fraser, B. (1978). Acquiring Social Competence in a Second Language. *RELC journal*, 9(2), 1-21.
- Fraser, B. (1990). An approach to discourse markers. *Journal of pragmatics*, 14(3), 383-398.
- Fraser, B., & Nolen, W. (1981). The Association of Deference with Linguistic Form. *International Journal of the Sociology of Language*. 27, 93-109.
- Goffman, E. (1967). *Interaction Ritual: Essay on Face-to-Face Behavior*. New York: Anchor Books.

- Grice, H. P. (1961). The Causal Theory of Perception. *Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volume*, 35, pp. 121– 53.
- Gunarwan, A. (1992). Persepsi Kesantunan Direktif di dalam Bahasa Indonesia di antara Beberapa Kelompok Etnis di Jakarta, dalam Bambang Kaswanti Purwo (Ed.). *PELLBA 5: Bahasa Budaya*. Jakarta: Lembaga Bahasa Unika Atma Jaya, hlm. 179-202.
- Gunarwan, A. (1993). The politeness rating of English and Indonesian directive types among Indonesian learners of English: Towards contrastive pragmatics. In *4th International Pragmatics Conference, Kobe, Japan, 25-30 Juli 1993*.
- Gunarwan, A. (1995). Pragmatik: Pandangan Mata Burung, *Mengiring Rekan Sejati: Feschrift buat Pak Anton*, ed. Soedjono Dardjowidjojo. Jakarta: Unika Ata Jaya, hlm. 37-60.
- Gunarwan, A. (1999). Pragmatics and The Teaching of English in Indonesia: Some Implications. Makalah disajikan dalam *LIA International Seminar*, Jakarta, 1-3 Juli 1999.
- Hassall, T. (1999). Request strategies in Indonesian. *Pragmatics*, 9(4), 585-606.
- Haverkate, H. (1990). A speech act analysis of irony. *Journal of pragmatics*, 14(1), 77-109.
- House, J., & Kasper, G. (1987). Interlanguage pragmatics: Requesting in a foreign language. *Perspectives on language in performance*, 2, 1250-1288.
- Hymes, D. (1971a). On Communicative Competence, *Sociolinguistics*, ed. J. B. Pride dan Janet Holmes. Middlessex: Penguin Book, pp. 269-293.
- Hymes, D. (1971b). Competence and Performance in Linguistic Theory, *Language Acquisition: Models and Methods*, ed. Renira Huxley dan Elisabeth Ingram. London: Academic Press, pp. 3-28.
- Hymes, D. (1972). Models of the Interaction of Language and Social Life, *Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of*

- Communication*, ed. J. J. Gumperz dan Dell Hymes. New York: Holt Rinehart and Winston, pp. 35-71.
- Ibrahim, A. S. (1993). *Kajian Tindak Tutur*. Surabaya: Usaha Nasional
- Kartika, D. (2017). Strategi dan Penggunaan Modifikasi dalam Kesantunan Tindak Tutur Memohon Oleh Mahasiswa Jepang Pada Program Bahasa Indonesia Penutur Asing (BIPA). *Journal Indonesian Language Education and Literature*, 2(2), 136-147.
- Kartika, D. (2019). Politeness of Speech Acts in Indonesian Language by the Native Speaker of Japanese. *KnE Social Sciences*, 147-168.
- Kartika, D., & Aditiawarman, M. (2019). Analysis of apologies speech act in Japanese and English: Contrastive pragmatics. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(5), 245-255.
- Kartika, D., & Aziz, M. (2021, April). The Strategy of Politeness in Expressive Speech Act of Shinzo Abe's Resignation Speech. In *English Language and Literature International Conference (ELLiC) Proceedings* (Vol. 4, pp. 325-340).
- Kdar, D. Z., & Haugh, M. (2013). *Understanding Politeness*. New York: Cambridge University Press.
- Lakoff, R. (1973). Language and woman's place. *Language in society*, 2(1), 45-79.
- Lakoff, R. (1975). Linguistic Theory and The Real World. *Language Learning*, 25(2), 309-338.
- Lakoff, R. (1986). You say what you are: Acceptability and gender-related language. In *Dialect and language variation* (pp. 403-414). Academic Press.
- Lavandera, B. (1988). The social pragmatics of politeness forms. *Sociolinguistics/Soziolinguistik*, 2, 1196-1205.
- Leech, G. N. (1980). *Explorations in Semantics and Pragmatics*. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- Leech, G. N. (1983). *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Lyons, J. (1977). *Semantics* (Vol. 2). Cambridge: University Press.
- Lyons, J. (1995). *Linguistic semantics: An introduction*. Cambridge: University Press.
- Mey, J. L. (2001). *Pragmatics: an introduction*. John Wiley & Sons.
- Meyerhoff, M. (2006). *Introducing Sociolinguistics*. New York: Routledge.
- Nababan, P. W. J. (1987). *Ilmu Pragmatik (Teori dan Penerapannya)*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Obana, Y. (2021). *Japanese Politeness: An Enquiry*. New York: Routledge Taylor & Francis.
- Petrey, S. (2016). *Speech Acts and Literary Theory*. New York: Routledge.
- Pranowo. (2012). *Berbahasa Secara Santun*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Prayitno, H. J. (2011). *Kesantunan sosiopragmatik: studi pemakaian tindak direktif di kalangan anak SD berbudaya Jawa*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Purwo, B. K. (1984). *Deixis dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwo, B. K. (1990). *Pragmatik dan Pengajaran Bahasa: Menyibak Kurikulum 1984*. Yogyakarta: Kanisius.
- Reiss, N. (1985). *Speech Act Taxonomy as a Tool for Ethnographic Description*. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- Searle, J. R. (1969). *Speech acts: An essay in the philosophy of language* (Vol. 626). Cambridge university press.
- Searle, J. R. (1975). Indirect Speech Act (3<sup>rd</sup> Ed.). In Cole, P., and Morgan, J. L., *Syntax and Semantics*. New York: Academic Press
- Searle, J. R. (1976). A classification of illocutionary acts<sup>1</sup>. *Language in society*, 5(1), 1-23.
- Shahrokhi, M., & Bidabadi, F. S. (2013). An overview of politeness theories: Current status, future orientations. *American Journal of Linguistics*, 2(2), 17-27.
- Tarigan, D. (1990a). *Proses Belajar Mengajar Pragmatik*. Bandung: Angkasa.



- Tarigan, D. (1990b). *Pengajaran pragmatik*. Bandung: Angkasa.
- Thomas, J. (1983). Cross-cultural pragmatic failure. *Applied linguistics*, 4(2), 91-112.
- Thomas, J. (1995). *Meaning in Interaction: An Introduction to Pragmatics*. London: Longman.
- Trosborg, A. (1995). Statutes and contracts: An analysis of legal speech acts in the English language of the law. *Journal of Pragmatics*, 23(1), 31-53.
- Trosborg, A. (2011). *Interlanguage Pragmatics: Requests, Complaints, and Apologies*. New York: Mouton de Gruyter.
- Verschueren, J. (1999). *Understanding pragmatics*. London: Arnold
- Wibowo, W. (2022). *Konsep Tindak Tutur Komunikasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wijana, I. D. P. (1996). *Dasar-dasar pragmatik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Yule, G., & Widdowson, H. G. (1996). *Pragmatics*. Oxford: University Press.

# Tindak Tutur dan Kesantunan



Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia  
Pondok Karisma Residence  
Jalan Raflesia VI D.151  
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

ISBN 978-623-448-255-3

